

LAPORAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNY 2016
LOKASI
MAN Yogyakarta I
Jalan C. Simanjuntak No. 60 Yogyakarta

15 JULI – 15 SEPTEMBER 2016

*Laporan ini dikumpulkan sebagai syarat penilaian dalam mata kuliah
Praktik Pengalaman Lapangan Semester Khusus 2016/2017*

Dosen Pembimbing
Puji Wulandari K, M.Kn



Oleh:
Kery Anita
13401244006

POGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa ini:

Nama : Kery Anita

NIM : 13401244006

Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial

Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MAN Yogyakarta 1 mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016.

Yogyakarta, 15 September 2016

Dosen Pembimbing PPL

Guru Pembimbing PPL

Puji Wulandari K, M.Kn

Hartiningsih, M.Pd

NIP. 19800213 200501 2 001

NIP. 1972012005012 003

Mengetahui,

Plt Kepala Sekolah

Koordinator PPL

Singgih Sampurno, S.Pd. MA

Dra. Wahidatul M, M.Pd

NIP. 19770604 200501 1 004

NIP. 19690807 199403 2 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang menjadi tanda bahwa terselesaikannya kegiatan PPL di MAN Yogyakarta 1.

Berbagai bimbingan, dorongan, serta semangat telah penyusun dapatkan dari segenap pihak yang sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan PPL ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Rochmat Wahab, MA. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. LPPM-P UNY yang telah menyelenggarakan kegiatan PPL UNY 2016.
3. Ibu Mimin Nur Aisyah, M.Sc.Ak., selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL, atas segala bimbingan dan arahnya selama kegiatan PPL ini berlangsung.
4. Ibu Puji Wulandari K, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, atas segala bimbingan dan arahnya selama kegiatan PPL berlangsung.
5. Bapak Singgih Sampurno S.Pd, MA., selaku Plt Madrasah MAN Yogyakarta 1, atas kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan PPL di MAN Yogyakarta 1.
6. Ibu Dra. Wahidatul Mukarromah, M.Pd., selaku koordinator PPL MAN Yogyakarta 1.
7. Ibu Hartiningsih, M.Pd., selaku guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama melaksanakan kegiatan PPL di MAN Yogyakarta 1.
8. Bapak dan ibu guru serta staf karyawan MAN Yogyakarta 1.
9. Bapak, ibu, dan keluarga tercinta atas segala doa dan bantuannya selama ini, baik moral maupun material.
10. Teman-teman seperjuangan PPL UNY 2016 yang telah membantu dan berbagi suka duka selama kegiatan PPL berlangsung, dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini.
11. Teman-teman seangkatan program studi Pendidikan Kewarganegaraan 2013 yang sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat dan dukungan.
12. Seluruh siswa-siswi MAN Yogyakarta 1 yang telah mendukung pelaksanaan PPL, khususnya siswa-siswi kelas X IIS 1, X IIS 3, XII MIA 1, XII MIA 3.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu - persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan PPL UNY 2016 bisa terlaksana dengan lancar. Penyusun memohon maaf atas segala tingkah laku ataupun tindakan penyusun yang kurang berkenan.

Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, praktikan sangat mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna peningkatan dan perbaikan laporan ini sehingga menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 September 2016

Penyusun

Kery Anita

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i.
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Abstrak.....	vii
BAB I Pendahuluan	
A. Analisis Situasi.....	2
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL.....	6
BAB II Persiapan, Pelaksanaan dan Analisis Hasil	
A. Persiapan Kegiatan PPL.....	9
B. Pelaksanaan PPL.....	15
C. Analisis Hasil Pelaksanaan.....	25
D. Refleksi.....	
BAB III Penutup	
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran.....	29
Daftar Pustaka.....	32
Lampiran-lampiran.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Program Kerja PPL
2. Perangkat Pembelajaran
 - A. Silabus
 - B. Kalender Pendidikan
 - C. Program Tahunan
 - D. Program Semester
 - E. Perhitungan Minggu Efektif
 - F. RPP
 - G. Kisi – kisi Soal
 - H. Soal – soal Ulangan
 - I. Analisis Butir Soal
 - J. Analisis Hasil Ulangan
 - K. Program/ Pelaksanaan Perbaikan
 - L. Program/ Pelaksanaan Pengayaan
 - M. Daftar Nilai
 - N. Jadwal Mengajar
 - O. Identifikasi Bahan Ajar
 - P. Pengembalian Hasil Ulangan
 - Q. Buku Tugas Mandiri
 - R. Buku Tugas Terstruktur
 - S. Kartu Bimbingan PPL Tahun 2016
 - T. Dokumentasi Kegiatan

ABSTRAK
LAPORAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DI MAN YOGYAKARTA 1

Kery Anita
(13401244006)
Pendidikan Kewarganegaraan/FIS

Praktik Pengalaman Lapangan bertujuan untuk memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran yang utuh dan terpadu, melatih dan mengembangkan berbagai kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorang guru/tenaga kependidikan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai pembentukan tenaga kependidikan profesional yang siap memasuki dunia pendidikan, mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional, mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasai ke dalam praktik keguruan dan kependidikan. Praktik Pengalaman Lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang mencakup tugas-tugas keguruan

Pada kesempatan kali ini, mahasiswa dalam hal ini penyusun melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di MAN Yogyakarta 1 yang berlokasi di Jalan C. Simanjuntak No.60 Kota Yogyakarta Hal tersebut dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lebih optimal dalam mengajar serta mengembangkan sekolah. Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan bertahap dimulai dari observasi, baik observasi fisik sekolah ataupun administratif, serta kondisi siswa dan kelas yang akan digunakan sebagai praktik mengajar. PPL sendiri terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah konsultasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kepada guru pembimbing terlebih dahulu. Pelaksanaan PPL dilaksanakan di kelas X IIS1, X IIS3, XII MIA1, XII MIA3. Pengerjaan PPL dimulai pada tanggal 15 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 15 September 2016.

Dalam pelaksanaan praktik mengajar, ada beberapa hal mahasiswa praktikan persiapkan. Administrasi guru, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal evaluasi merupakan hal-hal yang menjadi hal utama dari seorang guru. Oleh karena itu, maka mahasiswa praktikan dapat mengetahui berbagai macam hal mengenai pengelolaan pembelajaran di sekolah beserta administrasi. Dengan pengalaman yang diperoleh selama perkuliahan, mahasiswa dapat meminimalisir kesulitan yang ditemui ketika PPL. Dengan melaksanakan PPL, mahasiswa memperoleh gambaran bagaimana tugas seorang guru dengan demikian siap untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru setelah lulus.

Kata kunci : PPL, praktik mengajar, mahasiswa, MAN Yogyakarta 1, Pendidikan Kewarganegaraan

BAB I

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan sangat berkaitan dengan bagaimana seorang guru itu dalam mendidik peserta didiknya. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas hendaknya dibutuhkan guru yang bermutu dan profesional dibidangnya. Maka calon-calon guru harus dipersiapkan sebaik mungkin dengan berbagai cara untuk menghasilkan guru yang berkompeten dan berkualitas. Salah satu cara yang bisa ditempuh yaitu dengan menyampaikan materi-materi yang sesuai dan dibutuhkan dibidangnya, melakukan praktik dan pelatihan-pelatihan bagi calon guru, yang bisa tercermin dalam program yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bergerak dibidang keguruan yaitu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa program S1 di Universitas Negeri Yogyakarta yang pelaksanaannya dilakukan di masyarakat, sekolah atau instansi pemerintahan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan latihan kependidikan bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa dari program studi kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Kegiatan PPL mencakup kegiatan yang berhubungan dengan program studi pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Kegiatan PPL mencakup praktik mengajar dan kegiatan akademis yang lain, dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang profesional. Kegiatan PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan manajerial di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan, melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan kemampuannya serta mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam proses pembelajaran sesuai bidang studinya, sedangkan PPL berfungsi sebagai salah satu cara melatih keberanian/mental mahasiswa di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan PPL juga dapat memberikan pengalaman serta wawasan mengenai proses kegiatan belajar mengajar. Melalui pengalaman yang diperoleh ketika proses PPL berlangsung maka mahasiswa mendapatkan bekal untuk terjun kedalam dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik. Selain itu, mahasiswa dapat menggunakan pengalamannya sebagai bekal untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional yang memiliki nilai, tanggung jawab, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam profesinya. Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa telah melakukan kegiatan sosialisasi antara lain melalui

mata kuliah micro-teaching dan observasi di sekolah baik observasi proses pembelajaran di kelas maupun observasi lingkungan sekolah. Kegiatan observasi dilaksanakan di sekolah, tujuannya agar mahasiswa mengetahui gambaran aktivitas pembelajaran di sekolah termasuk situasi dan kondisi di dalam kelas. Dalam kegiatan PPL ini, mahasiswa diterjunkan ke sekolah/ lembaga dalam jangka waktu 2 bulan untuk dapat mengenal, mengamati dan mempraktikkan semua kompetensi yang diperlukan bagi seorang guru/tenaga kependidikan.

A. Analisis Situasi

1. Sejarah MAN Yogyakarta 1

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Yogyakarta 1 berlokasi di Jln. C. Simanjuntak 60 Yogyakarta Telp. (0274) 513327. Bangunan MAN Yogyakarta 1 dulunya adalah merupakan bangunan untuk PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri). Perjalanan MAN Yogyakarta 1 dimulai pada tahun 1950. Sejarah singkat:

- 1950 – 1951 : SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama) secara de facto
- 1951 – 1954 : SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama) secara de jure
- 1954 – 1978 : PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri)
- 1978 – sekarang : MAN Yogyakarta 1

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Yogyakarta 1 merupakan SMA berciri khas agama islam sesuai dengan surat keputusan MENDIKBUD Nomor 0489/U/1992, sekaligus sebagai rintisan madrasah unggulan di Yogyakarta.

2. Visi MAN Yogyakarta 1

"Unggul, Ilmiah, Amaliyah, Ibadah, dan Bertanggung jawab (ULIL ALBAB)."

Terwujudnya lulusan Madrasah yang unggul dibidang iman - taqwa (imtaq) dan iptek, berfikir ilmiah, mampu mengamalkan ajaran agama, tekun beribadah, bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan pelestarian lingkungan.

3. Misi MAN Yogyakarta 1

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan ibadah serta akhlakul karimah menjadi pedoman hidup.
- 2) Menumbuhkembangkan nilai sosial dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
- 3) Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran secara efektif dan efisien agar siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- 4) Meningkatkan pembelajaran terhadap siswa melalui pendidikan yang berkarakter unggul, berbudaya, aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan.
- 5) Menumbuhkan semangat juang menjadi yang terbaik kepada siswa dalam bidang akademik dan non akademik.
- 6) Mempersiapkan dan memfasilitasi siswa untuk studi lanjut ke perguruan tinggi.
- 7) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam berkehidupan di masyarakat dan pelestarian lingkungan.

4. Strategi untuk Mewujudkan Visi dan Misi:

- Mengadakan siraman rohani rutin (menggiatkan sholat berjamaah bagi siswa, guru dan karyawan).
- Bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan dan menambah wawasan tentang Imtaq, Iptek, bahasa asing dan olahraga.
- Meningkatkan SDM guru mata pelajaran, guru BK dan karyawan.
- Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana pendidikan.
- Memberikan pendalaman materi bagi siswa kelas X , XI dan XII.
- Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat siswa.
- Mengikuti berbagai kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh instansi terkait.
- Membentuk kelompok KIR, Olimpiade IPA, dan kelompok pengguna bahasa asing yang mampu tampil bersaing di tingkat propinsi.
- Membentuk tim sepak bola dan bola basket yang mampu menjadi finalis di tingkat propinsi.
- Mengadakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar Nasional dengan penekanan pada lomba atau kegiatan yang terprogram.
- Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin pada minggu pertama ketiga untuk menumbuhkan disiplin dan rasa cinta tanah air.
- Mengadakan kegiatan-kegiatan terprogram yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, budaya dan lingkungan.

5. Letak dan Kondisi Fisik Sekolah

MAN 1 Yogyakarta terletak di Jl. C. Simanjuntak No. 60 Yogyakarta, termasuk dalam wilayah RT. 01/ RW. IV Kelurahan Terban. Lokasi sekolah ini cukup strategis karena berada tepat di tepi jalan raya dan mudah dijangkau

menggunakan berbagai alat transportasi. Secara geografis, MAN 1 Yogyakarta berada di lingkungan perkotaan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Sekip UGM
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. C. Simanjuntak dan Mirota Kampus
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Kampung Terban
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM

Kegiatan PPL di MAN Yogyakarta 1 dimulai dengan melakukan observasi ke sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan madrasah, mencari data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan sebagai gambaran perumusan program kerja yang dapat dilakukan di MAN Yogyakarta 1, sehingga observasi dilakukan pula di sekolah untuk merumuskan program kerja agar lebih mudah. Berikut adalah data hasil observasi yang dilakukan oleh tim PPL UNY:

1) Ruang Kelas

Ruang kelas di MAN Yogyakarta 1 terdiri dari 24 ruangan dengan perincian: 8 ruang kelas X (X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X IIS 1, X IIS 2, X IIS 3, X IBB, dan X IIK) yang terletak di lantai 2 dimana kelas X IBB dan X IIK berada di lantai dua bangunan di dekat parkir siswa. 8 ruang kelas XI terdiri dari 3 ruang kelas XI MIA 1, XI MIA 2 dan XI MIA 3, 3 ruang kelas XI IIS 1, XI IIS 2 dan XI IIS 3, 1 ruang kelas XI Bahasa, dan 1 ruang kelas XI Agama. 8 ruang kelas XII terdiri dari 3 ruang kelas XII MIA 1, XII MIA 2 dan XII MIA 3, 3 ruang kelas XII IIS 1, XII IIS 2 dan XII IIS 3, 1 ruang kelas XII IBB, dan 1 ruang kelas XII IIK.

2) Ruang Laboratorium

MAN Yogyakarta 1 memiliki 7 ruang laboratorium, yakni: Laboratorium Komputer dengan sistem LAN terletak disebelah selatan asrama putra. Laboratorium Biologi terletak dilantai dua tepat diatas laboratorium komputer. Laboratorium Kimia terletak di bagian belakang koperasi yang bersebelahan dengan laboratorium komputer dan asrama. Laboratorium Fisika terletak dilantai dua bersebelahan dengan perpustakaan. Laboratorium Agama terletak dibagian belakang, bersebelahan dengan ruang BK. Laboratorium IPS yang terletak dilantai 2, berhadapan langsung dengan aula atas. Laboratorium Bahasa terletak bersebelahan dengan perpustakaan. Di luar sekolah terdapat asrama putri siswi MAN Yogyakarta 1 yang terletak di sebelah selatan dari gedung MAN Yogyakarta 1.

3) Ruang Aula

Terdiri dari aula bawah dan aula atas dilantai 2. Aula bawah terdapat beberapa kursi dan meja yang biasanya digunakan sebagai tempat penerima tamu serta etalase piala dan trophy yang diletakkan dalam lemari. Untuk ruangan aula atas biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan, kegiatan siswa dan guru, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain.

4) Ruang Tata Usaha

Terletak disebelah di dekat ruang kepala madrasah dan aula bawah. Ruangan ini terdiri dari ruang kerja staf tata usaha dan ruang kepala tata usaha.

5) Ruang Kepala Madrasah

Terletak diantara ruangan tata usaha dan ruang wakil kepala madrasah.

6) Ruang Wakil Madrasah

Terletak disebelah selatan ruang tata usaha. Dilengkapi dengan beberapa personal komputer, dan meja dan kursi untuk menerima tamu.

7) Ruang Guru

Ruang guru terdiri dari dua ruangan yakni ruang guru untuk rumpun MIPATIK dan Bahasa terletak disebelah utara aula bawah, dan ruang guru untuk rumpun Agama dan IPS letaknya disebelah barat aula bawah.

8) Ruang Bimbingan Konseling (BK)

Terletak dibagian belakang, diantara asrama dan laboratorium agama.

9) Ruang Perpustakaan

Terletak disebelah utara ruang BK. Perpustakaan terdiri dari 2 ruangan yakni dilantai bawah dan lantai atas. Pada lantai bawah terdapat beberapa rak buku yang berisi buku pelajaran ilmu IPA, IPS, Bahasa, Agama, kitab-kitab, buku-buku cerita fiksi dan nonfiksi seperti novel, biografi dan lain-lain. Terdapat juga beberapa meja dan kursi, 2 buah PC, serta tempat bagian administrasi perpustakaan, serta 4 buah pC untuk sarana browsing siswa. Di lantai atas terdapat beberapa rak buku berisi majalah, buku-buku pelajaran, kamus, kitab-kitab dan lain-lain.

10) Asrama

Terdapat 2 asrama, yakni asrama putra dan asrama putri. Asrama putra terletak dibagian belakang sebelah selatan perpustakaan. Asrama putri terletak di luar gedung MAN Yogyakarta 1, lebih tepatnya di sebelah

selatan MAN Yogyakarta 1. Asrama sekaligus pondok pesantren Al-Hakim ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi siswa-siswi kelas X-XII.

11) Koperasi

Terletak di dekat ruang kelas XI IPA 1. Selain menyediakan jasa fotocopy, juga menyediakan alat tulis dan buku serta makanan ringan.

12) Masjid Al-Hakim

Terletak disebelah ruang perpustakaan, yang terdiri dari lantai atas dan bawah. Ruang di lantai bawah biasanya digunakan untuk jamaah wanita, sedangkan ruang lantai atas untuk jamaah pria. Dilengkapi dengan fasilitas lemari untuk tempat mukena.

13) Ruang Ekstrakurikuler

Organisasi ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Yogyakarta hampir semuanya memiliki ruang atau base camp yang terletak dibagian paling depan, sebelah utara gerbang utama. Beberapa ekstrakurikuler yang memiliki base camp diantaranya adalah KIR, Pramuka, Tonti, PMR, Rohis dan lain-lain.

14) Ruang OSIS

Ruang OSIS disediakan dan merupakan fasilitas sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan berhubungan OSIS. Letaknya berada di antara deretan ruang ekstrakurikuler, di bagian depan madrasah.

15) Ruang UKS

Ruang UKS berada diantara deretan ruang ekstrakurikuler. Ruang UKS terdiri atas dua ruangan yang terpisah yakni ruang UKS putra dan ruang UKS putri. Ruangan UKS dilengkapi dengan tempat tidur, meja dan kursi untuk dokter jaga, lemari obat, kipas angin, dan timbangan.

16) Kantin

Kantin terletak dibagian belakang perpustakaan.

17) Ruang Bank Mini dan Ruang Bank Mandiri Syari'ah

Terletak didekat gerbang utama yang disediakan untuk memfasilitasi dan mendukung siswa untuk belajar menabung sejak dini.

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL

1. Penyusunan Perangkat Persiapan Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa PPL MAN Yogyakarta 1 menyesuaikan dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah

antara lain LCD, laptop, speaker, whiteboard dan spidol. Sedangkan perangkat persiapan pembelajaran yang dipersiapkan oleh mahasiswa yang bersangkutan, antara lain penghitungan jam efektif, penyusunan program tahunan & program semester, dan RPP yang disusun sebelum pembelajaran dilaksanakan, pembuatan alat evaluasi berupa ulangan harian dan kisi-kisi soal, pembuatan media seperti slide show, kuis interaktif, video, dan lain-lain. Selain itu mahasiswa dituntut mampu menerapkan inovasi pembelajaran di kelas, menyusun dan mengembangkan alat evaluasi serta mempelajari administrasi guru dan kegiatan lain yang menunjang kompetensi mengajar.

2. Kegiatan Praktik Mengajar

Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan mulai tanggal 26 Juli 2016. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal mengajar guru pembimbing masing-masing. Praktik mengajar dilaksanakan minimal 8 kali oleh setiap mahasiswa PPL pada masing-masing jurusan. Berikut ini adalah rancangan kegiatan PPL secara global sebelum melakukan praktek mengajar di kelas.

- a. Observasi kelas yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 21 Juli 2016 di kelas XII MIA3 dan XII MIA1.
- b. Praktik mengajar di kelas dilakukan minimal 8 kali tatap muka dan dalam pelaksanaannya diamati oleh guru pembimbing. Dilaksanakan pada tanggal 26, 28, 29, 30 Juli 2016, 02, 04, 06, 09, 11, 13, 18, 20, dan 23 Agustus 2016.
- c. Menyusun persiapan untuk praktik mengajar secara mandiri, artinya materi yang diajarkan oleh mahasiswa menyesuaikan dengan materi terakhir yang diberikan oleh guru sebestumnya dan diberi kesempatan untuk mengelola proses pembelajaran secara penuh, namun tetap ada bimbingan dan pemantauan dari guru.
- d. Melakukan diskusi dan refleksi terhadap tugas yang telah dilakukan, baik yang terkait dengan kompetensi profesional, sosial, maupun interpersonal, yang dilakukan dengan teman sejawat, guru koordinator sekolah, dan dosen pembimbing.
- e. Menyusun laporan PPL pada akhir kegiatan PPL.

3. Piket

Selain melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang guru, mahasiswa juga melaksanakan beberapa tugas yang dapat memberikan pengalaman tentang

kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, misalnya melaksanakan tugas sebagai guru piket. Kegiatan piket dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh mahasiswa PPL UNY. Selain itu, para mahasiswa juga berusaha untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan, khususnya dalam mendampingi kegiatan siswa, baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Piket sendiri di MAN Yogyakarta 1 dilakukan di ruang lobby depan madrasah dengan didampingi oleh guru-guru piket.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL

A. Persiapan Kegiatan PPL

Persiapan sangat diperlukan oleh mahasiswa sebelum mahasiswa diterjunkan secara langsung ke sekolah untuk melaksanakan praktik PPL. Sebelum penerjunan PPL secara langsung ke sekolah, maka sebelumnya mahasiswa melakukan persiapan, yang meliputi kegiatan observasi kondisi sekolah, observasi kelas, pengajaran micro-teaching, pembekalan PPL, dan persiapan mengajar. Selain itu mahasiswa juga harus memikirkan variasi pembelajaran yang akan dilakukan baik metode, model dan media pembelajaran yang digunakan serta harus mampu manajemen waktu yang tepat agar materi bisa tersampaikan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat. Keberhasilan dari kegiatan PPL sangat ditentukan oleh kesiapan dan persiapan mahasiswa sebagai praktikan baik secara akademis, mental maupun keterampilan.

Adapun persiapan PPL yang telah dilakukan mahasiswa praktikan dimulai dengan memastikan mata pelajaran yang akan diampu. Setelah itu dilanjutkan dengan konsultasi bersama Guru pembimbing di sekolah yang telah ditentukan. Pelaksanaan PPL memerlukan persiapan-persiapan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu diperlukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

1. Pengajaran Mikro / Micro Teaching

Micro Teaching/ pengajaran mikro merupakan pengajaran yang dilaksanakan dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pengajaran ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebelum terjun ke lapangan secara langsung di sekolah. Pelaksanaan micro teaching dilakukan dalam kelompok kecil dengan anggota mahasiswa sebanyak 6 orang. Pelaksanaan kegiatan PPL diampu oleh 1 dosen pembimbing yaitu ibu Puji Wulandari K, M.Kn yang bertujuan agar mahasiswa lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran micro teaching, maka diharapkan mahasiswa memperoleh bekal/

pengalaman dan telah mempersiapkan mental sebelum terjun langsung ke sekolah.

Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik maupun saran setiap kali mahasiswa selesai praktek mengajar. Berbagai macam metode dan media pembelajaran dicoba dalam kegiatan ini, sehingga mahasiswa memahami media yang sesuai untuk setiap materi. Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik segi materi maupun penyampaian atau metode mengajarnya. Pengajaran mikro juga sebagai syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL yaitu harus lulus dalam matakuliah micro- teaching.

2. Pembekalan

Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang diselenggarakan oleh lembaga UNY, dilaksanakan dalam bentuk pembekalan PPL yang dilaksanakan di ruang Ki Hajar Dewantara, FIS UNY oleh Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan dari Jurusan yaitu Ibu Eni Kusdarini, M.Hum dan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016. Pembekalan dilakukan oleh masing-masing fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kegiatan pembekalan, DPL memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan PPL di MAN Yogyakarta 1.

3. Observasi

Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan atau observasi. Observasi tersebut dimaksudkan agar mahasiswa dapat merancang program PPL sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Observasi Lingkungan Sekolah

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui kondisi sekolah secara mendalam agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri pada pelaksanaan PPL di sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam observasi itu adalah lingkungan fisik sekolah, sarana prasarana sekolah, dan kegiatan belajar mengajar secara umum.

b. Observasi Pembelajaran di Kelas

Observasi pembelajaran di kelas bertujuan agar mahasiswa dapat secara langsung melihat dan mengamati proses belajar dalam kelas. Observasi kelas dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2016 di kelas XII MIA3 dan 21 Juli 2016 di kelas XII MIA1.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tersebut, mahasiswa mendapat masukan tentang cara guru mengajar dan metode yang akan digunakan. Selain itu, sikap siswa dalam menerima pelajaran juga dapat memberi gambaran bagaimana metode yang tepat untuk diaplikasikan pada saat praktik mengajar.

Tujuan kegiatan ini antara lain:

- Mengetahui materi yang akan diberikan
- Mempelajari situasi kelas
- Mengetahui tingkat kompleksitas materi bagi siswa
- Mempelajari kondisi siswa (keaktifan), dan
- Memiliki rencana konkret untuk mengajar

Adapun hasil observasi pembelajaran adalah:

1) Perangkat Pembelajaran

a. Satuan Pembelajaran (SP)

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MAN Yogyakarta 1 di kelas X maupun kelas XII menggunakan Kurikulum 2013.

b. Silabus

Silabus yang ada jelas dan disusun oleh kemedikbud. Sudah terdapat silabus dari setiap mata pelajaran. Dan terdapat kompetensi-kompetensi yang harus dicapai pada tiap mata pelajaran.

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah disusun secara jelas dan detail oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan bahasa Indonesia. RPP yang digunakan mengacu pada pembuatan RPP kurikulum 2013 yang memuat 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan) agar kemampuan afektif, kognitif dan psikomotorik siswa bisa seimbang dan dapat diasah.

2) Proses Pembelajaran

a. Membuka Pelajaran

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa siswa kemudian juga memberikan apersepsi untuk mengantarkan siswa agar siap belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Apabila pada jam pertama, maka guru bersama siswa membaca Al-Qur'an terlebih dahulu setelah itu bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai salah satu bentuk nasionalisme.

b. Penyajian Materi

Penyajian materi sesuai dengan silabus dan RPP yang telah dibuat. Guru menyampaikan materi dengan jelas dan mampu mengaitkan materi dengan keadaan lingkungan sekitar. Penyajian materi cukup menarik, dengan melibatkan siswa untuk bertanya.

c. Metode Pembelajaran

Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode-metode dengan pendekatan *scientific*. Metode yang digunakan ialah ceramah di awal pelajaran, guru menjelaskan materi pembelajaran. Selama kegiatan praktik siswa dapat mengajukan pertanyaan ke guru dan dapat juga berdiskusi dengan kelompok/teman lain.

d. Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia. Hal ini dapat dikatakan penggunaan bahasa cukup efektif mengingat pada akhirnya siswa paham maksud dari apa yang diharapkan.

e. Penggunaan Waktu

Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2 x 45 menit). Dari awal sampai akhir pembelajaran, penggunaan waktu cukup efektif dan efisien. Siswa diberi kesempatan untuk belajar dan bereksplorasi dengan pemahaman masing-masing.

f. Gerak

Gerak guru dalam menyampaikan pelajaran luwes, santai, dapat dengan tegas menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan siswa.

g. Cara Memotivasi Siswa

Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari serta sesekali menyemangati siswa dengan lisan. Guru juga memberikan poin plus bagi siswa yang bersedia maju mengerjakan soal maupun menjawab pertanyaan sehingga siswa juga ikut termotivasi untuk aktif di kelas. Selain itu ada beberapa kali game di dalam pembelajarana sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran.

h. Teknik Bertanya

Guru dalam memberikan pertanyaan dengan kondisi faktual yang ada pada saat pelajaran dan masih dalam lingkup mata pelajaran yang disampaikan.

i. Teknik Penguasaan Kelas

Guru cukup bisa mengendalikan kelas. Dibuktikan dengan adanya

keadaan kelas yang kondusif, aktif saat melaksanakan praktik dan selesai tepat waktu.

j. Penggunaan Media

Media yang digunakan ialah papan tulis dan spidol, serta LCD dan laptop.

k. Bentuk dan Cara Evaluasi

Evaluasi yang digunakan berupa evaluasi individual dengan memberikan permasalahan tertentu sebagai tugas yang harus dikerjakan dan selanjutnya dipraktikkan.

l. Menutup Pelajaran

Guru mengajak siswa untuk me-review materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan do'a dan salam. Kemudian memberikan tugas-tugas untuk pengembangan dengan melakukan latihan mandiri dan membaca materi berikutnya di rumah.

3) Perilaku Siswa

a. Perilaku Siswa di dalam Kelas

Siswa merespon pelajaran dengan baik, siswa aktif memperhatikan setiap materi yang diajarkan, merespon pertanyaan dari guru. Selain itu siswa juga aktif mengerjakan soal latihan di depan kelas, tetapi ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan. Siswa di dalam kelas belajar dengan santai. Namun, guru tetap mengkondisikan siswa agar tetap serius dan fokus terhadap mata pelajaran.

b. Perilaku Siswa Di Luar Kelas

Siswa dapat bergaul dengan siswa kelas lain maupun warga sekolah lainnya, termasuk mahasiswa observer dengan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) yang diterapkan sekolah.

4) Bimbingan DPL Jurusan

Bimbingan DPL Jurusan merupakan wadah bagi mahasiswa PPL untuk membicarakan masalah yang dihadapi selama PPL dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Jurusan. Melalui bimbingan DPL Jurusan dengan cara konsultasi, dapat dicari penyelesaian dari masalah yang dihadapi, khususnya masalah-masalah yang terkait selama PPL. Bimbingan dilaksanakan 4 kali yaitu pada tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyusunan RPP, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengelolaan Kelas, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penilaian dan tanggal 6

September 2016 tentang Penyusunan Laporan. Mahasiswa juga melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL untuk mendiskusikan pengalaman-pengalaman mengajar yang telah diperoleh, konsultasi materi yang kurang dipahami, dan metode yang cocok untuk pembelajaran dengan materi tertentu.

5) Persiapan Mengajar

Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum dan sesudah mengajar. Melalui persiapan yang matang, mahasiswa PPL diharapkan dapat memenuhi target yang ingin dicapai. Persiapan yang dilakukan untuk mengajar antara lain:

a. Konsultasi dengan guru pembimbing

Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebelum dan setelah mengajar. Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan untuk mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Sedangkan bimbingan setelah mengajar dimaksudkan untuk mengevaluasi cara mengajar mahasiswa PPL. Hal ini agar mahasiswa dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan selama proses belajar mengajar sehingga pada aktivitas pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik. Dengan konsultasi bersama guru pembimbing maka mahasiswa dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam pembelajaran selanjutnya.

b. Penguasaan materi

Materi yang akan disampaikan kepada siswa harus sesuai dengan kurikulum dan silabus pembelajaran. Mahasiswa harus menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan. Selain itu, mahasiswa juga harus mencari banyak referensi agar dapat mengembangkan materi sehingga pengetahuan yang didapat semakin berkembang, referensi juga didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Materi pembelajaran harus tersusun dengan baik dan jelas agar penyampaian materi dapat diterima dan dipahami oleh siswa. Materi juga harus *update* dengan informasi yang terbaru secara *factual* karena materi PPKn sendiri berkembang dengan berita-berita setiap harinya.

c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Penyusunan RPP dilaksanakan sebelum mahasiswa mengajar, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan materi, media, dan metode yang akan digunakan. Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan

guru pembimbing mata pelajaran, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktik mengajar kelas X IIS1, X IIS3, XII MIA1, XII MIA3. Materi yang diajarkan kepada siswa.

d. Pembuatan media pembelajaran

Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang penting untuk keberhasilan proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai media dalam menyampaikan materi kepada siswa agar mudah dipahami oleh siswa. Media dibuat berdasarkan metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran dan di rancang sebelum proses pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran yang telah dibuat berupa powerpoint presentasi dan kuis interaktif.

e. Pembuatan alat evaluasi

Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Alat evaluasi berupa soal latihan dan penugasan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok.

B. Pelaksanaan PPL

Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan PPL dilaksanakan selama kegiatan PPL di MAN Yogyakarta 1, pada umumnya seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan PPL akan dibahas secara detail, sebagai berikut:

1. Pembuatan Perangkat Pembelajaran

Persiapan yang dilakukan dalam menyusun perangkat pembelajaran yaitu konsultasi dengan guru pembimbing tentang materi yang akan diajarkan. Format perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu sesuai dengan format ISO.

Perangkat pembelajaran yang telah dibuat digunakan untuk materi tentang Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk kelas X IIS1 dan X IIS3 yaitu mulai Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan untuk kelas XII MIA1 dan XII MIA3 yaitu materi tentang Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila yaitu mulai substansi HAM dalam Pancasila, Kasus Pelanggaran HAM, dan Upaya Penanganan HAM. Materi yang

disampaikan antara kelas X dan kelas XII berbeda, oleh karena itu metode pembelajaran yang digunakanpun juga berbeda. Perangkat pembelajaran yang digunakan antara lain yaitu tugas mandiri, tugas kelompok, soal ulangan harian, soal remedial, soal pengayaan, sedangkan media pembelajaran yang digunakan yaitu powerpoint untuk menampilkan materi pelajaran, video pembelajaran tentang menteri-menteri di Indonesia untuk kelas X, dan video tentang suasana persidangan di ruang sidang untuk kelas XII, dan beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia maupun internasional. Soal ulangan harian baik untuk kelas X maupun kelas XII yaitu terdiri atas 20 pilihan ganda dan 5 uraian yang termuat dalam indikator-indikator sub bab materi bab 1. Perangkat pembelajaran yang digunakan untuk kelas X IIS1, X IIS3 sama karena tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama. Sedangkan untuk kelas XII MIA1, XII MIA3 juga sama karena indikator yang digunakanpun sama. Guru pembimbing melakukan penilaian terhadap semua perangkat pembelajaran yang telah dibuat dan memberikan saran untuk perbaikan selanjutnya.

2. Praktik Mengajar

Praktik mengajar dilakukan mulai tanggal 26 Juli 2016 - 23 Agustus 2016. Berikut adalah deskripsi praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa:

- a. Hari, tanggal : Selasa, 26 Juli 2016
- Kelas : XII MIA3
- Materi : Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila yang meliputi : Hak asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila, Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila
- Media : Powerpoint tentang “Nilai dasar, instrumental, dan praksis Pancasila dalam HAM”
- Kegiatan : Diskusi kelompok, tanya jawab
- Hambatan : Dalam pertemuan pertemuan dimulai dari perkenalan, kemudian langsung ke materi pembelajaran waktu efektif yang digunakan sehingga diskusi kelompok yang seharusnya dilakukan oleh semua anggota kelompok hanya dilakukan oleh 2 kelompok dengan alasan karena keterbatasan waktu.
- Solusi : Harus bisa menggunakan waktu seefektif mungkin di kelas selama 2x45 menit, karena indikator yang dicapai

- haruslah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran antara kelas satu dan kelas yang lainnya.
- Hasil : Siswa dapat menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam landasan HAM dan menjelaskan macam-macam hak asasi maupun kewajiban asasi dari warga negara
- b. Hari, tanggal : Kamis, 28 Juli 2016
- Kelas : XII MIA 1
- Materi : Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila yang meliputi : Hak asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila, Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila
- Media : Powerpoint tentang “Nilai dasar, instrumental, dan praksis Pancasila dalam HAM”
- Kegiatan : Diskusi kelompok, tanya jawab
- Hambatan : Beberapa siswa kurang aktif dalam diskusi kelompok yang dilakukan, dalam berkelompok masih terdapat siswa yang tidak ikut serta dalam mengerjakan tugas kelompok. Pada pertemuan pertama di kelas dengan mahasiswa PPL siswa cenderung tidak aktif dan kurang memperhatikan materi yang di sampaikan oleh mahasiswa.
- Solusi : Siswa diberikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran dan diberikan pernyataan bahwa anggota kelompok yang tidak ikut mengerjakan akan tidak mendapatkan nilai. Kemudian diberikan arahan bahwa siswa yang aktif bertanya maupun menjawab di kelas akan mendapatkan poin nilai tersendiri.
- Hasil : Siswa dapat menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam landasan HAM dan menjelaskan macam-macam hak asasi maupun kewajiban asasi dari warga negara
- c. Hari, tanggal : Kamis, 26 Juli 2016
- Kelas : X IIS1
- Materi : Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Media	: Powerpoint tentang “macam-macam kekuasaan dan pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia”
Kegiatan	: Diskusi kelompok dan tanya jawab
Hambatan	: Ada beberapa siswa yang hyperaktif di kelas bertanya tetapi tidak materi yang disampaikan oleh mahasiswa PPL dan siswa tersebut acuh tak acuh, ramai di kelas. Dan ada siswa-siswa yang aktif bertanya dalam pembelajaran tidak berkonsentrasi di dalam kelas karena siswa yang ramai. Untuk diskusi kelompok sendiri, dalam satu kelompok yang bekerja mengerjakan tugas hanya beberapa orang tidak semuanya ikut mengerjakan
Solusi	: Siswa diberikan pengertian tentang sikap yang dilakukan didalam kelas harus sopan dan memperhatikan guru yang menyampaikan materi, karena sikap siswa baik itu sosial maupun spiritual dimasukkan dalam penilaian sikap. Kemudian diberikan arahan bahwa tugas kelompok
Hasil	: siswa dapat menjelaskan materi tentang macam-macam kekuasaan negara di Indonesia melalui kegiatan diskusi kelompok
d. Hari, tanggal	: Jumat, 29 Juli 2016
Kelas	: X IIS3
Materi	: Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
Media	: Powerpoint tentang “macam-macam kekuasaan dan pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia
Kegiatan	: Diskusi kelompok dan tanya jawab
Hambatan	: Pertemuan pertama kali di kelas setelah perkenalan yaitu langsung ke materi. Ada beberapa murid yang di belakang tempat duduknya ramai dengan sendirinya, dan ada beberapa murid yang tidak fokus ke materi pembelajaran seperti mengantuk. Hal ini dikarenakan jam terakhir
Solusi	: Untuk lebih memberikan siswa pendalaman materi pada jam terakhir harus diberikan metode

- pembelajaran yang tidak membosankan agar murid fokus dan tetap memperhatikan materi yang disampaikan oleh mahasiswa PPL
- Hasil : Siswa dapat memahami materi tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia
- e. Hari, tanggal : Selasa, 2 Agustus 2016
- Kelas : XII MIA 3
- Materi : Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran HAM
- Media : Powerpoint dan video interaktif
- Kegiatan : Diskusi kelompok dan tanya jawab
- Hambatan : Ada beberapa siswa yang izin meninggalkan kelas karena mengikuti lomba, ekstrakurikuler, sehingga kegiatan belajar mengajar kurang kondusif. Karena anak yang tidak mengikuti pelajaran tidak mengumpulkan tugas-tugas
- Solusi : Mengingatkan kepada anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran di kelas agar segera mengumpulkan tugas yang seharusnya dikerjakan
- Hasil : Siswa memahami materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia maupun Internasional
- f. Hari, tanggal : Kamis, 4 Agustus 2016
- Kelas : XII MIA 1
- Materi : Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran HAM
- Media : Powerpoint dan video interaktif
- Kegiatan : Diskusi kelompok dan tanya jawab
- Hambatan : Kecenderungan siswa diam di kelas namun tetap memperhatikan, namun tidak ada umpan balik yang ada dikelas. Sehingga kelas tenang kurang ada tanya jawab
- Solusi : Memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktif di kelas dan menyiapkan media pembelajaran agar

- tanya jawab di kelas berlangsung sesuai indikator yang dicapai
- Hasil : Siswa memahami materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia maupun Internasional
- g. Hari, tanggal : Kamis, 4 Agustus 2016
 Kelas : X IIS1
 Materi : Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian
 Media : Powerpoint dan video interaktif
 Kegiatan : Diskusi dan tanya jawab
 Hambatan : Siswa belum memahami materi yang disampaikan tentang fungsi kementerian RI dan lembaga pemerintah non kementerian
 Solusi : Mahasiswa PPL menjelaskan lagi dengan poin-poin yang jelas tentang materi yang belum dipahami oleh siswa
 Hasil : Siswa paham materi tentang kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian
- h. Hari, tanggal : Senin, 8 Agustus 2016
 Kelas : X IIS1
 Materi : Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
 Media : Powerpoint
 Kegiatan : Ceramah, diskusi dan tanya jawab
 Hambatan : Siswa mengantuk karena pergantian jadwal menjadi jam terakhir
 Solusi : Metode pembelajaran yang digunakan harus lebih membangkitkan semangat siswa agar fokus kepelajaran
 Hasil : Siswa paham materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan
- i. Hari, tanggal : Selasa, 9 Agustus 2016
 Kelas : XII MIA 3

- Materi : Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Media : Powerpoint dan Video Interaktif
- Kegiatan : Bermain peran dalam sidang
- Hambatan : Kurang mengefektifkan waktu sehingga sidang belum sampai putusan hakim
- Solusi : Siswa diberikan waktu dalam mempraktikkan tata cara sidang di pengadilan
- Hasil : Siswa paham dari mempraktikkan sidang pengadilan tentang kasus pelanggaran HAM
- j. Hari, tanggal : Kamis, 11 Agustus 2016
- Kelas : XII MIA 1
- Materi : Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- Media : Powerpoint dan Video Interaktif
- Kegiatan : Bermain peran dalam sidang
- Hambatan : Dalam sidang kasus yang diperkarakan merembet sampai kemana-mana dan keluar dari topik sehingga sidang tidak selesai sampai putusan
- Solusi : Lebih mengefektifkan waktu dan membatasi topik permasalahan dalam sidang kasus pelanggaran HAM
- Hasil : Siswa mempraktikkan kegiatan sidang kasus pelanggaran HAM
- k. Hari, tanggal : Jumat, 12 Agustus 2016
- Kelas : X IIS 3
- Materi : Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- Media : Powerpoint
- Kegiatan : Tanya jawab, ceramah, diskusi
- Hambatan : Ada beberapa siswa yang belum paham dengan materi yang disampaikan
- Solusi : Memberikan poin-poin kepada siswa yang mudah dimengerti
- Hasil : Siswa paham tentang materi nilai-nilai pancasila

1. Hari, tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016
 Kelas : XII MIA 1
 Materi : Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
 Media : Lembar soal dan lembar jawaban
 Kegiatan : Ulangan Harian secara *close book*
 Hambatan : -
 Solusi : -
 Hasil : Siswa 32 mengikuti ulangan harian dan waktu mengerjakan 60 menit sedangkan 30 menit untuk evaluasi
- m. Hari, tanggal : Senin, 22 Agustus 2016
 Kelas : X IIS 1
 Materi : Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
 Media : Lembar soal dan lembar jawaban
 Kegiatan : Ulangan Harian secara *close book*
 Hambatan : Siswa ketika mengerjakan masih gaduh dan ramai dengan sendirinya dan menyebabkan siswa lain terganggu
 Solusi : Lebih menertibkan siswa agar tidak ramai dan ulangan berjalan dengan lancar
 Hasil : Ada 29 siswa yang mengikuti ulangan harian dan 1 siswa yang berhalangan hadir
- n. Hari, tanggal : Selasa, 23 Agustus 2016
 Kelas : XII MIA 3
 Materi : Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
 Media : Lembar soal dan lembar jawaban
 Kegiatan : Ulangan Harian secara *close book*
 Hambatan : Ada beberapa siswa yang tidak masuk dan mengikuti ulangan
 Solusi : Direncanakan ada ulangan susulan

- Hasil : Siswa yang mengikuti ulangan harian yaitu 29 orang dan 4 tidak mengikuti ulangan
- o. Hari, tanggal : Jumat, 26 Agustus 2016
- Kelas : X IIS 3
- Materi : Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
- Media : Lembar soal dan lembar jawaban
- Kegiatan : Ulangan Harian secara *close book*
- Hambatan : Ada 5 siswa yang tidak mengikuti ulangan harian karena ada kepentingan. Kemudian waktu yang seharusnya 60 menit untuk mengerjakan dan 30 menit untuk evaluasi jadi terhambur karena banyak siswa yang belum selesai tepat waktu
- Solusi : Merencanakan ulangan susulan
- Hasil : Siswa yang mengikuti ulangan sebanyak 25 dan 5 berhalangan masuk

3. Piket TU

- Tujuan : Membantu guru piket dalam memastikan presensi siswa untuk mengetahui jumlah siswa yang hadir, serta mengetahui siswa yang terlambat masuk ke sekolah dan menyampaikan tugas ke siswa jika guru mengajar berhalangan hadir. Serta memberikan surat meninggalkan kelas bagi siswa yang tidak mengikuti KBM di kelas.
- Bentuk : Daftar tertulis dalam presensi
- Sasaran : Siswa MAN Yogyakarta 1
- Tempat : Ruang piket lobby depan
- Waktu : Setiap hari efektif dan sesuai jadwal mahasiswa PPL
- Hasil : Rekap data-data mengenai presensi siswa dan tersampaikan tugas ke siswa, dan mengetahui siswa yang datang terlambat
- Dana : -

4. Piket Perpustakaan

- Tujuan : Membantu petugas perpustakaan dalam melayani peminjaman, pengembalian dan pengelolaan buku serta penyampulan buku-buku.

Bentuk	: -
Sasaran	: Siswa MAN Yogyakarta 1
Tempat	: Perpustakaan MAN Yogyakarta 1
Waktu	: Setiap hari Rabu
Hasil	: Terbantunya karyawan perpustakaan dalam kegiatan administrasi dan pengelolaan buku-buku
Dana	: -

5. Umpan Balik dari Guru Pembimbing

Guru pembimbing akan memberikan umpan balik kepada praktikan dalam praktik mengajarnya sebagai bekal mengajar berikutnya. Umpan balik tersebut dapat berupa:

- Masukan tentang penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu mengenai penyusunan langkah-langkah pembelajaran yang berkarakter dan sistem pemberian nilai/skor dalam setiap latihan.
- Masukan tentang penyusunan administrasi guru yaitu Silabus, RPP, rencana program tahunan, rencana program semester, rencana program agenda harian, pelaksanaan program harian, daftar siswa, jadwal mengajar, kisi-kisi soal, analisis butir soal dan daya serap atas bawah.
- Masukan mengenai materi yang disampaikan, praktikan harus menguasai materi yang disampaikan sebelum praktik mengajar sehingga kalau ada siswa yang bertanya atau kurang paham bisa menjelaskan lebih mendetail.
- Masukan tentang cara mengajar praktikan, praktikan harus bisa mengelola kelas dengan baik dan volume suara dalam mengajar harus di perkeras dan jelas sehingga siswa bisa memahami materi yang disampaikan.
- Masukan mengenai media pembelajaran, praktikan diharapkan bisa menggunakan variasi media pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan.
- Masukan mengenai alat dan cara evaluasi yang digunakan, praktikan diharapkan bisa menyusun evaluasi sesuai dengan KD dan sistem pemberian skor / nilai di tiap-tiap soal.

6. Penyusunan Laporan

Tindak lanjut dari program PPL adalah penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan PPL berisi kegiatan yang dilakukan selama PPL. Laporan ini disusun secara

individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PPL sekolah, Kepala Sekolah, dan Dosen Pembimbing Lapangan PPL Jurusan.

7. Penarikan PPL

Penarikan mahasiswa PPL dilakukan pada tanggal 17 September 2016 oleh pihak UNY yang diwakilkan kepada ibu Mimin Nur Aisyah, M.Sc., selaku DPL PPL UNY, seluruh mahasiswa PPL UNY 2016, guru-guru pembimbing mahasiswa PPL dan ibu Dra. Wahidatul Mukarromah, M.Pd. selaku koordinator PPL MAN Yogyakarta 1 serta Bapak Singgih Sampurno, S.Pd, M.A selaku Pelaksana tugas Kepala Madrasah.

C. Analisis Hasil

1. Praktek Mengajar

Praktek mengajar dalam kegiatan yang terdiri dari praktek mengajar terbimbing dan praktek mengajar mandiri memiliki beberapa poin yang perlu untuk dibahas dan dijabarkan. Pendeskripsian akan kegiatan yang dilaksanakan digunakan sebagai tolak ukur dan penilaian terhadap proses dan hasil yang diperoleh. Berikut ini poin-poin yang dilaksanakan dalam praktek mengajar yang sebelumnya sudah dideskripsikan secara garis besar:

a. Penyusunan RPP

RPP yang telah dibuat yaitu sebanyak 13 dalam satu semester.

No.	Materi Pokok	Waktu	Kelas
1.	Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila	2JP	XII MIA
2.	Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia	2JP	XII MIA
3.	Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia	2JP	XII MIA
4.	Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2JP	XII MIA
5.	Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	2JP	XII MIA
6.	Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	2JP	XII MIA
7.	Tujuan Negara Republik Indonesia	2JP	XII MIA
8.	Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2JP	XII MIA
9.	Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang- Undang Dasar Negara	2JP	XII MIA

	Republik Indonesia Tahun 1945		
10.	Pembagaian Urusan Pemerintahan	2JP	XII MIA
11.	Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara	2JP	XII MIA
12.	Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	2JP	XII MIA
13.	Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	2JP	XII MIA

b. Penyusunan Program Tahunan, Program Semester, dan Perhitungan Jam Efektif

Kegiatan penyusunan program tahunan (PROTA) dan program semester (PROSEM) dilakukan bersama dengan Guru Pembimbing. Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan berbagai kegiatan pembelajaran selama satu tahun dan satu semester ke depannya. Serta mengitung minggu, hari, dan jam efektif dalam kegiatan belajar mengajar.

c. Praktik Mengajar

Kegiatan Praktik mengajar yang dijelaskan sebelumnya terbagi menjadi praktik mengajar terbimbing dan praktisi mengajar mandiri dilakukan untuk melatih mahasiswa dalam mengatur, mengajar dan mendidik siswa dengan didampingi oleh guru pembimbing di dalam kelas. Kemudian setelah mahasiswa selesai mengajar, guru pembimbing memberikan masukan dan saran yang membangun kepada mahasiswa mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mahasiswa telah mengajar sebanyak 15 kali di kelas tempat mahasiswa praktek.

Buku yang digunakan mahasiswa selama kegiatan mengajar yaitu:

- 1) Alston Philip. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII
- 2) Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- 3) Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.

d. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dilaksanakan sebagai pengamatan kemampuan siswa berdasarkan nilai yang mereka peroleh dari kegiatan Ulangan Harian. Setelah didapatkan hasil lalu dapat diketahui nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah kelas.

e. Pembahasan Soal Ulangan Harian

Pembahasan soal ulangan harian perlu dilakukan hal ini setelah mahasiswa selesai mengoreksi dan merekapitulasi nilai hasil Ulangan Harian, kemudian

mahasiswa membagikan lembar jawaban kepada siswa untuk kemudian dibahas bersama-sama sebagai bahan latihan Ujian Tengah Semester.

f. Rekapitulasi Nilai Siswa

Rekapitulasi nilai siswa dilaksanakan mahasiswa setelah selesai mengoreksi hasil dari Ulangan Harian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui berapa nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah kelas.

Kegiatan PPL yang dilaksanakan di kelas X IIS 1 persentase banyaknya yang telah tuntas KKM 76 ulangan harian adalah 56,7 % yaitu dengan jumlah siswa yang telah tuntas 17 siswa. Kemudian untuk remidi siswa yang nilainya kurang dari 76 adalah 13 siswa. Di kelas X IIS3 persentase siswa yang tuntas ulangan harian adalah 55,2% yakni dengan jumlah siswa yang tuntas mencapai 16 siswa dan yang mengikuti remidisebanyak 13 siswa. Untuk kelas XII MIA1 persentase banyaknya yang telah tuntas KKM 78 ulangan harian adalah 76,5% yaitu sebanyak 26 siswa, dan untuk remidi dilakukan oleh 8 siswa yang belum tuntas. Kelas XII MIA 3 persentase jumlah siswa yang tuntas yaitu 84,8 % dengan jumlah 28 siswa dan remidi yaitu 5 siswa. Pelaksanaan remidi dilaksanakan 2 tahap yaitu pada hari Jumat, 26 Agustus 2016 dan Rabu, 31 Agustus 2016. Soal remidi untuk 4 kelas yaitu mengerjakan ulang ulangan harian. Hasil dari nilai siswa yang mengikuti remidi lebih baik dari nilai ulangan harian sebelumnya, dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal yaitu 76 untuk kelas X dan 78 untuk kelas XII.

g. Pembuatan Laporan PPL

Pembuatan laporan menjadi bagian terakhir dari kegiatan PPL dimana hasil dari laporan akan diserahkan kepada Universitas dalam hal ini LPPMP sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa selama kegiatan PPL dilaksanakan.

D. Refleksi

Dari pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa proses kegiatan PPL berjalan cukup lancar. Dengan beberapa hambatan yang muncul baik dari faktor internal maupun eksternal sebagian besar dapat diatasi dengan baik. Meskipun begitu masih ada beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Namun, secara keseluruhan target praktikan hampir semua berjalan sesuai rencana.

1. Faktor Pendukung

- Guru pembimbing yang sangat rapi dalam administrasi, sehingga mahasiswa mendapatkan kemudahan, banyak ilmu dan pengalaman dalam pembuatan administrasi guru.

- Guru pembimbing yang selalu melakukan evaluasi di tiap akhir pertemuan atas kekurangan-kekurangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- Siswa kelas X maupun kelas XII yang sangat aktif dalam pembelajaran, sehingga sangat mudah menggali pemikiran para siswa di kelas.

2. Faktor Penghambat

- Siswa yang kadang sudah lelah dan mengantuk saat mengikuti pelajaran karena mata pelajaran PPKn di empat kelas ada pada jam terakhir semua.
- Siswa kelas X sulit dikendalikan dalam kelas karena ramai, dan suka bermain-main di dalam kelas. Hal ini disebabkan karena peralihan dari masa SMP yang masih ingin bermain di kelas.
- Untuk kelas XII ada beberapa siswa yang sering izin tidak mengikuti pelajaran karena kegiatan ekstrakurikuler sekolah sehingga mengumpulkan tugas tidak tepat waktu

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan selama 2 bulan dimulai tanggal 15 Juli – 15 September 2016 telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam pengelolaan diri sebagai calon pendidik yang profesional. Sebelum mengajar mahasiswa perlu melakukan berbagai tahapan-tahapan yang tidak boleh ditinggalkan mulai dari tahap persiapan hingga praktik mengajar di depan kelas. Melalui pelaksanaan PPL di MAN Yogyakarta 1 praktikan mempunyai gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.

Setelah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MAN Yogyakarta 1 selesai, maka dengan memperhatikan hal-hal yang bermanfaat, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana untuk melatih mahasiswa sebagai calon pendidik agar memiliki nilai, sikap, pengalaman dan keterampilan professional dalam proses pembelajaran.
2. Mahasiswa dapat memahami perencanaan dan penyusunan RPP, sistem penilaian, metode pembelajaran, administrasi guru serta bahan ajar sebelum melakukan praktik mengajar di kelas.
3. Mahasiswa dapat mengambil pengalaman yang berharga dari hasil praktek mengajar atau yang berkaitan langsung dengan KBM, yaitu berkaitan dengan proses interaksi antara praktikan dengan siswa sehingga praktikan dapat mengetahui berbagai macam karakter siswa.
4. Mahasiswa lebih termotivasi untuk dapat mengembangkan materi dan penampilannya dalam mengajar sehingga nantinya akan timbul profesionalitas guru seperti yang diharapkan.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman selama kegiatan PPL di MAN Yogyakarta 1, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai pelaku dari program PPL/Magang III juga harus senantiasa berusaha secara maksimal untuk ketercapaian efektifitas dari pelaksanaan program tersebut. Di bawah ini beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan oleh mahasiswa guna memaksimalkan program kerja PPL/Magang III:

- a. Mahasiswa PPL/Magang III hendaknya melakukan observasi secara optimal, agar program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Mahasiswa harus lebih punya kesadaran bahwa program PPL/Magang III merupakan program pengabdian masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam menjalankan kegiatan PPL/Magang III harus dilandasi dengan keikhlasan dan kesabaran.
- c. Mahasiswa harus lebih bisa menjamin hubungan interpersonal yang baik kepada seluruh warga sekolah, tanpa memandang status di lingkungan sekolah tersebut.
- d. Sebagai calon pendidik, mahasiswa PPL/Magang III hendaknya dapat menempatkan diri dan beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah serta senantiasa profesional dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan.
- e. Penguasaan materi hendaknya harus diperhatikan dengan baik dan benar oleh praktikan dalam proses pembelajaran di sekolah sehingga nantinya materi yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar oleh siswa.
- f. Hendaknya mahasiswa praktikan sering berkonsultasi pada guru dan dosen pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahuikelebihan, kekurangan dan permasalahan selama kegiatan mengajar. Dengan demikian proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas secara terus menerus.

2. Bagi Pihak Sekolah

- a. Sarana dan prasarana yang sudah ada, hendaknya dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif.
- b. Sekolah perlu mempertahankan pembinaan iman dan takwa serta penanaman tata krama warga sekolah khususnya siswa yang selama ini sudah berjalan sangat bagus. Selain itu, kedisiplinan pihak sekolah perlu ditingkatkan agar siswa memiliki kedisiplinan dan menunjang proses pembelajaran agar tujuan sekolah dan pembelajaran dapat tercapai.
- c. Kegiatan belajar mengajar maupun pembinaan minat dan bakat siswa hendaknya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya agar prestasi yang selama ini diraih bisa terus dipertahankan.

- d. Meningkatkan secara terus menerus manajemen pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik guru dan karyawan agar berperan lebih maksimal sesuai dengan kompetensinya.
3. Bagi Pihak LPPMP atau Universitas
- a. Perlunya pembekalan kepada mahasiswa dengan menghadirkan narasumber dari pihak sekolah baik sekolah swasta maupun sekolah negeri agar mahasiswa tahu bagaimana karakteristik masing-masing sekolah, selain itu mampu menunjukkan permasalahan yang sebenarnya yang ada di lapangan sehingga hasil pelaksanaan PPL dapat lebih maksimal.
 - b. Pembekalan kegiatan PPL dan sosialisasi hendaknya dikemas lebih baik lagi oleh pihak LPPM-P agar tidak terjadi simpang siur informasi yang menjadikan pihak mahasiswa dan sekolah menjadi bingung.

DAFTAR PUSTAKA

LPPM-P. 2016. Panduan PPL/Magang III. Yogyakarta: LPPM-P Universitas Negeri Yogyakarta



**MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY
LOKASI MAN YOGYAKARTA I
TAHUN : 2016**

F01

Kelompok Mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : MAN YOGYAKARTA I
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA : Jl. C. Simanjuntak No. 60 Yogyakarta
TANGGAL PELAKSANAAN PPL : 15 Juli 2016 – 15 September 2016

No	Program / Kegiatan PPL	Jumlah jam/minggu											Jml Jam		
		April	Juli			Agustus				September					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	
1.	Penerjunan Mahasiswa PPL	3													3
2.	Sosialisasi dan pembekalan PPL oleh koordinator PPL sekolah	2													2
3.	Observasi Sekolah dan Pembelajaran di kelas	2	4												6
4.	Konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan					1	1		1	1					4
5.	Konsultasi dengan guru pembimbing	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
6.	Jaga piket di ruang piket		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7.	Penyusunan RPP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20
8.	Penyusunan Silabus		2												2
9.	Praktik Mengajar di XII MIA 1														
	a. Persiapan			1	1	1	1	1	1	1	1				7
	b. Pelaksanaan			2	2	2	2	2	2	2	2				14
	c. Evaluasi			1	1	1	1	1	1	1	1				7
10.	Praktik Mengajar di XII MIA 3														
	a. Persiapan			1	1	1	1	1	1	1	1				7
	b. Pelaksanaan			2	2	2	2	2	2	2	2				14
	c. Evaluasi			1	1	1	1	1	1	1	1				7
11.	Praktik Mengajar di X IIS 1														
	a. Persiapan			1	1	1	1	1	1	1	1				7
	b. Pelaksanaan			2	2	2	2	2	2	2	2				14



**MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY
LOKASI MAN YOGYAKARTA I
TAHUN : 2016**

F01

Kelompok Mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

	c. Evaluasi					1	1	1	1	1	1	1	1	7
12.	Praktik Mengajar di X IIS 3													
	a. Persiapan					1	1	1	1	1	1	1	1	7
	b. Pelaksanaan					2	2	2	2	2	2	2	2	14
	c. Evaluasi					1	1	1	1	1	1	1	1	7
13.	Pendampingan Mengajar													
	a. XII IBB					2	2	2	2	2				10
14.	Evaluasi Hasil Belajar – Ulangan Harian I													
	a. Pembuatan soal ulangan								2	2				4
	b. Penggandaan soal ulangan								0,5	0,5				1
	c. Pelaksanaan ulangan									2	4	2		8
	d. Pengoreksian soal ulangan									2	2	2		6
15.	Pembahasan Soal UH 1													
	a. Persiapan									0,5	0,5			1
	b. Pelaksanaan										2	2		4
16.	Remedial Ulangan Harian 1													
	a. Pembuatan soal remedial									2	2			4
	b. Penggandaan soal remedial									0,5	0,5			1
	c. Pelaksanaan remedial										2	2		4
	d. Pengoreksian soal remedial											4		4
17.	Rekapitulasi Nilai Siswa													
	a. Persiapan										1	1	1	3
	b. Pelaksanaan											2	2	2
18.	Pembuatan Laporan PPL													
	a. Persiapan										1	1	1	1
	b. Pelaksanaan											2	2	2



**MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY
LOKASI MAN YOGYAKARTA I
TAHUN : 2016**

F01

Kelompok Mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

19.	Jaga Piket Perpustakaan						3	3	3	3	3	3	3	21
20.	Sapa Salam Pagi			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
21.	Penarikan PPL												2	2
22.	Pembuatan Adminstrasi Pembelajaran								3	3	3	3	3	12
B. PROGRAM INSIDENTAL														
1.	Upacara Pembukaan MOPDB			2										2
2.	Pendampingan MOPDB			3										3
3.	Upacara bendera peringatan kemerdekaan						2							2
4.	Upacara bendera hari Senin								2					2
5.	Mengikuti Partner Pratiwi mengajar di kelas			2	2					2	2			8
6.	Lomba Memasak dan Kebersihan Kelas dalam rangka Idul Adha											6		6
Total Jam														339,5

Yogyakarta, 15 September 2016



Kepala Sekolah

Singgih Sampurno, S.Pd., MA
NIP 197706042005011004

Dosen Pembimbing Lapangan

Puji Wulandari K.M.Kn
NIP 198002132005012 001

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran

Hartiningsih, M.Pd
NIP 1972012005012 003

Mahasiswa PPL

Kery Anita
NIM 13401244006

**KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH**

KELAS: X

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	<p>1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	<p>2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum.</p> <p>2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..</p> <p>2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.</p> <p>2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p>
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	<p>3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.3 Memahami bentuk dan kedaulatan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.</p> <p>3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>3.7 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>.</p> <p>3.8 Memahami pentingnya kesadaran berbangsa</p>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia.
<p>4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.</p>	<p>4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.3 Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI</p> <p>4.6 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>4.7 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>.</p> <p>4.8 Menyaji analisis tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia</p> <p>4.9.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</p> <p>4.9.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</p>

KELAS: XI

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
<p>1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya</p>	<p>1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya</p> <p>1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p>
<p>2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p>	<p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.2 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum).</p> <p>2.4 Menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2.5 Menghayati budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI.</p>
<p>3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM</p> <p>3.2 Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>3.3 Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>3.4 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.5 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</p> <p>3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>3.7 Menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></p> <p>3.8 Menganalisis dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik</p> <p>3.9 Menganalisis macam-macam budaya politik di Indonesia</p>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
<p>4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.</p>	<p>4.1 Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM</p> <p>4.2 Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>4.3 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>4.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.5 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>4.6 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>4.7 Menyaji hasil analisis tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></p> <p>4.8 Menyaji hasil analisis tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik</p> <p>4.9 Menyaji hasil analisis tentang budaya politik di Indonesia</p> <p>4.10 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>4.10.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</p> <p>4.10.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</p>

KELAS: XII

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap negara 2.5 Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam konteks NKRI.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila 3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman 3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara 3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara 3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional 3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> 3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila 4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman 4.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	<p>berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara</p> <p>4.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>4.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.</p> <p>4.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan bangsa.</p> <p>4.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal</p> <p>4.8.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.</p> <p>4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.</p>

SILABUS MATA SMA/MA

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas : XII (dua belas)

Kompetensi Inti :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p>					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
2.4 Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap negara 2.5 Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam konteks NKRI.					
3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila 4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila	Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia	<p> \int Mengamati Mengamati, Membaca dari berbagai sumber tentang kasus-kasus pelanggaran HAM </p> <p> \int Menanya Menanya tentang contoh- contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi . </p> <p> \int Mengeksperimen/mengeksplorasi Mencari dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dari berbagai media </p> <p> \int Mengasosiasikan Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dari berbagai media </p> <p> Menyaji bahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentative sesuai dengan nilai-nilai pancasila </p> <p> \int Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil pembahasan kasus pelanggaran </p>	<p>1. Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) <p>2. Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia <p>3. Portofolio,</p> <ul style="list-style-type: none"> - penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Kasus-kasus 	5 minggu x JP	Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		HAM dalam bentuk lisan dan tulisan	<p>pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional (format portofolio terlampir)</p> <p>4. Tes</p> <ul style="list-style-type: none"> - digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional 		
<p>3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman</p> <p>4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman</p>	<p>Pasal-pasal yang mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keuangan BPK Kekuasaan kehakiman 	<p>Mengamati</p> <p>Membaca pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman</p> <p>Menanya</p> <p>Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pasal-pasal keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman dari yang factual sampai yang bersifat hipotesis</p> <p>Mengeksperimen/mengeksplorasi</p> <p>Mencari dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman</p>	<p>1. Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) <p>2. Observasi</p> <p>Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945</p>	5 minggu x JP	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>Mengasosiasikan Menyaji pasal-pasal yang berkaitan dengan keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman</p> <p>Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil kajian pasal-pasal yang berkaitan dengan keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman secara lisan dan tertulis</p>	<p>yang mengatur tentang keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman</p> <p>3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman (format portofolio terlampir)</p> <p>4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman</p>		
<p>3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara</p> <p>4.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam</p>	<p>Dinamika Pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara</p>	<p>Mengamati Membaca dari berbagai sumber dinamika pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945</p> <p>Menanya Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan dinamika pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 yang factual</p>	<p>1. Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Dinamika Pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan Negara - Diskusi kelompok membahas 	5 minggu x JP	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
mewujudkan tujuan negara		<p>sampai yang bersifat hipotesis</p> <p>Mengeksperimen/mengeksplorasi Mencari dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang dinamika pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945</p> <p>Mengasosiasikan Mencari hubungan antara pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945</p> <p>Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil kajian dinamika pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 secara tertulis</p>	<p>hasil pengumpulan data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) <p>2. Observasi</p> <p>Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan Dinamika Pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara</p> <p>3. Portofolio,</p> <p>Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Dinamika Pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara (format portofolio terlampir)</p>		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<p>4. Tes</p> <p>Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Dinamika Pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara</p>		
<p>3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara</p> <p>4.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p>	<p>Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia dan beberapa Negara lain</p>	<p>↳Mengamati Membaca dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia dan beberapa Negara lain</p> <p>↳Menanya Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dari factual sampai yang bersifat hipotesis</p> <p>↳Mengeksperimen/mengeksplorasi Mencari dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang dengan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia dan beberapa Negara lain</p> <p>↳Mengasosiasikan</p>	<p>1. Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia dan beberapa Negara lain - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) <p>2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan kasus pelanggaran hak dan</p>	5 minggu x JP	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		Menyimpulkan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Mengkomunikasikan Mempresentasikan hasil kajian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban secara lisan dan tertulis	pengingkaran kewajiban di Indonesia dan beberapa Negara lain 3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia dan beberapa Negara lain (format portofolio terlampir) 4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia dan beberapa Negara lain		
3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional 4.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.	Peran Indonesia dalam hubungan internasional	Mengamati Membaca dari berbagai sumber/media masa, peran Indonesia dalam hubungan internasional Menanya Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan peran Indonesia dalam hubungan internasional secara factual sampai yang bersifat hipotesis	1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Peran Indonesia dalam hubungan internasional - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)	5 minggu x JP	Buku Pelajaran PPKn SMA Buku Penunjang Lainnya Media cetak dan elektronik

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>↳ Mengeksperimen/mengeksplorasi Mencari dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional</p> <p>↳ Mengasosiasikan Mengambil kesimpulan hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional</p> <p>↳ Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil evaluasi dari berbagai media massa peran Indonesia dalam hubungan internasional secara lisan tertulis</p>	<p>2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan Peran Indonesia dalam hubungan internasional</p> <p>3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Peran Indonesia dalam hubungan internasional (format portofolio terlampir)</p> <p>4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Peran Indonesia dalam hubungan internasional</p>		
<p>3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam</p>	<p>Strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam</p>	<p>↳ Mengamati Membaca dari berbagai sumber tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap Negara dalam memperkokoh persatuan</p>	<p>1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap Negara dalam</p>	5 minggu x JP	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan bangsa.</p> <p>4.8.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</p>	<p>memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>Menanya Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap Negara mulai dari factual sampai yang bersifat hipotesis</p> <p>Mengeksperimen/mengeksplorasi Mencari dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap Negara</p> <p>Mengasosiasikan Mencari hubungan antara strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dengan fakta-fakta yang ada dilapangan</p> <p>Mengkomunikasikan Mempresentasikan hasil secara lisan dan tertulis hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap Negara</p>	<p>memperkokoh persatuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) <p>2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap Negara dalam memperkuat persatuan</p> <p>3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap Negara dalam memperkuat persatuan (format portofolio terlampir)</p> <p>4. Tes Digunakan untuk menilai hasil</p>		<p>elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			belajar secara individu tentang strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap Negara dalam memperkuat persatuan		
<p>3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal</p> <p>4.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal</p> <p>4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</p>	<p>) Dinamika penyelenggaraan Negara dalam Konsep NKRI</p> <p>) Dinamika penyelenggaraan Negara dalam konsep Negara federal</p>	<p>)Mengamati Membaca dari berbagai sumber tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal.</p> <p>)Menanya Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal mulai dari factual sampai yang bersifat hipotesis</p> <p>)Mengeksperimen/mengeksplorasi Mencari dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik) tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal</p> <p>)Mengasosiasikan Mencari hubungan antara tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal</p> <p>)Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil analisis dinamika</p>	<p>1. Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal - Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data - Membuat laporan hasil pengumpulan data - Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir) <p>2. Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal</p> <p>3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik</p>	5 minggu x JP	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal secara lisan dan tertulis</p>	<p>individu maupun kelompok tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal (format portofolio terlampir)</p> <p>4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal</p>		

Contoh

PENILAIAN PRESENTASI
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)

Tanggal /bulan/tahun :

Nama/kelompok :

Kelas/Smt :

Mata Pelajaran :

Judul Presentasi :

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN a. Ide pokok laporan b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, tujuan, hasil, dan kesimpulan. c. Penggunaan Bahasa Indonesia.	15%		
2	KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI a. Kelancaran penyampaian gagasan	15%		

	b. Kejelasan metode dan prosedur kerja			
3	KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS	15%		
	a. Bukti empirik atas argumen b. Konsistensi argumentasi			
4	KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN MANFAAT	15%		
	a. Sifat kebaruan hasil karya b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan penugasan dari guru			
5	KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP DALAM MENJAWAB PERTANYAAN	20%		
	a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan konsistensi, berkomunikasi lisan b. Keruntutan dalam penalaran c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan			
6	KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL	15%		
	a. Originalitas atas keaslian karya b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi c. Dampak atau manfaatnya			
7	SIKAP DALAM PRESENTASI	5%		
	a. Kerapihan b. Kesopanan			

Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)

Nilai = bobot x skor

Jakarta, 2013

Guru Mata Pelajaran

.....

Contoh

PENILAIAN PORTOFOLIO

(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)

Tanggal /bulan/tahun :

Nama peserta didik :

Kelas/Smt :

Mata Pelajaran :

Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar :

No	Komponen Portofolio	Bobot	Skor	Nilai
1	KERUNTUTAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO d. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap) e. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun f.	25%		
2	KELENGKAPAN PORTOFOLIO a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar b.	25%		

3	KERAPIAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO c. Rapi dan tidak kotor d.	25%		
4	KEBERMANFAATAN PORTOFOLIO c. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan d.	25%		

Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)

Nilai = bobot x skor

Jakarta, 2013

Guru Mata Pelajaran

.....

KALENDER PENDIDIKAN MAN YOGYAKARTA I TAHUN PELAJARAN 2016/2017

JULI 2016						
AHAD		3	10	17	24	31
SENIN	4	11	18	25		
SELASA	5	12	19	26		
RABU	6	13	20	27		
KAMIS	7	14	21	28		
JUMAT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

AGUSTUS 2016				
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

SEPTEMBER 2016				
	4	11	18	25
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	

OKTOBER 2016					
	2	9	16	23	30
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		
1	8	15	22	29	

NOVEMBER 2016					
AHAD	6	13	20	27	
SENIN	7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	
JUMAT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

DESEMBER 2017				
	4	11	18	25
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31

JANUARI 2017				
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

FEBRUARI 2017				
	5	12	19	26
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	
2	9	16	23	
3	10	17	24	
4	11	18	25	

MARET 2017					
AHAD	5	12	19	26	
SENIN	6	13	20	27	
SELASA	7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUMAT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

APRIL 2017					
	2	9	16	23	30
3	10	17	24		
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		
1	8	15	22	29	

MEI 2017				
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

JUNI 2017				
	4	11	18	25
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	

JULI 2017					
AHAD	2	9	16	23	30
SENIN	3	10	17	24	31
SELASA	4	11	18	25	
RABU	5	12	19	26	
KAMIS	6	13	20	27	
JUMAT	7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29

- PAS/PAT
- Porseni Madrasah
- Pembagian rapor/LHPP
- PTS/UTS
- Libur Semester
- Libur Umum
- Hari-Pertama Masuk (PLS DAN PLM)
- Libur Ramadhan/Idul Fitri
- Libur Khusus (Hari Guru Nasional)
- Ujian Madrasah/
- UAMBN MA
- UN MA/SMA/SMK (Utama)
- UN MA/SMA/SMK (Susulan)
- Hardiknas
- HAB KEMENAG
- PEMILU OSIS
- PPL/Out Door Kelas X DAN XI

Mengetahui
Kepala Madrasah

DRS.H.SUHARTO
NIP. 19650621 199401 1 001

KETERANGAN : KALENDER MAN YOGYAKARTA I TAHUN 2016/2017


NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	1 s.d. 9 Juli 2016	Libur Kenaikan Kelas
2	6 s.d. 7 Juli 2016	Hari Besar Idul Fitri 1437 H
3	11 Juli s.d. 16 Juli 2016	Hari libur Idul Fitri 1437 H
4	18 Juli s.d. 21 Agustus 2016	Hari-hari pertama masuk Madrasah (PLS & PLM)
5	17 Agustus 2016	Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6	12 September 2016	Hari Besar Idul Adha 1437 H
7	19 September 2016	Pemilu OSIS (PEMILOS) MAN 1 Yogyakarta
8	25 September s.d. 1 Oktober 2016	Penilaian Tengah Semester (PTS) Gasal
9	2 Oktober 2016	Tahun Baru Hijiriyah 1438 H
10	7 Oktober 2016	Ulang Tahun Kota Yogyakarta
11	8 s.d. 10 Oktober 2016	PPL/Out Door Regional Kelas X dan XI
12	25 November 2016	Hari Guru Nasional
13	1 s.d. 10 Desember 2016	Penilaian Akhir Semester/PAS
14	12 Desember 2016	Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H
15	13 s.d. 15 Desember 2016	Porsenitas MANSA
16	17 Desember 2016	Penerimaan Laporan Hasil Penilaian Pendidikan (LHPP) Sem. Gasal
17	19 s.d. 31 Desember 2016	Libur Semester Gasal
18	25 Desember 2016	Hari Kelahiran Nabi Isa AS
19	1 Januari 2017	Tahun Masehi 2017
20	03 Januari 2017	HAB KEMENAG
21	1 s.d. 7 Maret 2017	Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap
22	20 s.d. 25 Maret 2017	Ujian Madrasah dan UAMBN
23	27 s.d. 29 Maret 2017	Ujian UAMBN
24	3 s.d. 6 dan 10 s.d. 11 April 2017	Ujian Nasional (Utama) MA/SMA/SMK untuk CBT
25	17 s.d. 20 dan 24 s.d. 25 April 2017	Ujian Nasional (Susulan) MA/SMK/SMK untuk CBT
26	01 Mei 2017	Hari Buruh Nasional
27	02 Mei 2017	Hari Pendidikan Nasional
28	1 s.d. 10 Juni 2017	Penilaian Akhir Tahun (PAT)
29	12 s.d. 15 Juni 2017	Porsenitas MANSA
30	17 Juni 2017	Penerimaan Laporan Hasil Belajar (PLHB) Kenaikan Kelas
31	3 s.d. 15 Juli 2016	Libur Kenaikan kelas
32	19 Juni s.d. 1 Juli 2017	Libur Akhir Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H
33	17 s.d. 20 Juli 2017	Hari Pertama Masuk Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017

YOGYAKARTA, 18 JULI 2016

KEPALA MADRASAH,

DRS.H.SUHARTO

NIP. 19650621 199401 1 001

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6/27. FK/2016
		Tanggal Terbit : Juli 2016
	PROGRAM TAHUNAN	No. Revisi : 00
		Halaman : 1-3

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : MAN 1 YOGYAKARTA

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas / Program : XII/ MIA

Semester : Gasal

Tahun Ajaran : 2016-2017

SEMESTER	No SK	KOMPETENSI DASAR DAN MATERI POKOK	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
GASAL	1	3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila Bab 1 Menganalisis kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila	8 JP	
		3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman Bab 2 Menganalisis Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman	6 JP	
		3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara Bab 3 Dinamika Pengelolaan	6 JP	

		<p>Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia</p> <p>3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara</p> <p>Bab 4 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia</p> <p>Ulangan Harian</p> <p>Ulangan Tengah Semester</p> <p>Ulangan Akhir Semester</p>	<p>4 JP</p> <p>8 JP</p> <p>2 JP</p> <p>2 JP</p>	
		<p>3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional</p> <p>3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal</p>	<p>18 Minggu x 2 Jam Pelajaran</p>	

Yogyakarta, 15 September 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing Lapangan


Mahasiswa PPL UNY

Hartiningsih,M.Pd

NIP.19720115 2005012003

Kery Anita

NIM 13401244006

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6/27.FK/2016
		Tanggal Terbit : Juli 2016
	PROGRAM SEMESTER	No. Revisi : 00
		Halaman : 1-3

PROGRAM SEMESTER


Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Satuan Pendidikan : MAN 1 YOGYAKARTA

Kelas / Program : XII/ MIA

Semester : 1 (GASAL)

Tahun Pelajaran : 2016/2017

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6 /11.KF/ 2014
	Perhitungan MingguEfektif	Tanggal Terbit : 14 Juni 2014
		No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 2

PERHITUNGAN MINGGU / JUMLAH JAM EFEKTIF

Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas : XII
 Semester : Gasal
 TahunAjaran : 2016-2017

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU

1. Mengajar per minggu untuk setiap kelas : 4 jam pembelajaran X 45 Menit

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
Kelas		MIA 3		MIA 1		
Jml JP		2		2		

2. Banyaknya Minggu Dalam Semester Ganjil

NO	BULAN	Jumlah minggu dalam semester	Jumlah minggu tidak efektif	Jumlah minggu efektif	Jumlah jam efektif
1	Juli	5	4	1	4
2	Agustus	5	1	4	16
3	September	4	0	4	16
4	Oktober	5	2	3	12
5	November	4	0	5	20
6	Desember	4	5	0	0
	JUMLAH	27	10	17	68

B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU

NO	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu	Total
3.1	Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila	6	24

3.2	Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman	6	
3.3	Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara	6	
3.4	Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara	6	
3.5	Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional	6	
3.6	Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkuat persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika	8	20
3.7	Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal	6	
	Try Out		4 JP
	Ulangan Harian	7JP X 2	14 JP
	Ulangan Tengah Semester		2 JP
	Remedial		2 JP
	Ulangan Akhir Semester		2 JP
	JUMLAH		68 JP

Yogyakarta, 15 September 2016

Mengetahui

Guru Pembimbing Lapangan


Mahasiswa PPL UNY

Hartiningsih, M.Pd

NIP. 1972012005012003

Kery Anita

NIM 13401244006

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen : Ma.12.1/PP. 00.6/27.FK/2016
		Tanggal Terbit : Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi : 00
		Halaman :

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 1

II. Kompetensi Inti

KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI. 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI. 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI. 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2.1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

4.1. Menyaji pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.1.1 Menunjukkan perilaku orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

1.1.2 Mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa

2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam proses pembelajaran

2.1.2 Menunjukkan perilaku disiplin dalam proses pembelajaran

3.1.1 Menganalisis substansi hak asasi manusia dalam Pancasila

3.1.2 Memahami makna hak asasi manusia dalam nilai ideal, instrumental, dan praksis dalam sila-sila Pancasila

V. Materi Pembelajaran

Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila.

- a. Hak asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila
- b. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila.
- c. Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila

a) Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila

Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indoneisa, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
- c. Sila Persatuan Indonesia mengamankan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga

negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.

- e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

b) Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental dari Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
- c. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

c) Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan Pertama

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
----------	--------------------	---------------

<p>Pendahuluan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan) media, alat dan buku yang diperlukan. 2. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 4. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 	<p>15 menit</p>
<p>Inti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik diminta untuk mengamati dengan membaca wacana Vonis 11 Tahun Bos Kualo Kecewakan Buruh. c) Guru memberikan informasi tambahan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai peristiwa sejenis di lingkungan peserta didik. d) Guru memberikan stimulasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 2) Menanya <ol style="list-style-type: none"> a) Guru memberi kesempatan peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan pertanyaan dan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan tersebut) . b) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang 	<p>60 menit</p>

kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Guru membimbing dan terus mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu yang mendalam tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan mengisi daftar pertanyaan sebagai berikut:

No	Pertanyaan atau Pendapat
1	
2	
3	
Dst	

c) Guru memberi motivasi dan penghargaan bagi kelompok yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

d) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.

3) Mengumpulkan Informasi

a) Peserta didik mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang disusun dengan membaca uraian materi di buku PPKn kelas XII Bab1 Subbab A. Peserta didik juga diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber lain yang relevan seperti internet, web, media sosial lainnya.

b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Tugas Kelompok 1.1 dan Tugas Kelompok 1.2. (Tugas Mandiri 1.1 dan Tugas Mandiri 1.2 dikerjakan sebagai Pekerjaan Rumah/PR)

c) Peran guru pada tahap ini adalah sebagai berikut.

(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.

(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban

	<p>pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.</p> <p>(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>4) Menalar</p> <p>Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh, seperti hubungan hak asasi manusia dengan antarsila dalam Pancasila, menghubungkan hak asasi manusia dalam nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis sila-sila Pancasila.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>a) Peserta didik menyusun laporan hasil telaah hak asasi manusia dalam Pancasila. Laporan disusun secara individu dan menjadi tugas peserta didik dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.</p> <p>b) Peserta didik secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil analisis hak asasi manusia dalam Pancasila secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.</p> <p>c) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p>	
<p>Penutup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. 2. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan pertama. 3. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.1 dan Tugas Mandiri 1.2. 4. Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. 	<p>15 menit</p>

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Alston, Philip. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII
- d) Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika
- e) -----, 1999. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [01 September 2016]
- f) -----, 2000. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [01 September 2016]

X. Penilaian Hasil Belajar

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan observasi, yaitu melihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik, juga aspek kerja sama, pada saat pembelajaran berlangsung.

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan memperhatikan ketepatan peserta didik pada saat menjawab pertanyaan dari guru. Sebagai uji kompetensi, guru juga mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang baru saja dikaji.

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan peserta didik dapat dilihat dari kemampuan menyampaikan pendapat atau jawaban pada saat menyajikan hasil tugas

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

1) Penilaian Sikap

FORMAT PENILAIAN OBSERVASI
SIKAP SPRITUAL DAN SOSIAL PESERTA DIDIK

Petunjuk

Lembaran ini diisi oleh guru pada saat dan setelah pelaksanaan pembelajaran. Pada kolom sikap spiritual dan sosial, tuliskan skor angka 1-4. Kemudian, tuliskan jumlah dan rata-rata skor pada kolom yang tersedia. Konversikan rata-rata skor tersebut tersebut ke dalam nilai kualitatif berikut ini

Interval	Nilai Kualitatif
3,66 – 4,00	SB (Sangat Baik)
2,66 – 3,33	B (Baik)
1,66 – 2,33	C (Cukup)
< 1,33	K (Kurang)

Nama Sekolah : MAN Yogyakarta 1
 Kelas : XII
 Kompetensi Dasar :
 Materi Pokok :
 Periode Penilaian :s.d

No	Nama Siswa	Sikap Spiritual dan Sosial										Total Skor	Rata-Rata	Nilai Kualitatif	Deskripsi
		1. Jujur	2. Disiplin	3. Tangg. jawab	4. Toleran	5. Gtng Royong	6. Kerjasama	7. Santun	8. Damai	9. Responsif	10. Proaktif				
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
dst															

RUBRIK PENSKORAN

1. Aspek : Jujur

No.	Indikator Kejujuran	Penilaian Kejujuran
1.	Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan	Skor 1 jika 1 sampai 2 indikator muncul
2.	Tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas	Skor 2 jika 3 sampai 4 indikator muncul
3.	Mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya	Skor 3 jika 5 indikator muncul
4.	Melaporkan barang yang ditemukan	Skor 4 jika 6 indikator muncul
5.	Melaporkan data atau informasi apa adanya	
6.	Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki	

2. Aspek : Disiplin

No.	Indikator Disiplin	Penilaian Disiplin
1.	sama sekali tidak bersikap disiplin selama proses pembelajaran.	Kurang (1)
2.	menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten	Cukup (2)
3.	menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten	Baik (3)
4.	menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran secara terus menerus dan ajeg/konsisten.	Sangat baik (4)

3. Aspek : Tanggungjawab

No.	Indikator Tanggungjawab	Penilaian Tanggungjawab
1.	Melaksanakan tugas individu dengan baik	Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik
2.	Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan	Skor 2 jika 2 indikator kosisten ditunjukkan peserta didik
3.	Mengembalikan barang yang dipinjam	Skor 3 jika 3 indikator kosisten ditunjukkan peserta didik

4.	Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan	Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
----	--	---

4. Aspek : Toleran

No.	Indikator Toleran	Penilaian Toleran
1.	Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat	Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik
2.	Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender	Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
3.	Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya	Skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
4.	Dapat mememaafkan kesalahan/kekurangan orang lain	Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik

5. Aspek : Gotong Royong

No.	Indikator Gotong Royong	Penilaian Gotong Royong
1.	Saling membantu dalam mengerjakan tugas kelompok	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
2.	Bersama-sama dalam mengerjakan tugas kelompok	Skor 2 jika terpenuhi dua indikator
3.	Mengajak teman untuk membantu teman lain yang mengalami kesulitan	Skor 3 jika terpenuhi tiga indikator
4.	Membagi pekerjaan/tugas berdasarkan <i>job description</i> yang telah disepakati	Skor 4 jika terpenuhi semua indikator

6. Aspek : Kerjasama

No.	Indikator Kerjasama	Penilaian Kerjasama
1.	Terlibat aktif dalam bekerja kelompok	Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik
2.	Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan	Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
3.	Bersedia membantu orang lain dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan	Skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
4.	Rela berkorban untuk teman lain	Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik

7. Aspek : Santun

No.	Indikator Santun	Penilaian Santun
-----	------------------	------------------

1.	Baik budi bahasanya (sopan ucapannya)	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
2.	Menggunakan ungkapan yang tepat	Skor 2 jika terpenuhi dua indikator
3.	Mengekspresikan wajah yang cerah	Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator
4.	Berperilaku sopan	Skor 4 jika terpenuhi semua indikator

8. Aspek : Damai

No.	Indikator Damai	Penilaian Damai
1.	Menghargai teman dalam setiap menjalankan aktivitas	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
2.	Kebersamaan menjadi bahagian dalam pergaulan	Skor 2 jika terpenuhi dua indikator
3.	Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada	Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator
4.	Mengindari konflik atau petentangan dalam pergaulan	Skor 4 jika terpenuhi semua indikator

9. Aspek : Responsif

No.	Indikator Responsif	Penilaian Responsif
1.	Acuh (tidak merespon)	1 (Kurang)
2.	Ragu-ragu/bimbang dalam merespon	2 (Cukup)
3.	Lamban memberikan respon/tanggapan	3 (Baik)
4.	Cepat merespon/menanggapi	4 (Sangat Baik)

10. Aspek : Proaktif

No.	Indikator Proaktif	Penilaian Proaktif
1	berinisiatif dalam bertindak	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
2	mampu menggunakan kesempatan	Skor 2 jikaterpenuhi dua indikator
3	memiliki prinsip dalam bertindak (tidak ikut-ikutan)	Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator
4	bertindak dengan penuh tanggung jawab	Skor 4 jikaterpenuhi semua indikator

11. Aspek : Taat Menjalankan Agama

No.	Indikator Ketaatan Menjalankan Agama	Penilaian Ketaatan Menjalankan Agama
1	Disiplin (selalu tepat waktu) dalam menjalankan agamanya	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
2	Teratur dalam menjalankan agamanya	Skor 2 jikaterpenuhi dua indikator
3	Bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agama	Skor 3 jikaterpenuhi tiga indikator

4	Berakhlak/berperilaku santun dan menghargai orang lain	Skor 4 jikaterpenuhi semua indikator
---	--	--------------------------------------

2) Penilaian Pengetahuan

a) Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.1, Tugas Mandiri 1.2, Tugas Kelompok1.1 dan Tugas Kelompok 1.2

) Penskoran Tugas Mandiri 1.1

Nomor 1 skor 24 Masing-masing kolom yang diisi dengan jawaban benar skor 1. Nomor 2, masing-masing paragraf skornya 4 jumlah skor 16. Jadi jumlah skor total adalah 40.

$$\text{Skor} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{40} \times 4$$

) Penskoran Tugas Mandiri 1. 2

Masing-masing soal jika jawabannya lengkap, skornya 4 sehingga perolehan skor maksimal adalah 24.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{24} \times 4$$

) Penskoran Tugas Kelompok 1.1

Soal nomor 1 masing –masing kolom skornya 2. Soal nomor 2 poin a dan b masing-masing skornya 3 sehingga perolehan skor maksimal nomor 1 dan 2 adalah 10

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{10} \times 4$$

) Penskoran Tugas Kelompok 1.2

Masing-masing soal skornya 3 sehingga perolehan skor maksimal adalah 12

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{12} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi masukan/ saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang


Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Memberi masukan/ saran	Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen : Ma.12.1/PP. 00.6/27.FK/2016
		Tanggal Terbit : Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi : 00
		Halaman :

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 2

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2.1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

4.1. Menyaji pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.1.1 Menunjukkan perilaku orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- 1.1.2 Mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
- 2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam proses pembelajaran
- 2.1.2 Menunjukkan perilaku disiplin dalam proses pembelajaran
- 3.1.1 Memahami kasus macam-macam pelanggaran hak asasi manusia
- 3.1.2 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
- 4.1.1 Menyusun hasil pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila
- 4.1.2 Menyaji hasil pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

V. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu kedua ini adalah Bab 1 Sub-bab B tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dalam sub Bab ini terdiri atas dua materi pembelajaran.

1. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua.

- a. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
 - 1) membunuh anggota kelompok;
 - 2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

a) pembunuhan;

b) pemusnahan;

c) perbudakan;

d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f) penyiksaan;

g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i) penghilangan orang secara paksa; atau

j) kejahatan apartheid

2. Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran HAM

a. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Terdapat peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut.

1) Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946

2) Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947.

3) Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.

4) Peristiwa Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas. Sekitar 173 orang ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan 23 orang.

5) Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas.

6) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan lima orang korban meninggal.

7) Berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antarsuku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, seperti Konflik Poso, Tragedi Mesuji, dan sebagainya.

b. Kasus Pelanggaran Hak Asasi di Dunia Internasional

Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi empat kategori.

1) Kejahatan genosida (The crime of genocide)

Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, dan memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain.

2) Kejahatan melawan kemanusiaan (The Crime againts humanity)

Kejahatan kemanusiaan, yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional dan sebagainya. Contoh kasus kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia ini, diantaranya pembantaian rakyat Uganda dan pembantaian rakyat Kamboja

3) Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain (The crime of aggression)

Invasi atau agresi ialah suatu tindakan bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap nagara atau bangsa lainnya, dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat serta melegalkan tindakan tersebut. Contoh dari tindakan invasi tersebut diantaranya invasi Irak ke Iran dan nvasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak.

4) Kejahatan perang (The War crimes)

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antarbangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. Guru mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan. 2. Guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yaitu hak	15 Menit

	<p>asasi manusia dalam Pancasila dikaitkan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 	
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik membaca wacana yang berjudul TKI Asal Brebes Dianiaya Majikan di Singapura yang terdapat pada Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab B, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. c) Peserta didik menganalisis kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam wacana tersebut. 2) Menanya <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, misalnya sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none">) Apa yang dimaksud dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia ?) Apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat hak asasi manusia ?) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia ?) Nilai-nilai apa yang dilanggar dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia ? b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang 	60 Menit

dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.

3) Mengumpulkan Informasi/ data

- a) Peserta didik mencari informasi lanjutan dengan membaca sumber lain yang relevan baik dari internet, web, maupun media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Peserta didik diharapkan belajar secara aktif untuk menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan nilai-nilai pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta penyelesaian kasus tersebut.
- b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Kelompok 1.3.
- c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut.
 - (1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.
 - (2) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.

4) Menalar

- a) Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai pancasila yang dilanggar dalam kasus -kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
- b) Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai pancasila dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Laporan disusun secara tertulis memuat pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan kelompok.
- c) Laporan disusun secara individu, menjadi tugas peserta didik dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.

5) Mengomunikasikan

- a) Peserta didik secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil telaah kasus-kasus

	<p>pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai Pancasila dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.</p> <p>b) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p> <p>c) Peserta didik mengumpulkan hasil analisis diskusi kelompok secara tertulis untuk diberikan penilaian.</p>	
Penutup	<p>1) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.3 dan Tugas Mandiri 1.4.</p> <p>3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	15 Menit

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Alston,Philip. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : PUSHAM UII
- d) Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika

- e) -----, 1999. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [01 September 2016]
- f) -----, 2000. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [01 September 2016]

X. Penilaian Hasil Belajar

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan observasi, yaitu melihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik, juga aspek kerja sama, pada saat pembelajaran berlangsung.

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan memperhatikan ketepatan peserta didik pada saat menjawab pertanyaan dari guru. Sebagai uji kompetensi, guru juga mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang baru saja dikaji.

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan peserta didik dapat dilihat dari kemampuan menyampaikan pendapat atau jawaban pada saat menyajikan hasil tugas

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah iman taqwa, rasa syukur, jujur dan disiplin. Format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh format dibawah ini.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

2) Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.3, Tugas kelompok 1.3 dan tugas Mandiri 1.4.

) Penskoran Tugas Kelompok 1. 3

Masing-masing soal jika lengkap jawabannya diberi skor 3 sehingga perolehan skor maksimal adalah 9

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{9} \times 4$$

) Penskoran Tugas Mandiri 1.3

Masing-masing soal jika jawaban lengkap diberi skor 2, jika tidak lengkap skornya 1 sehingga perolehan skor maksimal adalah 10.

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{10} \times 4$$

) Penskoran Tugas Mandiri 1.4

Masing-masing soal skornya 1 sehingga perolehan skor maksimal adalah 6

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/ saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Format penilaian dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat dalam bagian lampiran buku guru.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ argumentasi				Memberi masukan/ saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang


Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Memberi masukan/ saran	Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen : Ma.12.1/PP. 00.6/27.FK/2016
		Tanggal Terbit : Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi : 00
		Halaman : 1-13

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 3

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2.1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

4.1. Menyaji pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.1.1 Menunjukkan perilaku orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- 1.1.2 Mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
- 2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam proses pembelajaran
- 2.1.2 Menunjukkan perilaku disiplin dalam proses pembelajaran
- 3.1.1 Memahami tentang peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia
- 3.1.2 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
- 4.1.1 Menyusun hasil pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila
- 4.1.2 Menyaji hasil pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

V. Tujuan Pembelajaran

- 1. Peserta didik mampu memahami tentang peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia
- 2. Peserta didik mampu menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
- 3. Peserta didik mampu menyaji hasil pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis.

VI. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu ketiga ini adalah Bab 1, Sub-bab C terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

1. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.

Sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah

berlakunya undang-undang tersebut kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Adapun, penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

2. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional

Secara garis besar apabila terjadi pelanggaran HAM berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut.

- a. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible (diterima untuk menangani perkarannya pelanggaran HAM) apabila negara yang bersangkutan enggan (unwillingness) atau tidak mampu (unable) untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan.
- b. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut

terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible. Namun dalam hal ini, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible bila putusan berdasarkan keengganan (unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) dari negara untuk melakukan penuntutan.

- c. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas ne bis in idem. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan yang tetap.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, maka berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, diantaranya:

- 1) diberlakukannya travel warning (peringatan bahaya untuk berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya,
- 2) pengalihan investasi atau penanaman modal asing,
- 3) pemutusan hubungan diplomatik,
- 4) pengurangan bantuan ekonomi,
- 5) pengurangan tingkat kerja sama,
- 6) pemboikotan produk ekspor,
- 7) embargo ekonomi.

VII. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan. 2) Guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dikaitkan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan ketiga yaitu tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. 3) Guru mendiskusikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 	15 Menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati 	60 Menit

- a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 8-10 orang.
 - b) Peserta didik membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab C tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.
 - c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.
- 2) Menanya
- a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia misalnya sebagai berikut
 -) Bagaimana upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia ?
 -) Bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional ?
 -) Apakah sanksi yang akan diterima jika suatu negara tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya ?
 - b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.
- 3) Mengumpulkan Informasi
- a) Peserta didik mencari informasi lanjutan, baik melalui Buku Teks PPKn Kelas XII maupun sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Di sini peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi

	<p>manusia di Indonesia, dan sanksi atas pelanggaran HAM internasional.</p> <p>b) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut.</p> <p>(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.</p> <p>(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.</p> <p>(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>4) Menalar</p> <p>Peserta didik menarik kesimpulan tentang proses peradilan HAM di Indonesia dan proses peradilan di dunia internasional.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>a) Setiap kelompok diberikan tugas tentang mensimulasikan proses sidang peradilan HAM di Indonesia dan peradilan internasional.</p> <p>b) Hasil bermain peran peserta didik di pandu ole guru untuk mendapatkan penilaian.</p>	
Penutup	<p>1) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas Mandiri individu tentang membuat makalah atau klipping yang berisi proses peradilan HAM di Indonesia dan peradilan internasional.</p> <p>3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME.</p>	15 Menit

VIII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

IX. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa

- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

X. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Alston,Philip. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : PUSHAM UII
- d) Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika
- e) -----, 1999. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [01 September 2016]
- f) -----, 2000. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [01 September 2016]

XI. Penilaian Hasil Belajar

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan observasi, yaitu melihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik, juga aspek kerja sama, pada saat pembelajaran berlangsung.

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan memperhatikan ketepatan peserta didik pada saat menjawab pertanyaan dari guru. Sebagai uji kompetensi, guru juga mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang baru saja dikaji.

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan peserta didik dapat lihat dari kemampuan menyampaikan pendapat atau jawaban pada saat menyajikan hasil tugas

4) Pembelajaran Remedial

Sekolah : MAN Yogyakarta 1

Mata Pelajaran : Sejarah Peminatan

Ulangan Ke :

Tanggal Ulangan :

Bentuk Soal : Pilihan Ganda + Uraian (Mengerjakan Ulang Ulangan Harian BAB 1)

Materi uLangan : 3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

Rencana Program Remedial :
KKM Mapel : 78

No.	Nama Siswa	Nilai Ulangan	KD/Indikator yang tak dikuasai	No Soal yang dikerjakan dalam Tes Ulang	Hasil
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

5) Pembelajaran Pengayaan

PROGRAM PEMBELAJARAN PENGAYAAN

Sekolah : MAN Yogyakarta 1

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas : XII MIA

Ulangan ke :

Tanggal Ulangan :

Bentuk Soal : Carilah tentang tata cara atau prosedur pengadilan HAM Internasional

Rencana Program Remedial :

KKM Mapel : 78

No.	Nama Siswa	Nilai	Ulangan Bentuk Pengayaan
1			
2			
3			

Mengetahui,

Guru Pembimbing Lapangan

Mahasiswa PPL UNY

Hartiningsih, M.Pd

Kery Anita

NIP. 19720115 2005012003

NIM 13401244006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1) Penilaian Sikap

LEMBAR PENILAIAN SIKAP

“PENILAIAN DIRI”

Nama Siswa :

Kelas/Semester : XII / I

Materi/Bab :

Indikator :

1. Memiliki motivasi selama proses pembelajaran dan menjelang ulangan harian
2. Penguasaan Materi yang akan diujikan
3. bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok
4. menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok
5. menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi
6. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah

Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 6, tulis masing-masing huruf (A/B/C/D) sesuai dengan pendapatmu !, jika :

) A = Selalu

) B = Sering

) C = Jarang

) D = Tidak pernah

1	-----	Saya memiliki motivasi selama proses pembelajaran dan kesiapan menjelang Ulangan Harian
2	-----	Saya menguasai materi /Bab/Sub Bab yang akan diujikan dalam ulangan harian nanti
3	-----	Saya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok
4	-----	Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok
5	-----	Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi
6	-----	Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah

Pedoman Penskoran:

Skor 4, jika A = Selalu

Skor 2, jika C = Jarang

Skor 3, jika B = Sering

Skor 1, jika D = Tidak pernah

$$\text{Skor Perolehan} = \frac{J_u}{z} \text{—Penilaian Pengetahuan}$$

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan tes tertulis/lisan dengan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia misalnya sebagai berikut.

- a. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia ?
- b. Bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional ?
- c. Apakah sanksi yang akan diterima jika suatu negara tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya ?
- d. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ?

Pensekoran :

Masing-masing soal jika dijawab benar diberi skor 1, jika salah diberi 0.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

4

2) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan teknik portofolio untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menulis artikel tentang peradilan HAM di Indonesia dan dunia internasional. Aspek penilaian meliputi kemampuan dalam mempresentasikan hasil tulisan, sistematika, isi gagasan, bahasa, estetika. Format penilaian dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat dalam Lampiran buku guru.

Lembar Penilaian Penyajian dan Laporan Hasil Telaah

Nama/Kelompok :

Kelas :

Materi Pokok :


No	Aspek Penilaian	SKOR			
		1	2	3	4
A	Penyajian				
1	Menanya/ Menjawab				
2	Argumentasi				
3	Bahan tayang/ display				
B	Laporan				
1	Isi laporan				

2	Penggunaan Bahasa				
3	Estetika				
Jumlah Skor					

Pedoman pensekoran (rubrik) :

No.	Aspek	Penskoran
1	Menanya/ Menjawab	Skor 4, apabila selalu menjawab/menanya Skor 3, apabila sering menjawab/menanya Skor 2, apabila kadang-kadang menjawab/menanya Skor 1, apabila tidak pernah menjawab/menanya.
2	Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Bahan tayang/ display	Skor 4, apabila sistematis, kreatif, menarik Skor 3, apabila sistematis, kreatif, tidak menarik Skor 2, apabila sistematis, tidak kreatif, tidak menarik Skor 1, apabila tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik
4	Isi laporan	Skor 4, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematika lengkap Skor 3, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematika tidak lengkap Skor 2, apabila isi laporan benar, tidak rasional, dan sistematika tidak lengkap Skor 1, apabila isi laporan tidak benar, tidak rasional, dan sistematika tidak lengkap
5	Penggunaan bahasa	Skor 4, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami Skor 3, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami Skor 2, apabila menggunakan bahasa sesuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami Skor 1, apabila menggunakan bahasa dan penulisan

		tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami
6	Estetika	Skor 4, apabila kreatif, rapi, dan menarik Skor 3, apabila kreatif, rapi, dan kurang menarik Skor 2, apabila kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik Skor 1, apabila kurang kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen	Ma.12.1/PP.0 : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal Terbit	: Juli 2016
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)		No. Revisi	: 00
		Halaman	:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 1

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman

4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman

4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.2.1. Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia

1.2.2. Menunjukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.2.1. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran

2.2.2. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam proses pembelajaran

3.2.1 Menjelaskan ketentuan konstitusi tentang keuangan negara

3.2.2 Menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945

3.2.3 Menguraikan sumber-sumber keuangan negara

4.2.1. Menyusun hasil telaah identifikasi tugas pejabat negara yang mendapat pelimpahan pengelolaan keuangan negara

V. Materi Pembelajaran

1. Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan APBN merupakan salah satu unsur penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah, pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- b. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.
- d. Peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintah.
- e. Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam undang-undang dasar saja, tetapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah undang-undang dasar. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagainya.

- f. Negara mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kemudian apa saja yang menjadi sumber keuangan negara? Sumber keuangan Negara Republik Indonesia meliputi: pajak, retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, dan dan sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan hadiah dan hibah.

2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga negara, serta Kepala Daerah (gubernur, bupati atau walikota). Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangan negara hanya ditangan Presiden

3. Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia

Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D yang menyatakan Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah.

Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Dengan kata lain, selain berkedudukan sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berkedudukan sebagai lembaga negara. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan kementerian negara karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien.

Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah dan pihak lainnya. Dalam hubungannya dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia disampaikan setiap triwulan (tiga bulan) dan sewaktu-waktu bila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hubungannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia wajib laporan keuangan tahunan kepada BadanPemeriksa Keuangan

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 	15 Menit

	<p>kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</p>	
Inti	<p>1) Mengamati</p> <p>a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.</p> <p>b) Peserta didik mengamati dengan membaca wacana Penyalahgunaan Keuangan Negara Tersistematis, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara.</p> <p>2) Menanya</p> <p>a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin dari wacana tersebut. Guru membimbing dan terus mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mendalam tentang Penyalahgunaan Keuangan Negara Tersistematis dengan mengisi daftar pertanyaan</p> <p>b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (<i>statement</i>) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>a) Peserta didik mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber yaitu dengan membaca Buku yang relevan ataupun sumber lain yang relevan dari internet, web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.</p> <p>b) Peserta didik juga mengerjakan Tugas Mandiri 2.1.</p> <p>c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain. 2. Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab. 3. Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. <p>4) Menalar</p>	60 Menit

	<p>a. Peserta didik menyimpulkan mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>b. Peserta didik menganalisis hubungan antara DPR, Presiden, BPK dan Bank Sentral dalam pengelolaan keuangan negara.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>a) Peserta didik melaporkan kesimpulan pengumpulan data tentang pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b) Peserta didik lainnya diminta untuk menanggapi hasil penyajian yang telah disampaikan.</p> <p>c) Hasil analisis dan kesimpulan dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.</p>	
Penutup	<p>1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Peserta didik diminta mengumpulkan hasil analisis dan diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 2.2.</p> <p>3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	15 Menit

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- c) Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- d) _____. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]
- e) _____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]
- f) _____. 2006. *Undang-Undang RI 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]

X. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi terhadap rasa ingin tahu peserta didik dalam menentukan sumber data yang akan dikumpulkan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pedoman Pengamatan Sikap

- Kelas :
- Hari, Tanggal :
- Pertemuan Ke- :
- Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

2) Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan melalui penugasan yaitu Tugas Mandiri 2.1 dan Tugas Mandiri 2.2

Tugas Mandiri 2.1

Bacalah sumber belajar lain, baik yang berasal dari media cetak maupun online yang berkaitan dengan keuangan negara. Carilah tiga pengertian keuangan negara menurut para pakar. Tuliskan dalam tabel di bawah ini dan presentasikan dihadapan teman-teman yang lain.

No	Nama Pakar	Rumusan Pengertian Keuangan Negara

Berdasarkan pengertian-pengertian keuangan negara tersebut, simpulkanlah persamaan dan perbedaan rumusan pengertian keuangan negara yang diungkapkan para pakar yang kalian temukan. Kemudian, coba kalian rumuskan pengertian keuangan negara berdasarkan pemahaman kalian sendiri.

Tugas Mandiri 2.2

1. Bacalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara. Kemudian identifikasikan tugas pejabat negara yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Presiden dalam mengelola keuangan negara.

No	Pejabat Negara	Tugas dalam Pengelolaan Keuangan Negara
1.	Menteri Keuangan
2.	Pimpinan Lembaga Negara
3.	Kepala Daerah

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas dan jelas menetapkan tugas dan kewenangan setiap pejabat negara dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah kalian tuliskan pada tabel di atas. Akan tetapi, meskipun

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang


Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Memberi masukan/ saran	Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen	Ma.12.1/PP.0 : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal Terbit	: Juli 2016
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)		No. Revisi	: 00
		Halaman	:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 2

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman

4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman

4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.2.1. Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia

1.2.2. Menunjukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.2.1. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam proses pembelajaran

2.2.2. Menunjukkan perilaku kerja sama dalam proses pembelajaran

3.2.1 Menjelaskan peran Bank Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945

3.2.2 Menjelaskan ketentuan UUD Negara RI yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan

4.2.1 Menyajikan bentuk peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD NRI 1945

V. Materi Pembelajaran

Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut UUD Negara RI Tahun 1945

BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK terintegrasi dalam ketentuan tentang keuangan negara yaitu Pasal 23 Ayat (5). Akan tetapi, setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK ini jauh lebih rinci sebagaimana dapat kalian baca di bawah ini.

Dalam Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan diuraikan sebagai berikut.

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajarmengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru memberikan pertanyaan materi pelajaran yang telah pelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi. 3) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan Tugas Mandiri 2.2. 4) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 5) Guru menyampaikan garis besar materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 6) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 	15 Menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Guru dapat memilih salah satu kegiatan mengamati sesuai dengan situasi dan kondisi misalnya sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> (1) Peserta didik mengamati video, film/gambar tentang peran Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab B tentang Peran Badan Pemeriksa Kekuasaan Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan peran Badan Pemeriksa Kekuasaan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan 	60 Menit

peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.

2) Menanya

- a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang peran Badan Pemeriksa Kekuasaan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 misalnya sebagai berikut.
 - Apa peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara?
 - Apa tugas dan wewenang BPK?
 - Apakah syarat-syarat untuk menjadi anggota BPK?
 - Bagaimana proses pemilihan anggota BPK?
- b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.

3) Mengumpulkan Informasi

- a) Peserta didik mencari informasi lanjutan dengan membaca buku PPKn Kelas XII ataupun sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Di sini peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan peran Badan Pemeriksa Kekuasaan menurut UUD Negara RI Tahun 1945.
- b) Peserta didik juga mengerjakan Tugas Kelompok 2.2.

4) Menalar

Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan peran BPK menurut UUD Negara RI tahun 1945.

5) Mengomunikasikan

- a) Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil pengumpulan data tentang peran BPK menurut UUD Negara RI Tahun 1945 yang di dalamnya memuat tugas, wewenang, keanggotaan dan struktur organisasi BPK.

	<p>b) Setiap kelompok diminta untuk menanggapi hasil pengumpulan data dari kelompok lain. Hasil identifikasi dikumpulkan untuk diberikan penilaian.</p>	
Penutup	<p>1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Peserta didik diberi tugas berupa Proyek Kewarganegaraan untuk menulis artikel penelitian dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta didik diminta untuk membuat Buatlah sebuah artikel sebanyak enam sampai delapan paragraf. Artikel ditulis berdasarkan data hasil penelitian sederhana yang dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Pemahaman artikel berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa atau kelurahan tempat kalian tinggal peserta didik dengan memperhatikan hal-hal berikut.</p> <p>a) Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut, misalnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut.</p> <p>(1) Bentuk iuran warga</p> <p>(2) Peruntukkan atau penggunaan dana yang terkumpul dari iuran warga</p> <p>(3) Laporan penggunaan dana oleh pengelola keuangan</p> <p>(4) Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan</p> <p>(5) Hal lain yang dapat dikembangkan sendiri oleh peserta didik.</p> <p>b) Menentukan narasumber yang akan diwawancarai (misalnya warga, Ketua RT, Ketua RW, Lurah atau yang lainnya).</p> <p>c) Mencatat semua data yang diperoleh dengan baik dan benar.</p> <p>d) Membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel yang diberi judul semenarik mungkin.</p> <p>e) Apabila sudah selesai segera kumpulkan kepada guru untuk dipresentasikan di hadapan peserta didik yang lain. Peserta didik diminta menginformasikan nilai yang diperoleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawab peserta didik.</p> <p>3) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi</p>	15 Menit

	berikutnya yaitu Subbab C tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.	
--	--	--

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- d) Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- e) _____. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]
- f) _____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]
- g) _____. 2006. *Undang-Undang RI 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]

X. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas

dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan peran BPK menurut UUD Negara RI tahun 1945 dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

20

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan yaitu mengerjakan Tugas Kelompok 2.2.

Tugas Kelompok 2.1

Bacalah berita di bawah ini.

BPK RI Dukung Tugas Penegak Hukum Selesaikan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan dukungannya terhadap

tugas-tugas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka percepatan penanganan penyelesaian tindak pidana korupsi. Rakor tersebut merupakan implementasi dari komitmen BPK dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan Rizal Djalil (Ketua BPK RI periode 28 April 2014–15 Oktober 2014)) dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 26 September 2014. Ketua BPK RI didampingi Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, Inspektur Utama Mahendro Sumardjo, Plt. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Akhsanul Khaq. Dukungan BPK RI terhadap penegak hukum merupakan amanat dari Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, disebutkan Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Jadi kegiatan rakor yang kami lakukan ini merupakan implementasi, pelaksanaan atau operasional dari Undang-Undang tersebut,” tegas

Ketua BPK RI.

Terkait dengan upaya percepatan penyelesaian tindak pidana keuangan negara, Ketua BPK RI menyampaikan saat ini Pimpinan BPK RI telah mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan permintaan dari APH.

Berbeda dengan sebelumnya, yaitu semua permintaan APH harus ke kantor Pusat. “Tentunya kami memerlukan waktu untuk berkonsolidasi dan menyiapkan SOP, dan SOP tersebut sudah selesai. Selama dua hari ini kami berkumpul, mendiskusikan sekaligus mensosialisasikan SOP tersebut. Hal ini menunjukkan realisasi dari komitmen BPK RI yang akan tetap mendukung penegak hukum, dalam menanganai kasus tindak pidana korupsi,” ungkap Rizal Djalil. Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK RI juga menyampaikan, sampai dengan akhir Juni 2014, BPK RI telah berhasil mengembalikan uang negara yang diselewengkan sebesar Rp.43,4 triliun. Kemudian BPK RI telah menyerahkan temuan-temuan yang berindikasi kerugian Negara kepada KPK sebanyak 175 temuan, Kejaksaan Agung berjumlah 205 temuan, serta Kepolisian RI sebanyak 61 temuan yang terkait penyimpangan keuangan yang berindikasi kerugian Negara.

Sumber: <http://www.bpk.go.id/news/>

Setelah membaca berita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BPK RI dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara?
2. Berdasarkan temuan-temuan BPK RI ternyata potensi kerugian negara masih cukup tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, coba identifikasikan penyebab terjadinya hal tersebut.
3. Apa yang akan terjadi apabila negara terus mengalami kerugian?
4. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara?
5. Apa saja bentuk dukungan yang dapat kamu berikan untuk menunjang kinerja BPK RI?

Pensekoran :

Masing-masing soal skornya 2 sehingga jumlah skor maksimal 10

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{10}} \times 4$$

10

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil identifikasi peran BPK menurut UUD Negara RI Tahun 1945, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan). Penilaian dapat menggunakan contoh format yang terdapat dalam bagian Lampiran Buku Guru.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ argumentasi				Memberi masukan/ saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Skor Perolehan


$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{12}} \times 4$$

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas.

		<p>Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas</p> <p>Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas</p> <p>Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas</p>
3	Memberi masukan/ saran	<p>Skor 4, apabila selalu memberi masukan</p> <p>Skor 3, apabila sering memberi masukan</p> <p>Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan</p> <p>Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan</p>

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. : Ma.12.1/PP.0 Dokumen : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal : Juli 2016 Terbit :
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)		No. Revisi : 00
		Halaman :

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
 Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Alokasi Waktu : 2x45menit
 Pertemuan : 3

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

- 1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman
- 4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman
- 4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.2.1. Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia
- 1.2.2. Menunjukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2.2.1. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran
- 2.2.2. Menunjukkan perilaku kerja sama dalam proses pembelajaran
- 3.2.1. Menjelaskan karakteristik kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945
- 3.2.2. Mengidentifikasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945
- 4.2.1. Menyusun hasil identifikasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman.
- 4.2.2. Menyaji hasil identifikasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman.
- 4.8.2.1 Menyaji praktik kewarganegaraan sebagai bentuk pengamalan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman

V. Materi Pembelajaran

- 3. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945
 - a. Ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman
- 1) Ketentuan Konstitusional tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam praktiknya, kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hal ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Berikut ini disajikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tentang Kekuasaan Kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945 diatur dalam Bab IX dengan uraian sebagai berikut.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

- b. Peran lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja lembaga-lembaga peradilan. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan.

1) Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Pada saat ini, pengadilan tinggi juga berwenang untuk menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal). Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Selain dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut.

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

2) Lingkungan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut.

(1) Anggota TNI

2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI

3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang

4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam huruf 1, 2 dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer.

5) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kasus-kasus berikut.

(1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Memutus pembubaran partai politik.

(4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya.

2) telah melakukan perbuatan tercela maupun

3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karakteristik kekuasaan kehakiman di Indonesia setelah perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan terbebas dari segala campur tangan dalam penyelenggaraan proses peradilan.
2. Pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (berserta badan peradilan yang ada di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman merupakan lembaga penegak hukum yang keberadaannya diatur oleh undang-undang, yaitu kejaksaan, kepolisian, advokat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang terbentuk setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
6. Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan.2) Guru memberikan pertanyaan materi pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi. Dalam hal ini peserta didik diminta untuk menjelaskan makna kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.	15 Menit
Inti	<ol style="list-style-type: none">1) Mengamati<ol style="list-style-type: none">a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.b) Peserta didik diminta untuk mengamati gambar 2.5 atau membaca Buku Teks pelajaran PPKn Kelas XII Bab 2, Sub-bab C tentang Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait gambar/wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945.c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik	60 Menit

	<p>pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.</p> <p>2) Menanya</p> <p>a) Peserta didik diminta untuk membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945, misalnya sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa fungsi lembaga kehakiman? • Untuk apa lembaga kehakiman itu di bentuk? • Mengapa dalam suatu negara harus ada lembaga kehakiman? <p>b) Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>a) Peserta didik mencari informasi lanjutan baik dengan membaca Buku Teks PPKn Kelas XII atau pun sumber lain yang relevan dari internet, web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dengan melakukan pemeriksaan, mengolah, menafsir berbagai informasi yang terkumpul.</p> <p>b) Peserta didik juga diminta belajar secara aktif untuk mengidentifikasi kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945 melalui Tugas Mandiri 2.4.</p> <p>c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut.</p> <p>4) Menalar</p> <p>a) Peserta didik pada tahap ini diminta untuk menghubungkan informasi yang diperoleh dan merumuskan prinsip-prinsip sebagai dasar untuk membuat kesimpulan tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945.</p>	
--	--	--

	<p>b) Peserta didik menentukan hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945.</p> <p>c) Peserta didik menyimpulkan isi pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.</p> <p>(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.</p> <p>(2) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>a) Peserta didik secara berkelompok diminta untuk menyusun dan menyajikan hasil pengumpulan data tentang identifikasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>b) Setiap kelompok diminta untuk menanggapi hasil pengumpulan data kelompok lain.</p> <p>c) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p> <p>d) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil analisis diskusi kelompok secara tertulis untuk diberikan penilaian.</p>	
<p>Penutup</p>	<p>1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas Proyek Kewarganegaraan “Mari Menulis Artikel Penelitian“ yang harus dikumpulkan pada pertemuan keempat.</p> <p>3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan</p>	<p>15 Menit</p>

	mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.	
--	---	--

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- d) Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- e) _____. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]
- f) _____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]
- g) _____. 2006. *Undang-Undang RI 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]

x. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat mengumpulkan informasi dan berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, berargumentasi atau menjawab pertanyaan. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, tanggung jawab, percaya diri dan kerja sama.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :
Hari, Tanggal :
Pertemuan Ke- :
Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

20

2) Penilaian Pengetahuan

Tugas Mandiri 2.4

Carilah 5 (lima) kliping mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh lembaga-lembaga peradilan nasional (misalnya dalam hal penanganan kasus peradilan). Pilihlah satu kliping yang kalian anggap menarik untuk dianalisis. Analisis kalian lebih dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi dari lembaga peradilan tersebut

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengerjakan dan mengumpulkan Tugas Mandiri 2.4

J) Pensekoran Tugas Mandiri 2.4

Masing-masing soal (sebuah kliping dan analisisnya) jika jawaban lengkap diberi skor 2, sehingga perolehan skor maksimal adalah 4.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

4

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian Keterampilan menggunakan Unjuk kerja/kinerja/Praktik dengan cara mengamati kegiatan peserta didik pada saat mempresentasikan hasil telaah tentang kekuasaan kehakimaan menurut UUD Negara RI tahun 1945 dan hasil Tugas Mandiri 2.4. Aspek yang dinilai adalah kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan). Penilaian menggunakan contoh format yang terdapat pada Lampiran Buku Guru.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/argumentasi				Memberi masukan/saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Memberi masukan/saran	Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan

		Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan
--	--	--

4) Pembelajaran Remedial

Sekolah : MAN Yogyakarta 1
 Mata Pelajaran : PPKn
 Ulangan Ke :
 Tanggal Ulangan :
 Bentuk Soal : Pilihan Ganda + Uraian (Mengerjakan Ulang Ulangan Harian BAB 2)
 Materi Ulangan : 3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman
 Rencana Program Remedial :
 KKM Mapel : 78

No.	Nama Siswa	Nilai Ulangan	KD/Indikator yang tak dikuasai	No Soal yang dikerjakan dalam Tes Ulang	Hasil
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

5) Pembelajaran Pengayaan

PROGRAM PEMBELAJARAN PENGAYAAN

Sekolah : MAN Yogyakarta 1
 Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas : XII MIA

Ulangan ke :
Tanggal Ulangan :
Bentuk Soal :
Rencana Program Remedial :
KKM Mapel : 78

No.	Nama Siswa	Nilai	Ulangan Bentuk Pengayaan
1			
2			
3			

Mengetahui,

Guru Pembimbing Lapangan


Mahasiswa PPL UNY

Hartiningsih, M.Pd

Kery Anita

NIP. 19720115 2005012003

NIM 13401244006

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. : Ma.12.1/PP.0 Dokumen : 0.6/27.FK/20 Tanggal Terbit : Juli 2016
		No. Revisi : 00 Halaman :
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)		

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
 Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Alokasi Waktu : 2x45menit
 Pertemuan : 1

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

- 1.4. Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan
- 2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 3.3. Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

4.3. Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.4.1. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha

1.4.2. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat.

2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran.

2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran.

3.3.1 Menganalisis tujuan Negara Republik Indonesia

3.3.2 Menelaah struktur kekuasaan pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.3.1 Menyusun hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan Negara di tingkat pusat dan daerah berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945

V. Materi Pembelajaran

1. Teori Tujuan Negara

Tujuan negara sangat berhubungan dengan organisasi negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.

Berikut ini dipaparkan teori mengenai tujuan negara yang dikemukakan para ahli.

a. Teori Plato

Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

b. Teori Negara Kekuasaan

Ada dua tokoh yang menganut teori ini, yaitu Shang Yang dan Nicholo Machiavelli. Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan, sehingga negara akan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Shang Yang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan rakyat.

c. Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan)

Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filsuf yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus.

d. Teori Negara Polisi

Menurut teori ini, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant.

e. Teori Negara Hukum

Dalam pandangan teori ini negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Teori ini digulirkan oleh Krabbe.

f. Teori Negara Kesejahteraan

Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Pencetus teori ini adalah Mr. R. Kranenburg.

2. Rumusan Tujuan Negara Republik Indonesia

Sebagai bangsa dan negara yang beradab, Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya. Tujuan negara kita akan menjadi ciri khas dari negara kita yang membedakannya dari negara lain. Untuk mengetahui tujuan negara kita, kalian dapat menelaah Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Di dalam pembukaan tersebut terdapat pernyataan sebagai berikut.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....

Pernyataan di atas merupakan penegasan mengenai tujuan negara kita sekaligus tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yang terdiri dari:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Jika diperhatikan keempat tujuan negara kita, kemudian kita kaitkan dengan teori mengenai tujuan negara, maka kita termasuk negara yang menganut teori negara kesejahteraan (welfare state). Hal ini dikarenakan keempat tujuan di atas semuanya menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu juga, dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I, Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, dengan demikian Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi, misalnya demikian. <ul style="list-style-type: none">) Apa saja yang diatur dalam UUD Negara RI tahun 1945?) Jelaskan sistematika UUD Negara RI Tahun 1945?) Apa makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan 	15 Menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Pada kegiatan ini jika memungkinkan peserta didik mengamati video terkait dengan tujuan Negara Republik Indonesia atau dapat juga menelaah gambar dan membaca materi yang terdapat dalam buku siswa pada Bab 3 Subbab A. 2) Menanya <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik dibimbing dan didorong untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan 	60 Menit

	<p>secara mendalam terkait dengan apa yang telah diamati.</p> <p>b) Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreatifitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Untuk menumbuhkan motivasi dan kebiasaan bertanya peserta didik dapat diminta untuk menuliskan pertanyaan</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>a) Peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi/ data sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca berbagai sumber buku yang relevan, mencari di internet, web, dan media sosial lainnya.</p> <p>b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada Tugas Mandiri 3.1 mengenai persamaan dan perbedaan teori tujuan negara yang dikemukakan para ahli, dan tugas Mandiri 3.2.</p> <p>c) Peran guru pada tahap ini adalah sebagai berikut.</p> <p>(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.</p> <p>(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.</p> <p>(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>4) Menalar</p> <p>Peserta didik menarik kesimpulan dari informasi yang dibaca dari buku dan informasi yang diperoleh dari sumber lain terkait dengan tujuan negara RI dan ketercapaian tujuan Negara Republik Indonesia.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>Setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil analisis tentang persamaan dan perbedaan teori tujuan negara yang dikemukakan para ahli dan ketercapaian tujuan negara Republik Indonesia. Kelompok lainnya diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Hasil analisis kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian</p>	
Penutup	<p>Penutupan</p> <p>1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah</p>	15 Menit

	<p>dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi berikutnya.</p> <p>3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	
--	--	--

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- d) Marbun. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- e) Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- f) Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [Online]*. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html 06 September 2016

X. Penilaian

- 1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas

dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan tujuan Negara RI dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi atau menjawab pertanyaan. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

20

2) Penilaian Pengetahuan

Tujuan Negara

Cara untuk Mewujudkannya

1.Melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia

.....

2. Memajukan kesejahteraan umum

.....
.....
.....

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

.....
.....
.....

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan

Berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

.....
.....
.....

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tes tertulis yaitu mengumpulkan Tugas Mandiri 3.1 dan Tugas mandiri 3.2.

) Penekoran Tugas Mandiri 3.1

Masing-masing soal jika jawaban lengkap diberi skor 2 sehingga perolehan skor maksimal adalah 4.

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{4} \times 4$$

) Penekoran Tugas Mandiri 3. 2

Masing-masing soal jika jawaban lengkap skornya 3 sehingga perolehan skor maksimal adalah 12

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{12} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam berdebat, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan

argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ argumentasi				Memberi masukan/ saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang


Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Memberi masukan/ saran	Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen	Ma.12.1/PP.0 : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal Terbit	: Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi	: 00
		Halaman	:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 2

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.4. Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan
2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3.3. Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

4.3. Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.4.1. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat.

1.4.2. Memelihara hubungan baik dengan sesama umat beragama yang berbeda-beda.

2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran.

2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran.

3.3.1 Menganalisis tugas dan wewenang pemerintah pusat

3.3.2 Menganalisis perbedaan suprastruktur politik dengan infra struktur politik

3.3.3 Menjelaskan peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan Negara

4.3.1 Menyusun hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan Negara di tingkat pusat dan daerah berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945

V. Materi Pembelajaran

1. Lembaga-lembaga Pemegang Kekuasaan Negara

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia dapat kalian lihat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan.

a. Kekuasaan membentuk undang-undang

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Kekuasaan tersebut secara teoretis dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden, DPR hanya memberikan persetujuan saja. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) ditegaskan Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR mempunyai kekuasaan yang kecil dalam proses pembentukan undang-undang. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Perubahan ketentuan ini menyebabkan DPR

mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan suatu undang-undang, bahkan apabila sebuah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tidak disahkan oleh Presiden, maka undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku dan wajib diundangkan. Selain dalam pembentukan undang-undang, pada saat ini DPR begitu besar kekuasaannya dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kekuasaan tersebut terlihat dari dimilikinya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan ketiga hak tersebut, DPR menjadi lembaga penyeimbang sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikendalikan dan dipastikan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Kekuasaan pemerintahan negara

Kekuasaan pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan, Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memosisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar. Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia selalui memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR dan MA belum terbentuk. Kekuasaan Presiden masih tetap besar, meskipun lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbentuk. Dalam diri Presiden melekat berbagai kekuasaan, yaitu berikut.

- 1) Kekuasaan pemerintahan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1)
- 2) Kekuasaan membentuk undang-undang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1)
- 3) Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri atas angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut terdapat dalam Pasal 10

Selain itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan keanggoatan MPR dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Utusan Golongan dan Utusan Daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan presiden. Presiden juga berhak memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seorang terpidana.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR. Dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undangan, memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.

Selain dalam proses pembentukan undang-undang, pada saat ini juga Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur

TNI. Presiden juga mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi, serta Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi.

c. Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (2) menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyebabkan perubahan fundamental dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satusatunya pemegang kekuasaan tersebut. Ada Mahkamah Konstitusi sebagai mitra dalam menyelegarakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut memberikan alternatif bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.

2. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 dapat disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Negara Indonesia hendaknya melindungi seluruh wilayah Indonesia dan juga melindungi seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia, artinya negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia, artinya negara menjamin keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Hal tersebut berlaku bagi warga negara indonesia yang berada di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, misalnya para tenaga kerja Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, para duta besar dan konsul di negara asing, atau para wisatawan Indonesia di luar negeri.

2) Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Negara Indonesia hendaknya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya baik lahir maupun batin. Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, tidak hanya rakyat yang mampu akan tetapi juga yang tidak mampu. Bagi warga negara yang fakir dan miskin negara hendaknya memberikan bantuan kesejahteraan. Fungsi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 33 dan 34 sebagai berikut.

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan .
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3) Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia

Negara Indonesia hendaknya berupaya mencerdaskan warga negaranya. Untuk itu negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan dasar. Fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara tegas diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

4) Aktif melaksanakan ketertiban dunia

Negara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, sejahtera. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN,AFTA, dan sebagainya. Disamping itu, Indonesia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan yang dilakukan biasanya disebut hubungan diplomatik. Hubungan antarnegara tersebut dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
----------	--------------------	---------------

Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi tentang pengelolaan kekuasaan negara pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kegiatan yang akan dilakukan. 4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan 	15 Menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 3, Subbab B tentang pengelolaan negara kekuasaan pusat menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintah negara di pusat menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2) Menanya <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang pengelolaan kekuasaan negara di pusat menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian pilih salah satunya untuk dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. b) Peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 3) Mengumpulkan Informasi <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik mencari informasi lanjutan, baik melalui buku teks PPKn Kelas XII maupun sumber lain yang relevan dari interne, web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya. 	60 Menit

	<p>b) Peserta didik juga mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam Tugas Kelompok 3.1.</p> <p>c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut.</p> <p>(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.</p> <p>(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.</p> <p>(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>4) Menalar</p> <p>Peserta didik menarik kesimpulan peran lembaga negara (suprastruktur politik) dan lembaga infrastruktur politik dalam mewujudkan tujuan negara.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>a) Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil identifikasi tentang tugas dan kewenangan lembaga negara dan infrastruktur politik.</p> <p>b) Peserta didik dari kelompok lainnya diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Hasil analisis kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian.</p>	
Penutup	<p>1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Guru menanamkan kesadaran berkonstitusi.</p> <p>3) Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Kelompok 3.2 dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.</p> <p>4) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi berikutnya yaitu subbab 3</p> <p>5) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	15 Menit

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor

- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- d) Marbun. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- e) Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- f) Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [Online]*. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html 06 September 2016

x. Penilaian

- 1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan tujuan Negara RI dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi atau menjawab pertanyaan. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

20

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk Tugas Kelompok 3.1 yaitu Mengidentifikasi tugas dan kewenangan lembaga negara dan mengidentifikasi peran infrastruktur politik dalam mewujudkan tujuan Negara dan Tugas Kelompok 3.2.

• Pensekoran Tugas Kelompok 3.1

Untuk soal nomor 1 ada 7 lembaga Negara yang harus di jelaskan kewenangannya yaitu Presiden MPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia. Jika Masingmasing lembaga itu dijelaskan kewenangannya secara lengkap maka skornya 2 sehingga skor maksimalnya adalah 14. Untuk soal nomor 2 ada 4 lembaga yang harus dijelaskan, masing-masing skornya 2 sehingga jumlah skor maksimal 8.

Total skor nomor 1 dan 2 berjumlah 22.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

22

• Pensekoran Tugas Kelompok 3. 2

Masing-masing soal skornya 2 sehingga perolehan skor maksimal adalah 8

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

8

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam menyajikan hasil analisis, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan). Penilaian dapat menggunakan format di bawah ini

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ argumentasi				Memberi masukan/ saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang


Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Memberi masukan/ saran	Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen	Ma.12.1/PP.0 : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal Terbit	: Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi	: 00
		Halaman	:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 3

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.4. Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan
2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3.3. Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

4.3. Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.4.1. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha
- 1.4.2. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat.
- 2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran.
- 2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran.
- 3.3.1. Menelaah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3.3.2. Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan Negara
- 3.3.3 Menganalisis pola hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten
- 4.3.1 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan pemerintahan tingkat pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

V. Materi Pembelajaran

1. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Keberadaan pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wilayah negara kita dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah-wilayah administrasi tersebut mempunyai suatu pemerintahan daerah yang berperan sebagai pengelola kekuasaan negara di daerah. Apa sebenarnya pemerintahan daerah itu? Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian ujung tombak pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dan DPRD.

Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekuasaan negara di daerah oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat, pengelolaan kekuasaan negara di daerah pun begitu dinamis, baik ditinjau dari landasan hukumnya, susunan pemerintahan daerah, maupun kewenangan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, berikut ini dipaparkan secara singkat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

a. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah daerah telah mengalami banyak perubahan. Hal tersebut menunjukkan problematika pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia begitu fluktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik yang terjadi. Selain konstitusi RIS, semua perubahan konstitusi yang terjadi di Republik Indonesia menuntut untuk dilahirkannya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah seperti berikut ini.

- 1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah
- 2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturanaturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
- 3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- 4) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- 7) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- 8) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 10) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

b. Susunan pemerintahan daerah

Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. c. Kewenangan pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintahan daerah pun mempunyai kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Seiring dengan dinamisnya berbagai ketentuan mengenai pemerintahan daerah, maka kewenangan pemerintah daerah pun dalam menyelenggarakan kekuasaan negara di daerah juga begitu dinamis. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang, kewenangan pemerintah daerah terus mengalami perubahan seperti yang dapat kalian cermati dalam tabel di bawah ini.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai citacita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian cita dan tujuan negara. Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai tujuan nasional,

berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
 - e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
 - f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
 - h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
 - i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
 - j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
 - k. melestarikan lingkungan hidup;
 - l. mengelola administrasi kependudukan;
 - m. melestarikan nilai sosial budaya;
 - n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
- kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, selain mempunyai kewajiban, pemerintahan daerah juga mempunyai hak selaku pengelola daerah otonom, di antaranya adalah:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Di dalam rencana kerja inilah dapat dilihat berbagai macam program atau kegiatan untuk mencapai tujuan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan	15 Menit

	<p>menyenangkan untuk proses belajar-mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan.</p> <p>2) Guru meminta peserta didik dari perwakilan kelompok untuk membacakan hasil tugas Kelompok 3.2 yang telah diberikan pada pertemuan kedua, kemudian peserta didik dari kelompok lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawaban dari kelompok penyaji. Setelah itu hasil analisis kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian.</p> <p>3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi tentang Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</p>	
Inti	<p>1) Mengamati</p> <p>a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.</p> <p>b) Peserta didik mengamati dengan membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 3, Sub-bab C atau jika memungkinkan diminta untuk mengamati tayangan video/gambar/film tentang kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Guru dapat menambahkan penjelasan terkait wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>c) Guru dapat memberikan stimuli dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.</p> <p>2) Menanya</p> <p>Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang</p>	60 Menit

mekanisme penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.

3) Mengumpulkan Informasi/ data

a) Peserta didik secara kelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca uraian materi Bab 3 Sub-bab C, mengenai kekuasaan pemerintah daerah menurut UUD Negara RI Tahun 1945.

b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam Tugas Mandiri 3.3. Di sini peserta didik belajar secara aktif untuk menganalisis mekanisme Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara.

c) Merencanakan Proyek Kewarganegaraan dengan tema "Mari Mengamati Lingkungan" dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Persiapan

1. Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang
2. Menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yakni berkaitan dengan program kerja pemerintahan desa/kelurahan.
3. Menentukan lokasi dan subjek penelitian (responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara).
4. Menyusun pedoman pengamatan atau wawancara.

B. Pelaksanaan

1. Mengamati kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian.
2. Melakukan identifikasi program kerja yang belum dilaksanakan.
3. Melakukan identifikasi program kerja yang sudah dilakukan.
4. Melakukan identifikasi terhadap tingkat kepuasan warga atas pelaksanaan program kerja pemerintah

	<p>desa/kelurahan setempat.</p> <p>5. Mencatat setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peserta didik.</p> <p>C. Pelaporan</p> <p>Menguraikan hasil pengamatan peserta didik ke dalam format berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian singkat tentang program kerja desa/kelurahan(yang diamati) 2. Program kerja yang sudah dilaksanakan 3. Program kerja yang belum dilaksanakan 4. Saran-saran untuk pemerintah desa/kelurahan <p>d) Hasil pengamatan dikumpulkan pada pertemuan keempat sebagai hasil portofolio kelompok.</p> <p>4) Menalar</p> <p>Peserta didik secara kelompok dibimbing untuk menghubungkan informasi yang diperoleh sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap kelompok dengan bimbingan guru diminta untuk menyajikan hasil pengumpulan data/informasi tentang kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Hasil analisis kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian. b) Menyaji laporan ilmiah tentang program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan menganalisis persamaan dan perbedaan program pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 3.4 dan Proyek Kewarganegaraan sebagaimana telah direncanakan di atas untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME 	15 Menit

	bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.	
--	--	--

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- d) Marbun. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- e) Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- f) Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [Online]*. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html 06 September 2016

x. Penilaian

- 1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat. Aspek penilaian meliputi iman dan taqwa, rasa syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

20

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis dalam bentuk Tugas Mandiri 3.3 dan Tugas Mandiri 3.4

) Penskoran Tugas Mandiri 3.3

Masing-masing soal jika jawaban lengkap skor 4, sehingga perolehan skor maksimal adalah 12.

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{12} \times 4$$

12

) Penskoran Tugas Mandiri 3.4

Masing-masing soal jika lengkap skor 4 sehingga perolehan skor maksimal adalah 20


Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

20

3) Penilaian Keterampilan

- a) Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam proses belajar-mengajar, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).
- b) Portofolio laporan Proyek Kewarganegaraan dengan Tema “Mari Mengamati Lingkungan” mengenai program pemerintahan di desa/kelurahan.

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. : Ma.12.1/PP.0 Dokumen : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal : Juli 2016 Terbit
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi : 00
		Halaman :

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
 Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Alokasi Waktu : 2x45menit
 Pertemuan : 4

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.4. Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan
 2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 3.3. Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

4.3. Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.4.1. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha

1.4.2. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat.

2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran.

2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran.

3.3.1. Menganalisis pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten

3.3.2 Menyimpulkan mekanisme pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah

4.3.1 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan pemerintahan tingkat pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

V. Materi Pembelajaran

Pembagian Urusan Pemerintahan

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, akan melahirkan suatu perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang-bidang berikut.

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/ kota seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru meminta peserta didik mengumpulkan tugas pada pertemuan sebelumnya yaitu Proyek Kewarganegaraan. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 	15 Menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik diminta untuk mengamati video/gambar/membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 3, Sub-bab D tentang pembagian urusan pemerintahan, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut berbagai fakta baru yang berhubungan dengan pembagian urusan pemerintahan. c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 2) Menanya Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang pembagian urusan pemerintahan. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mendalam 3) Mengumpulkan Informasi <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik secara kelompok dengan bimbingan guru diminta untuk mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang disusun dan 	60 Menit

	<p>mengerjakan Tugas Kelompok 3.3 dengan membaca uraian materi Bab 3 Sub-bab D, atau membaca sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya.</p> <p>b) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut.</p> <p>(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.</p> <p>(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.</p> <p>(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>4) Menalar</p> <p>Peserta didik secara kelompok dengan bimbingan guru diminta menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang pembagian urusan Pemerintahan</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi tentang pembagian urusan pemerintahan dan hasil Tugas Kelompok 3.3. di depan kelas. Hasil analisis kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian.</p>	
<p>Penutup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini. 2) Guru bersama peserta didik melakukan refleksi. 3) Peserta didik mengerjakan penilaian diri dan uji kompetensi Bab 3. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. 	<p>15 Menit</p>

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor

- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- d) Marbun. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- e) Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- f) Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html 06 September 2016

X. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan melalui penilaian diri sebagaimana terdapat pada buku siswa. Penyelenggaraan pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Peserta didik sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan peserta didik (selalu/SI, sering/Sr, kadang-kadang/Kd, tidak pernah/ TP), alasan dan akibat dari perilaku itu. Ingat peserta didik harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2) Penilaian Pengetahuan

a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, peserta didik diminta melakukan penilaian diri atas pemahaman peserta didik terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist () pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

- b) Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis dengan mengerjakan Uji Kompetensi Bab 3.

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Dari berbagai macam teori tujuan negara yang sudah kalian pelajari, teori dari siapa yang paling relevan dengan kondisi Negara Republik Indonesia? Berikan alasannya.
2. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia.
3. Jelaskan dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara di tingkat pusat !
4. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia.
5. Jelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia.

Kunci Jawaban

1. Teori yang paling relevan dengan kondisi negara kita adalah teori welfare state/negara kesejahteraan. Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari cita-cita dan tujuan negara yang termaktub dalam alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain teori welfare state, teori lain yang sesuai adalah teori negara hukum. Dalam pandangan teori ini negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum. (Skor 6)
2. Jawaban akan beragam, paling tidak jawaban siswa akan mencakup contoh-contoh berikut.
 - a. belajar yang giat
 - b. patuh pada aturan yang berlaku
 - c. aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler (skor 3)
3. Skor 9
4. Pemerintahan daerah merupakan wujud dari proses pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Posisi pemerintahan daerah sangat penting dalam proses penyelenggraan pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah merupakan alat negara untuk melaksanakan program pembangunan di daerah. Dengan kata lain, pemerintahan daerah merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara di wilayah administrasinya.(Skor 3)
5. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk

menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam:

- 1) Politik luar negeri
- 2) Pertahanan
- 3) Keamanan
- 4) Peradilan/yustisi,
- 5) Moneter dan fiskal nasional
- 6) Agama

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengerjakan Proyek Kewarganegaraan. Penilaian proyek dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat pada bagian Lampiran Buku Guru.

4) Pembelajaran Remedial

Sekolah : MAN Yogyakarta 1

Mata Pelajaran : PPKn

Ulangan Ke :

Tanggal Ulangan :

Bentuk Soal : Pilihan Ganda + Uraian (Mengerjakan Ulang Ulangan Harian BAB 3)

Materi Ulangan : 3.3. Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

Rencana Program Remedial :

KKM Mapel : 78

No.	Nama Siswa	Nilai Ulangan	KD/Indikator yang tak dikuasai	No Soal yang dikerjakan dalam Tes Ulang	Hasil
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

5) Pembelajaran Pengayaan

PROGRAM PEMBELAJARAN PENGAYAAN

Sekolah : MAN Yogyakarta 1

Mata Pelajaran : PPKn
Kelas : XII MIA
Ulangan ke :
Tanggal Ulangan :
Bentuk Soal :
Rencana Program Remedial :
KKM Mapel : 78

No.	Nama Siswa	Nilai	Ulangan Bentuk Pengayaan
1			
2			
3			

Mengetahui,

Guru Pembimbing Lapangan


Mahasiswa PPL UNY

Hartiningsih, M.Pd

Kery Anita

NIP. 19720115 2005012003

NIM 13401244006

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen	Ma.12.1/PP.0 : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal Terbit	: Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi	: 00
		Halaman	:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 1

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

- 1.2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 3.4. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara

4.4. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.2.1 Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia
- 1.2.2 Menunjukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran
- 2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran
- 3.4.1. Menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara
- 3.4.2. Menguraikkan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia
- 4.4.1. Menyusun hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

V. Materi Pembelajaran

1. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

- a. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.

Karena itu, hak asasi manusia berbeda pengertiannya dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara Indonesia untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hak ini tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara Indonesia.

- b. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengankewajiban asasi?

- c. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban hak asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi meskipun demikian konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan, sedangkan kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesiasaja, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.

- d. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, karena dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

e. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

2. Jenis-jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia

Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Hak atas kewarganegaraan

Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Hak Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan, yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam undang-undang agraria, perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak.

d. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Hak Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

f. Hak Kemerdekaan memeluk agama

Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama.

g. Hak Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

h. Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

i. Hak Memajukan Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

j. Hak atas Perekonomian nasional

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran.

k. Hak atas Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 	15 Menit

	<p>3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</p>	
Inti	<p>1) Mengamati</p> <p>a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.</p> <p>b) Pada kegiatan ini peserta didik mengamati dengan membaca wacana <i>Mendagri: Partisipasi Pilpres 70 Persen Sudah Luar Biasa</i></p> <p>c) Kemudian guru dapat menambahkan penjelasan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara.</p> <p>2) Menanya</p> <p>a) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian pilih salah satunya dan rumuskan pertanyaan dan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas penyelesaian masalah).</p> <p>b) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang hakikat hak dan kewajiban warga Negara. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam.</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>a) Peserta didik secara berkelompok diminta untuk mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca uraian materi Bab 4 Sub-bab A tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara atau dengan menggunakan berbagai sumber lain yang relevan baik dari internet; web, atau media sosial lainnya.</p> <p>b) Peran guru pada tahap ini adalah sebagai berikut.</p> <p>(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.</p> <p>(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak</p>	60 Menit

	<p>terjawab.</p> <p>(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.</p> <p>4) Menalar</p> <p>a) Peserta didik secara berkelompok menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang makna hak dan kewajiban warga negara, perwujudan hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b) Peserta didik menyusun laporan hasil identifikasi tentang makna hak dan kewajiban hak warga negara menurut para pakar/ahli, perwujudan hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk bahan tayangan maupun dalam bentuk tertulis.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>Setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil identifikasi tentang makna hak dan kewajiban warga negara, perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD Negara RI tahun 1945. Kelompok lainnya diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Hasil identifikasi dan diskusi kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian.</p>	
Penutup	<p>1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 4.1 dan Tugas Mandiri 4.2.</p> <p>3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	15 Menit

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop

- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- d) _____. 1998. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [6 September 2016]

X. Penilaian

- 1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan hakikat hak dan kewajiban warga negara dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek penilaian meliputi, iman taqwa, syukur, gotong royong, toleransi, damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{20} \times 4$$

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan yaitu dengan mengerjakan Tugas Mandiri 4.1 dan 4.2

) Penyelesaian Tugas Mandiri 4.1

Nomor 1 jumlah skor perolehan adalah 6, sedangkan nomor 2 dan 3 masing-masing skornya adalah 2 sehingga jumlah skor perolehan maksimal 10.

Skor Perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{10} \times 4$$

) Penyelesaian Tugas Mandiri 4.2

Perwujudan hak warga Negara beserta contohnya : Jika menjawab 1 skor 2, menjawab 2 skor 4 dan seterusnya maksimal 5 sehingga jumlah skor 10 demikian juga dengan perwujudan kewajiban warga Negara. Total skor maksimal adalah 20.

Skor Perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{20} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik saat mempresentasikan hasil identifikasi tentang makna hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar/ahli, perwujudan hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas. (mengomunikasikan secara lisan).

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/argumentasi				Memberi masukan/saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang


Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Memberi masukan/saran	Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen	Ma.12.1/PP.0 : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal Terbit	: Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi	: 00
		Halaman	:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 2

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.4. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara

4.4. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.2.1 Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia

1.2.2 Menunjukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.3.1. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran

2.3.2. Menunjukkan perilaku damai dalam proses pembelajaran.

3.4.1. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

4.4.1. Menyusun hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

4.4.2. Menyaji hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

V. Materi Pembelajaran

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih dirasakan sebagian masyarakat Indonesia. Penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup dalam kemiskinan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri

Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara

Keadaan ini akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran seenaknya. Ia tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

c. Yang mewujudkan sikap tidak toleran.

Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku saling tidak menghargai dan tidak menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

d. Penyalahgunaan kekuasaan

Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

f. Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan Tugas Mandiri 4.1 dan 4.2. Salah satu peserta didik 	15 Menit

	<p>diminta untuk membacakan hasil tugas yang telah dikerjakan kemudian guru memberikan konfirmasi jawaban.</p> <p>4) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>5) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>6) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan</p>	
Inti	<p>1) Mengamati</p> <p>a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.</p> <p>b) Peserta didik mengamati dengan membaca teks tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terdapat pada buku siswa.</p> <p>c) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan mungkin dapat mengeksplorasi teks tersebut.</p> <p>d) Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam pengamatan tersebut.</p> <p>2) Menanya</p> <p>a) Peserta didik secara kelompok membuat identifikasi pertanyaan dari teks tersebut.</p> <p>b) Peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan terus didorong untuk menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mendalam tentang sesuatu.</p> <p>c) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.</p> <p>d) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak "benar". Sebuah masalah yang rumit dan kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan sering kali bertentangan, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, pengemis dan gelandangan, putus sekolah dan lain-lain yang berhubungan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>a) Peserta didik mencari informasi dan menyelidiki masalah yang telah ditentukan dalam kelompok</p>	60 Menit

	<p>yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagaimana terdapat dalam Tugas Kelompok 4.1.</p> <p>b) Dalam fase ini peran guru antara lain sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks dan bukulain yang relevan yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. 2. Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan. 3. Guru dapat menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. 4) Menalar <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik secara kelompok menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan pentingnya menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. b) Peserta didik menyusun laporan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara tertulis. Laporan dapat berupa bahan tayang maupun dalam bentuk tertulis. 5) Mengomunikasikan <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta didik secara berkelompok diminta untuk menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara bergantian di depan kelas. b) Hasil analisis dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. 	
<p>Penutup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya-jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap apa perlu dilakukan. 2) Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 3) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca materi pada bab selanjutnya 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan 	<p>15 Menit</p>

	mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.	
--	---	--

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- d) _____. 1998. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html 6 September 2016

X. Penilaian

- 1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai adalah iman taqwa, rasa syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

20

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan yaitu dengan mengerjakan Tugas Kelompok 4.1

Pedoman Penskoran

Apabila semua pertanyaan dijawab dengan benar skornya 2, apabila jawaban kurang benar maka skornya 1. Jumlah pertanyaan ada 10, skor maksimal adalah 20.

Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

20

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan unjuk kerja/praktik untuk melihat kemampuan peserta didik dalam bermain peran/simulasi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Lembar Pengamatan Simulasi

Kelas :

Kegiatan :

Tema :


Nama	Aspek Penilaian		Rata-rata Skor
	Ketepatan Perilaku	Penghayatan Peran	

Pedoman Penskoran

Aspek Penilaian	Rubrik
Ketepatan Perilaku	Skor 4, apabila perilaku sangat sesuai dengan peran Skor 3, apabila perilaku sesuai dengan peran Skor 2, apabila perilaku kurang sesuai dengan peran Skor 1, apabila perilaku tidak sesuai dengan peran
Penghayatan Peran	Skor 4, apabila sangat menghayati peran Skor 3, apabila menghayati peran Skor 2, apabila kurang menghayati peran Skor 1, apabila tidak menghayati peran

Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen	Ma.12.1/PP.0 : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal Terbit	: Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi	: 00
		Halaman	:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 3

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.4. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara

4.4. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.2.1 Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia

1.2.2 Menunjukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran

2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran

3.4.1. Menganalisis upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

4.4.1. Menyaji hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

V. Materi Pembelajaran

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

- a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- b. Memberlakukan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan proses penegakkan hak dan kewajiban warga negara.
- c. Mendirikan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berperan dalam penegakkan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh Pemerintah.
- e. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
- f. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
- g. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

- h. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.

- a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
 - b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
 - d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa yang dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

VI. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang materi pelajaran yang telah pelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan	15 Menit

	<p>manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</p>	
Inti	<p>1) Mengamati</p> <p>a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.</p> <p>b) Peserta didik, jika memungkinkan mengamati tayangan video/gambar tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara atau membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 4, sub bab C tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait teks tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.</p> <p>c) Guru memberikan stimuli dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.</p> <p>2) Menanya</p> <p>a) Peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian pilih salah satunya dan rumuskan pertanyaan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah).</p> <p>b) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan mendalam</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>a) Peserta didik secara kelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dan mengerjakan Tugas Mandiri 4.3. dengan membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 4 sub-bab C.</p> <p>b) Ketika eksplorasi berlangsung guru memberi</p>	60 Menit

	<p>kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan, dengan membaca literatur dari berbagai sumber internet, web, media sosial lainnya membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.</p> <p>4) Menalar</p> <p>a) Peserta didik secara kelompok menyimpulkan upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.</p> <p>b) Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil telaah tentang upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.</p>	
Penutup	<p>1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Guru menugaskan peserta didik untuk mengerjakan Proyek kewarganegaraan “Mari Meneliti” untuk membahas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan ditampilkan pada pertemuan keempat.</p> <p>3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	15 Menit

VII. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VIII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

IX. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- d) _____. 1998. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html 6 September 2016

X. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai adalah iman taqwa, rasa syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor perolehan

Nilai = ----- x 4

20

2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tertulis mengerjakan Tugas Mandiri 4.3.

Pedoman Penekoran :

Masing-masing soal skornya adalah 2 sehingga skor perolehan maksimal adalah 6.

Skor Perolehan

Nilai = ----- x 4

6

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil pengumpulan data tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara. Penilaian dapat menggunakan format di bawah ini, dengan catatan guru dapat menambah aspek penilaian sesuai dengan kebutuhan.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/argumentasi				Memberi masukan/saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek ()

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Skor Perolehan


Nilai = ----- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya

		<p>Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya</p> <p>Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.</p>
2	Kemampuan menjawab / Argumentasi	<p>Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas.</p> <p>Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas</p> <p>Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas</p> <p>Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas</p>
3	Memberi masukan/ saran	<p>Skor 4, apabila selalu memberi masukan</p> <p>Skor 3, apabila sering memberi masukan</p> <p>Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan</p> <p>Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan</p>

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No. Dokumen	Ma.12.1/PP.0 : 0.6/27.FK/20 16
		Tanggal Terbit	: Juli 2016
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	No. Revisi	: 00
		Halaman	:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

I. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : MAN 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/1
Alokasi Waktu : 2x45menit
Pertemuan : 4

II. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

III. Kompetensi Dasar

1.2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.4. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara

4.4. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

IV. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.2.1 Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia
- 1.2.2 Menunjukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran
- 2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran
- 2.3.3. Menunjukkan perilaku damai dalam proses pembelajaran.
- 4.4.1. Menyusun hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
- 4.4.2. Menyaji hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

V. Langkah-langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 	15 Menit
Inti	<p>Mengomunikasikan (45 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap kelompok menyajikan hasil pengumpulan data tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. b) Peserta didik menyajikan hasil laporan Proyek Kewarganegaraan “Mari Meneliti” secara panel dalam diskusi kelas. c) Setiap kelompok menanggapi pemaparan laporan yang telah disampaikan oleh kelompok lain. d) Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil inquiri keputastakaannya setelah mendapat masukan dari kelompok lain. 	45 Menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang 	15 Menit

	<p>telah dibahas pada pertemuan ini.</p> <p>2) Guru dan peserta didik melakukan refleksi.</p> <p>3) Peserta didik mengerjakan uji kompetensi Bab 4.</p> <p>4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	
--	--	--

VI. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode penugasan, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

VII. Media Pembelajaran

- a) LCD proyektor
- b) Laptop
- c) Lembar Kerja Siswa
- d) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

VIII. Sumber Belajar

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas XII*. Jakarta :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- c) Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- d) _____. 1998. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html 6 September 2016

IX. Penilaian

- 1) Penilaian sikap dilakukan melalui penilaian diri dengan menggunakan format

penilaian di bawah ini. Peserta didik diminta merenungi diri masing-masing. Apakah perilaku mereka telah mencerminkan sikap warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Peserta didik membaca daftar perilaku dibawah ini, kemudian isi kolommmkegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu/SI, sering/Sr, kadangkadang/ Kd, tidak pernah/TP), alasan dan akibat dari perilaku itu. Ingat, peserta didik harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- 2) Penilaian Pengetahuan
- a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, namun ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, peserta didik melakukan penilaian diri atas pemahamannya terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist () pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

- b) Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengerjakan Uji kompetensi Bab 4.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut.
2. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, baik yang bersifat internal maupun eksternal?
4. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.
5. Bagimanakah cara kalian untuk menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari?

KUNCI JAWABAN

1. Hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga merupakan konsep yang selalu melekat dalam diri setiap individu manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia, tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara Indonesia.

Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban hak asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi meskipun demikian konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan, sedangkan kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.

2. Hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya sebagai berikut.

Hak Warga Negara :

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 Ayat (2)

Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Pasal 27 ayat (3)

Hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28

Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat (3)

Hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 29 Ayat (2)

Kewajiban Warga Negara

Menjunjung hukum dan pemerintahan , Pasal 27 Ayat (1)

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat (1)

Mengikuti pendidikan dasar Pasal 31 ayat (2)

Ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 27 Ayat (3)

3. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

- a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berasal dari diri pelaku, di antaranya adalah:

- 1) sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

- 2) rendahnya kesadaran hukum warga negara, dan

- 3) sikap tidak toleran.

- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya sebagai berikut:

- 1) penyalahgunaan kekuasaan,

- 2) ketidaktegasan aparat penegak hukum ,

- 3) penyalahgunaan teknologi, dan

- 4) kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

4. Jawaban siswa akan beragam, sebagai contoh:

- a. Penegakkan supremasi hukum

- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan

- c. Peningkatkan kualitas aparat penegak hukum

- d. Meningkatkan kesejahteraan warga negara

5. Jawaban siswa akan beragam, sebagai contoh:

- a. Penegakkan supremasi hukum

- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan

- c. Peningkatkan kualitas aparat penegak hukum

d. Meningkatkan kesejahteraan warga negara

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam menyusun laporan Proyek Kewarganegaraan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penilaian dapat menggunakan format dibawah ini, dengan catatan guru dapat menambah atau mengurangi aspek penilaian sesuai dengan kebutuhan. Penilaian Keterampilan Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam menyusun laporan Proyek Kewarganegaraan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penilaian dapat menggunakan format dibawah ini, dengan catatan guru dapat menambah atau mengurangi aspek penilaian sesuai dengan kebutuhan.

Lembar Penilaian Penyajian dan Laporan Hasil Telaah

Nama/Kelompok :

Kelas :

Materi Pokok :

No	Aspek Penilaian	SKOR			
		1	2	3	4
A.	Penyajian				
1	Menanya / Menjawab				
2	Argumentasi				
3	Bahan Tayang / Display				
B.	Laporan				
1	Isi Laporan				
2	Penggunaan Bahasa				
3	Estetika				
Jumlah Skor					

Pedoman penskoran (rubrik) :

No.	Aspek	Penskoran
1	Menanya/ Menjawab	Skor 4, apabila selalu menjawab/menanya Skor 3, apabila sering menjawab/menanya Skor 2, apabila kadang-kadang menjawab/menanya Skor 1, apabila tidak pernah menjawab/menanya.

2	Argumentasi	<p>Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas.</p> <p>Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas</p> <p>Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas</p> <p>Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas</p>
3	Bahan tayang/ display	<p>Skor 4, apabila sistematis, kreatif, menarik</p> <p>Skor 3, apabila sistematis, kreatif, tidak menarik</p> <p>Skor 2, apabila sistematis, tidak kreatif, tidak menarik</p> <p>Skor 1, apabila tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik</p>
4	Isi laporan	<p>Skor 4, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematis lengkap</p> <p>Skor 3, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematis tidak lengkap</p> <p>Skor 2, apabila isi laporan benar, tidak rasional, dan sistematis tidak lengkap</p> <p>Skor 1, apabila isi laporan tidak benar, tidak rasional, dan sistematis tidak lengkap</p>
5	Penggunaan bahasa	<p>Skor 4, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami</p> <p>Skor 3, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami</p> <p>Skor 2, apabila menggunakan bahasa sesuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami</p> <p>Skor 1, apabila menggunakan bahasa dan penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami</p>
6	Estetika	<p>Skor 4, apabila kreatif, rapi, dan menarik</p> <p>Skor 3, apabila kreatif, rapi, dan kurang menarik</p> <p>Skor 2, apabila kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik</p> <p>Skor 1, apabila kurang kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik</p>

1) Pembelajaran Remedial

Sekolah : MAN Yogyakarta 1

Mata Pelajaran : PPKn
 Ulangan Ke :
 Tanggal Ulangan :
 Bentuk Soal : Pilihan Ganda + Uraian (Mengerjakan Ulang Ulangan Harian BAB 3)
 Materi Ulangan : 3.3. Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara
 Rencana Program Remedial :
 KKM Mapel : 78

No.	Nama Siswa	Nilai Ulangan	KD/Indikator yang tak dikuasai	No Soal yang dikerjakan dalam Tes Ulang	Hasil
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

2) Pembelajaran Pengayaan

PROGRAM PEMBELAJARAN PENGAYAAN

Sekolah : MAN Yogyakarta 1
 Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas : XII MIA
 Ulangan ke :
 Tanggal Ulangan :
 Bentuk Soal :
 Rencana Program Remedial :
 KKM Mapel : 78

No.	Nama Siswa	Nilai	Ulangan Bentuk Pengayaan
1			
2			
3			

Mengetahui,

Guru Pembimbing Lapangan

Mahasiswa PPL UNY

Hartiningsih, M.Pd

Kery Anita

NIP. 19720115 2005012003

NIM 13401244006



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Kisi-Kisi Soal

No Dokumen : Ma.12.1/OT.01.2/20.FK/ 2014
Tanggal Terbit : 14 Juni 2014
No. Revisi : 00
Halaman : 1 dari 4

KISI – KISI SOAL ULANGAN HARIAN TAHUN PELAJARAN 2016-2017

Jenis Sekolah : MAN I YOGYAKARTA
Mata Pelajaran : PPKn
Kurikulum : 2013
Kelas / Program : XII/ MIPA
Alokasi Waktu : 60 Menit
Jumlah Soal : 25

NO	KOMPETENSI DASAR	MATERI	INDIKATOR	BENTUK SOAL	NOMOR SOAL
1	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila.	Siswa dapat menunjukkan pernyataan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia	Pilihan Ganda	1
			Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri khusus Hak Asasi Manusia yang bersifat universal	Pilihan Ganda	2
			Siswa dapat menyebutkan nilai-nilai ideal dari kelima sila Pancasila	Pilihan Ganda	3
			Siswa dapat menunjukkan hubungan antara nilai sila ke 2 Pancasila dengan Hak Asasi Manusia	Pilihan Ganda	4
			Siswa dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia	Pilihan Ganda	5



**KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1**
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Kisi-Kisi Soal

No Dokumen	:	Ma.12.1/OT.01.2/20.FK/ 2014
Tanggal Terbit	:	14 Juni 2014
No. Revisi	:	00
Halaman	:	2 dari 4

2	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia	Siswa dapat menyebutkan nilai instrumental dari Pancasila	Pilihan Ganda	6
			Siswa dapat menunjukkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia di lingkungan keluarga	Pilihan Ganda	7
			Siswa dapat menyebutkan berbagai sikap positif dari nilai Praksis sila ke 4 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Pilihan Ganda	8
			Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia	Uraian	21
			Siswa dapat menyebutkan yang bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan dalam proses pelanggaran HAM	Pilihan Ganda	9
			Siswa dapat menganalisis Kasus Salim Kancil termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan kemanusiaan	Pilihan Ganda	10
			Siswa dapat menyebutkan pada proses penuntutan perkara pelanggaran HAM dilakukan oleh Jaksa Agung	Pilihan Ganda	11
3	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi		Siswa dapat menyebutkan perbedaan hakim di Pengadilan Negeri dengan hakim di Pengadilan HAM	Pilihan Ganda	12
			Siswa dapat menyebutkan bahwa upaya banding dapat	Pilihan	13



**KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1**
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Kisi-Kisi Soal

No Dokumen	:	Ma.12.1/OT.01.2/20.FK/ 2014
Tanggal Terbit	:	14 Juni 2014
No. Revisi	:	00
Halaman	:	3 dari 4

4	<p>manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila</p>		<p>dilakukan sejak 90 hari perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi</p>	Ganda		
	<p>4.1. Menyaji pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.</p>		<p>Siswa dapat menyebutkan salah satu pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan apartheid</p>	Pilihan Ganda	15	
			<p>Siswa dapat menyebutkan salah satu komisi HAM PBB yang bertugas dan mempunyai wewenang dalam pelanggaran HAM Internasional</p>	Pilihan Ganda	16	
			<p>Siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk kasus pelanggaran HAM Internasional</p>	Pilihan Ganda	17	
			<p>Siswa dapat menguraikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam tiap-tiap sila Pancasila</p>	Uraian	22	
			<p>Siswa dapat menjelaskan apabila proses penegakan Hak Asasi Manusia, Pancasila tidak dijadikan landasan</p>	Uraian	23	
			<p>Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.</p>	<p>Siswa dapat menyebutkan sanksi internasional jika suatu negara tidak peduli pelanggaran HAM</p>	Pilihan Ganda	14
				<p>Siswa dapat menyebutkan bentuk konsekuensi dari negara yang tidak melakukan upaya pemajuan dan penegakan HAM</p>	Pilihan Ganda	18
				<p>Siswa dapat menyebutkan sikap wujud penghormatan</p>	Pilihan	19



**KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1**
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Kisi-Kisi Soal

No Dokumen : Ma.12.1/OT.01.2/20.FK/ 2014
Tanggal Terbit : 14 Juni 2014
No. Revisi : 00
Halaman : 4 dari 4

		terhadap hak asasi manusia	Ganda	
		Siswa dapat menyebutkan yang mana termasuk penegakan HAM dengan cara penindakan	Pilihan Ganda	20
		Siswa dapat menjelaskan persoalan HAM bisa terjadi dimasyarakat dan peran menyelesaikan persoalan tersebut	Uraian	24
		Siswa dapat menguraikan 1 kasus pelanggaran HAM yang telah dibuat klipping atau makalah serta menjelaskan kronologi kejadian	Uraian	25

Yogyakarta, 18 Agustus 2016

**Mengetahui,
Guru Pembimbing Lapangan**

Mahasiswa PPL UNY

**Hartiningsih, M.Pd
NIP. 1972012005012003**

**Kery Anita
NIM 13401244006**



SOAL ULANGAN HARIAN

TIPE A

A. PILIHAN GANDA

1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

- 1) HAM adalah pemberian pemimpin negara.
- 2) HAM dapat dipindahtangankan.
- 3) Penguasa negara dapat membatasi pelaksanaan HAM warga negaranya.
- 4) HAM dan kewajiban harus dapat berjalan secara seimbang.

Pernyataan di atas yang paling tepat ditunjukkan pada nomor ...

- A. 1) dan 2)
- B. 1) dan 3)
- C. 1) dan 4)
- D. 2) dan 4)
- E. 4)

2. Salah satu ciri khusus hak asasi manusia adalah hak asasi tersebut berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya yang artinya bersifat...

- A. Hakiki
- B. Universal
- C. Tidak dapat dicabut
- D. Tidak dapat dibagi
- E. Dasar

3. Nilai ideal dalam Pancasila berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yakni

- A. Ketuhanan, Pemberdayaan, Persatuan, Kerakyatan, Kemakmuran
- B. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan
- C. Ketuhanan, Keadilan, Persamaan Derajat, Nasionalisme, Musyawarah
- D. Ketuhanan, Kemandirian, Keadilan, Persatuan, Musyawarah
- E. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Persamaan Derajat, Keadilan

4. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila sila ke 2 dapat ditunjukkan dari sikap dibawah ini antarlain ...

- A. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama
- B. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
- C. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah
- D. Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam perlindungan hukum
- E. Menghormati perbedaan agama yang dianut masyarakat

5. Perhatikan pernyataan dibawah ini !

- a. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 A-28 J
- b. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20 - 21
- c. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999
- d. Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2011
- e. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009
- f. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000

Dari pernyataan diatas yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia yaitu ...

- A. a.c.f
- B. a.b.c
- C. a.d.e
- D. a.e.f
- E. a.b.d

6. Realisasi nilai-nilai instrumental dari suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengertian nilai ...
- Instrumental
 - Ideal
 - Dasar
 - Praksis
 - Spiritual
7. Contoh kasus berikut yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga adalah ...
- Sanksi fisik terhadap salah satu siswa
 - Penganiayaan terhadap anak
 - Asisten rumah tangga yang tidak mendapatkan gaji berbulan-bulan
 - Tawuran antar pelajar
 - Pemaksaan kerja terhadap anak di bawah umur
8. Perhatikan pernyataan dibawah ini !
- Saling menghormati antar umat beragama
 - Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban
 - Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
 - Tidak memaksakan kehendak orang lain
 - Menjauhi sikap pemeraan kepada orang lain
 - Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

Pernyataan diatas merupakan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari dari nilai praksis sila ke 4, kecuali ...

- c.d.f
- b.c.e
- a.b.c
- d.e.f
- d.a.c

9. Perhatikan berita dibawah ini dengan cermat !

LUMAJANG - Aktivis petani, Salim Kancil (46), dibunuh secara sadis oleh puluhan orang karena menyuarakan penolakan tambang pasir ilegal di kampungnya, Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, pada 26 September 2015. Anggota Komnas HAM M, Nurkhoiron menjelaskan, apabila kasus terbunuhnya Salim Kancil itu dilakukan oleh aktor negara, maka pelaku sudah melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Maka berdasarkan kronologis kejadian yang diterima Komnas HAM, menurut Nurkhoiron, kasus yang dialami oleh Salim Kancil merupakan pelanggaran HAM berat. "Semua bukti akan kami kumpulkan dari penyelidikan di lapangan secara komprehensif, kemudian dilakukan kajian dan hasilnya akan diterbitkan dalam bentuk rekomendasi akhir," paparnya. Rekomendasi itu akan ditujukan kepada sejumlah pihak seperti aparat kepolisian yang kini sudah menangani kasus tersebut dan Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait dengan izin penambangan.

Seperti diberitakan, kasus pelanggaran hak kembali terjadi pada Sabtu 26 September 2015 di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dua aktivis antitambang pasir, Salim Kancil dianiaya dan dibunuh secara tidak manusiawi, sedangkan Tosan dianiaya hingga mengalami luka parah. Keduanya menjadi korban tindak kekerasan karena ikut menolak tambang pasir di pesisir Pantai Watu Pecak. (Fal)

Sumber : <http://news.okezone.com/read/2015/10/01/337/1224422/dibunuh-sadis-kasus-salim-kancil-pelanggaran-ham-berat>

Dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus di atas proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh ...

- Jaksa Agung dan Hakim
- Komnas HAM dan Hakim
- Kuasa Hukum dan Jaksa Agung

- D. Komnas HAM dan Jaksa Agung
- E. Hakim dan Kuasa Hukum

10. Kasus “Salim Kancil” dari cuplikan berita diatas termasuk dalam pelanggaran HAM berat yaitu ...

- A. Kejahatan Genosida
- B. Kejahatan Apartheid
- C. Kejahatan Kemanusiaan
- D. Kejahatan Perang
- E. Kejahatan Invasi

11. Perhatikan tahap-tahap proses peradilan

- 1) Tahap Penyidikan
 - penyelidikan
 - penyidikan
- 2) Tahap Penuntutan
- 3) Pemeriksaan Sidang Pengadilan
- 4) Pelaksanaan Putusan Hakim

Pada tahap penuntutan perkara pelanggaran HAM di lakukan oleh ...

- A. Kepolisian
- B. Hakim
- C. Komnas HAM
- D. Jaksa Agung
- E. Kuasa Hukum

12. Perbedaan hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan HAM yaitu terletak dalam jumlah yakni ...

- A. 5 orang hakim yang terdiri 2 hakim ad hoc dan 3 hakim Pengadilan HAM
- B. 5 orang hakim yang terdiri 2 hakim Pengadilan HAM dan 3 hakim Pengadilan Negeri
- C. 3 orang hakim yang terdiri 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota
- D. 3 orang hakim yang terdiri 2 hakim ad hoc dan 1 hakim ketua
- E. 5 orang hakim yang terdiri 2 hakim Pengadilan HAM dan 3 hakim ad hoc

13. Jika dalam pelaksanaan putusan hakim pada pengadilan tidak memperoleh keputusan yang sesuai dengan tuntutan, maka terdakwa dapat melakukan banding yang diajukan serta diperiksa dan diproses dalam waktu

- A. 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi
- B. 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung
- C. 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi
- D. 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung
- E. 60 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi

14. Sanksi internasional yang dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli pelanggaran HAM d negaranya antara lain, kecuali ...

- A. Embargo ekonomi
- B. Diberlakukan travel warning
- C. Pemutusan hubungan diplomatik
- D. Penambahan bantuan ekonomi
- E. Pemboikotan produk ekspor

15. Politik perbedaan warna kulit pernah diterapkan di Afrika Selatan merupakan contoh kejahatan kemanusiaan yang berat. Politik tersebut lazim disebut

- A. Genosida
- B. Aneksasi
- C. Projustisia
- D. Koneksitas
- E. Apartheid

16. Bahan-bahan (informasi) sebagai hasil temuan Komisi HAM PBB tentang pelanggaran HAM Internasional oleh suatu negara anggota PBB, selanjutnya disampaikan kepada ...

- A. Sidang Umum PBB

- B. Sekretaris Jenderal PBB
- C. Dewan Ekonomi dan Sosial
- D. Mahkamah Internasional
- E. Dewan Keamanan PBB

17. Kasus pelanggaran HAM Internasional dibedakan menjadi empat yaitu ...

- A. Kejahatan perkosaan, kejahatan perbudakan, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan
- B. Kejahatan apartheid, kejahatan perang, kejahatan pemusnahan, kejahatan pengusiran
- C. Kejahatan kemanusiaan, invasi atau agresi, kejahatan apartheid, kejahatan perbudakan
- D. Kejahatan perang, invasi atau agresi, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida
- E. Kejahatan pembunuhan, kejahatan perang, kejahatan genosida, kejahatan perbudakan

18. Konsekuensi jika sebuah negara tidak melakukan upaya pemajuan dan penegakan HAM diantaranya sebagai berikut, kecuali

- A. Kesulitan memperoleh bantuan dari negara asing
- B. Meningkatkan kerjasama regional dengan negara asing
- C. Memperlemah daya beli masyarakat
- D. Memperkecil pendapatan nasional
- E. Memperbesar pengangguran

19. Sikap berikut yang merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah ...

- A. Menoleransi setiap perbedaan dalam masyarakat
- B. Berusaha memengaruhi teman dalam pengambilan keputusan musyawarah
- C. Mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara
- D. Mengutamakan pemenuhan hak sebelum melaksanakan kewajiban
- E. Menuntut pemenuhan hak tanpa mempertimbangkan hak asasi orang lain

20. Perhatikan pernyataan dibawah ini !

- 1) Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat
- 2) Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM
- 3) Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat
- 4) Melakukan investigasi yang berkaitan dengan peristiwa yang patut diduga pelanggaran HAM
- 5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
- 6) Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi

Dari pernyataan diatas yang termasuk penegakan HAM dengan cara penindakan antara lain sebagai berikut ...

- A. 1),2),3)
- B. 1),3),4)
- C. 2),3),6)
- D. 2),3),5)
- E. 1),3),5)

B. Uraian

1. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM !
2. Uraikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam tiap-tiap sila Pancasila !
3. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan hak asasi manusia, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan ? Jelaskan
4. Sekarang ini di media massa sering diberitakan terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masyarakat, seperti pembunuhan, perbudakan, penculikan dan sebagainya. Mengapa hal itu bisa terjadi ? siapa yang paling bertanggungjawab untuk mengatasi persoalan tersebut ? apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut ?
5. Tulislah salah satu (1) kasus pelanggaran HAM di Indonesia ataupun internasional yang telah kalian buat dalam klipping atau makalah. Jelaskan kronologi kejadian secara singkat serta upaya penanganan dalam kasus pelanggaran tersebut.

HASIL ANALISIS SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : MAN YOGYAKARTA I
Nama Tes : ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Program : XII/MIA 1
Tanggal Tes : 18 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub : KASUS PELANGGARAN HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Keterangan
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
1	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ABCD	Tidak Baik
2	0,609	Baik	0,971	Mudah	ACD	Revisi Pengecoh
3	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ACDE	Tidak Baik
4	0,284	Cukup Baik	0,765	Mudah	A	Revisi Pengecoh
5	0,609	Baik	0,971	Mudah	CDE	Revisi Pengecoh
6	0,582	Baik	0,882	Mudah	CE	Revisi Pengecoh
7	-0,068	Tidak Baik	0,882	Mudah	AD	Tidak Baik
8	0,117	Tidak Baik	0,882	Mudah	DE	Tidak Baik
9	0,257	Cukup Baik	0,882	Mudah	CE	Revisi Pengecoh
10	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ABDE	Tidak Baik
11	0,608	Baik	0,735	Mudah	-	Cukup Baik
12	0,233	Cukup Baik	0,324	Sedang	-	Baik
13	0,132	Tidak Baik	0,588	Sedang	D	Tidak Baik
14	0,303	Baik	0,882	Mudah	AB	Revisi Pengecoh
15	0,365	Baik	0,824	Mudah	D	Revisi Pengecoh
16	0,574	Baik	0,735	Mudah	C	Revisi Pengecoh
17	0,442	Baik	0,882	Mudah	CE	Revisi Pengecoh
18	0,440	Baik	0,853	Mudah	-	Cukup Baik
19	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	BCDE	Tidak Baik
20	0,325	Baik	0,824	Mudah	AD	Revisi Pengecoh
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Keterangan
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
35	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala MAN YOGYAKARTA I

YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2016
Guru Mata Pelajaran

PLT SINGGIH SAMPURNO, M.A
NIP 197706042005011004

HARTININGSIH, M.Pd
NIP 19720115200501 2003

SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : MAN YOGYAKARTA I
Nama Tes : ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Program : XII/MIA 1
Tanggal Tes : 18 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub : KASUS PELANGGARAN HAM DALAM PERSPEKTIF PAN

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
1	0,0	0,0	0,0	0,0	100*	0,0	100,0
2	0,0	97,1*	0,0	0,0	2,9	0,0	100,0
3	0,0	100*	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4	0,0	2,9	8,8	76,5*	11,8	0,0	100,0
5	97,1*	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6	5,9	5,9	0,0	88,2*	0,0	0,0	100,0
7	0,0	88,2*	5,9	0,0	5,9	0,0	100,0
8	88,2*	8,8	2,9	0,0	0,0	0,0	100,0
9	2,9	8,8	0,0	88,2*	0,0	0,0	100,0
10	0,0	0,0	100*	0,0	0,0	0,0	100,0
11	2,9	5,9	2,9	73,5*	14,7	0,0	100,0
12	26,5	17,6	20,6	2,9	32,4*	0,0	100,0
13	58,8*	8,8	11,8	0,0	20,6	0,0	100,0
14	0,0	0,0	8,8	88,2*	2,9	0,0	100,0
15	11,8	2,9	2,9	0,0	82,4*	0,0	100,0
16	8,8	2,9	0,0	73,5*	14,7	0,0	100,0
17	2,9	8,8	0,0	88,2*	0,0	0,0	100,0
18	5,9	85,3*	2,9	2,9	2,9	0,0	100,0
19	100*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
20	0,0	14,7	82,4*	0,0	2,9	0,0	100,0
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
35	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala MAN YOGYAKARTA I

YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2010
Guru Mata Pelajaran

PLT SINGGIH SAMPURNO, M.A
NIP 197706042005011004

HARTININGSIH, M.Pd
NIP 19720115200501 2003

HASIL ANALISIS SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : MAN YOGYAKARTA I
Nama Tes : ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Program : XII/MIA 3
Tanggal Tes : 23 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub : KASUS PELANGGARAN HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Keterangan
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
1	0,147	Tidak Baik	0,970	Mudah	ABC	Tidak Baik
2	0,050	Tidak Baik	0,970	Mudah	CDE	Tidak Baik
3	0,630	Baik	0,970	Mudah	ACD	Revisi Pengecoh
4	0,460	Baik	0,879	Mudah	AE	Revisi Pengecoh
5	0,443	Baik	0,848	Mudah	B	Revisi Pengecoh
6	0,031	Tidak Baik	0,909	Mudah	CE	Tidak Baik
7	-0,067	Tidak Baik	0,939	Mudah	ADE	Tidak Baik
8	0,106	Tidak Baik	0,788	Mudah	CE	Tidak Baik
9	0,402	Baik	0,697	Sedang	E	Revisi Pengecoh
10	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ABDE	Tidak Baik
11	0,567	Baik	0,606	Sedang	-	Baik
12	0,274	Cukup Baik	0,273	Sulit	-	Cukup Baik
13	0,158	Tidak Baik	0,485	Sedang	-	Tidak Baik
14	0,558	Baik	0,939	Mudah	BE	Revisi Pengecoh
15	0,105	Tidak Baik	0,879	Mudah	CD	Tidak Baik
16	0,481	Baik	0,667	Sedang	C	Revisi Pengecoh
17	0,630	Baik	0,970	Mudah	ACE	Revisi Pengecoh
18	0,397	Baik	0,848	Mudah	CDE	Revisi Pengecoh
19	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	BCDE	Tidak Baik
20	0,105	Tidak Baik	0,879	Mudah	DE	Tidak Baik
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-

AnBuso Versi 5.3

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Keterangan
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
35	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala MAN YOGYAKARTA I

YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2016
Guru Mata Pelajaran

SINGGIH SAMPURNO, M.A
NIP 197706042005011004

HARTININGSIH, M.Pd
NIP 19720115200501 2003

SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : MAN YOGYAKARTA I
Nama Tes : ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Program : XII/MIA 3
Tanggal Tes : 23 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub : KASUS PELANGGARAN HAM DALAM PERSPEKTIF PAN

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
1	0,0	0,0	0,0	3,0	97*	0,0	100,0
2	3,0	97*	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3	0,0	97*	0,0	0,0	3,0	0,0	100,0
4	0,0	9,1	3,0	87,9*	0,0	0,0	100,0
5	84,8*	0,0	6,1	6,1	3,0	0,0	100,0
6	3,0	6,1	0,0	90,9*	0,0	0,0	100,0
7	0,0	93,9*	6,1	0,0	0,0	0,0	100,0
8	78,8*	9,1	0,0	12,1	0,0	0,0	100,0
9	6,1	18,2	6,1	69,7*	0,0	0,0	100,0
10	0,0	0,0	100*	0,0	0,0	0,0	100,0
11	6,1	12,1	3,0	60,6*	18,2	0,0	100,0
12	24,2	9,1	15,2	24,2	27,3*	0,0	100,0
13	48,5*	21,2	9,1	9,1	12,1	0,0	100,0
14	3,0	0,0	3,0	93,9*	0,0	0,0	100,0
15	9,1	3,0	0,0	0,0	87,9*	0,0	100,0
16	21,2	6,1	0,0	66,7*	6,1	0,0	100,0
17	0,0	3,0	0,0	97*	0,0	0,0	100,0
18	15,2	84,8*	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
19	100*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
20	3,0	9,1	87,9*	0,0	0,0	0,0	100,0
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-

AnBuso Versi 5.3

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
35	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala MAN YOGYAKARTA I

YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2010
Guru Mata Pelajaran

SINGGIH SAMPURNO, M.A
NIP 197706042005011004

HARTININGSIH, M.Pd
NIP 19720115200501 2003

HASIL ANALISIS SOAL ESSAY

Satuan Pendidikan : MAN YOGYAKARTA I
Nama Tes : ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Program : XII/MIA 3
Tanggal Tes : 23 Agustus 2016
Pokok Bahasan/Sub : KASUS PELANGGARAN HAM DALAM PERSPEKTIF PANCA

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
1	0,690	Baik	0,765	Mudah	Cukup Baik
2	0,222	Cukup Baik	0,894	Mudah	Cukup Baik
3	0,495	Baik	0,664	Sedang	Baik
4	0,439	Baik	0,806	Mudah	Cukup Baik
5	0,499	Baik	0,864	Mudah	Cukup Baik
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala MAN YOGYAKARTA I

YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2016
Guru Mata Pelajaran

SINGGIH SAMPURNO, M.A
NIP 197706042005011004

HARTININGSIH, M.Pd
NIP 19720115200501 2003

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			NILAI TES ESSAY	NILAI AKHIR	PREDIKAT	KET
			BENAR	SALAH	NILAI				
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
- Jumlah peserta test =		34	Jumlah Nilai =		2870	2757	2802		
- Jumlah yang tuntas =		26	Nilai Terendah =		50,00	56,67	62,00		
- Jumlah yang belum tuntas =		8	Nilai Tertinggi =		100,00	96,67	96,00		
- Persentase peserta tuntas =		76,5	Rata-rata =		84,41	81,08	82,41		
- Persentase peserta belum tuntas =		23,5	Standar Deviasi =		9,98	9,56	8,37		

Mengetahui :
Kepala MAN YOGYAKARTA I

YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2016
Guru Mata Pelajaran

PLT SINGGIH SAMPURNO, M.A
NIP 197706042005011004

HARTININGSIH, M.Pd
NIP 19720115200501 2003

No	NAMA PESERTA	L/P	HASIL TES OBJEKTIF			NILAI TES ESSAY	NILAI AKHIR	PREDIKAT	KET
			BENAR	SALAH	NILAI				
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
- Jumlah peserta test =		33	Jumlah Nilai =		2725	2635	2671		
- Jumlah yang tuntas =		28	Nilai Terendah =		50,00	60,00	60,00		
- Jumlah yang belum tuntas =		5	Nilai Tertinggi =		95,00	100,00	94,00		
- Persentase peserta tuntas =		84,8	Rata-rata =		82,58	79,85	80,94		
- Persentase peserta belum tuntas =		15,2	Standar Deviasi =		9,28	8,81	7,45		

Mengetahui :
Kepala MAN YOGYAKARTA I

YOGYAKARTA, 15 SEPTEMBER 2016
Guru Mata Pelajaran

PLT. SINGGIH SAMPURNO, M.A
NIP 197706042005011004

HARTININGSIH, M.Pd
NIP 19720115200501 2003

REKAP NILAI SISWA KELAS XII MIA 1

NO	NAMA	NILAU ULANGAN HARIAN					RATA2 UH	NILAI TUGAS TERSTRUTUR			NILAI TUGAS MANDIRI			RATA2 TUGAS	NILAI UTS	REMIDI	UAS	REMIDI UKK	NAR
		UH 1	REMIDI	PENGAYAAN	UH2	REMIDI		PENGAYAAN	1	2	3	1	2						
1	Affifah Zulfa Faradisa	88						90	90	95	100								
2	Aliya Nadira Irsyad	96		98				90	95	90	94	90							
3	Arifa Hamida	92		95				85	95	90	100	90							
4	Atiqah Intan Mahardiyanti	84		86				85	95	85	97	90							
5	Atiya Fiki Rahma M	88						90	85	90	100	95							
6	Dzikra Azzahra	78						85	85	85	97	85							
7	Gusti Yohandita Gani	74	78					85	85	90	82	85							
8	Hana Hanifah Isnaini	88		90				90	95	90	100	95							
9	Indrawati	84						70	90	95	94								
10	Intan Rahmadani	88		90				90	95	95	100	95							
11	Rias Wahyuni	94		96				85	85	95	100	95							
12	Rossy Mutia Isnaini Suwondo	86						85	95	90	88	90							
13	Sarah Khanifa Assania	74	78					90	85	90		85							
14	Trixie Azarine Ambarrini	66	78					70	70	80									
15	Ulul 'azmi Intan Rahmawati	86						85	85	85	94	95							
16	Yunny Tri Hanifah	86		88				90	95	95	91	85							
17	Ahsan Jihadan Al-Biruni	78						70	80	80									
18	Ariq Rizqisyah	80		82				70	80	80	100								
19	Carlo Abimanyu	86		88				90	85	85	88	90							
20	Dhafa Rizki Akbar Fadhila	88		90				85	80	80	91	95							
21	Dian Dwi Ramadhan	76	78					90	80	80	85	95							
22	Faiz Hakim Ramadhan	70	78					70	85	85	85								
23	Farkhan Atoillah	88						90	85	85	94								
24	Izharul Haqq Haris	78						85	80	80	97								
25	Mirza Madani Muhammad	94		96				85	80	80	94	90							
26	Mizan Zuhdi Syarony	84		86				85	80	80	88	95							
27	Muchammad Hamdani Itsna M	62	78					70	80	80	100								
28	Muhammad Faiz S	92		94				85	90	90	97	90							
29	Muhammad Fajar B	82		84				90	90	90	100	90							
30	Muhammad Fanny Muzakki	80		82				85	80	80	94	95							
31	Muhammad Hanif Nursamsul	86						85	90	90	94								
32	Ramadhan Iqbal Saputro	76	78					85	90	90	97	85							
33	Wakhid Zulkifli A	88						80	90	90	100	95							
34	Zhahdo Bintang Ramadhan	66	78					70	85	85		85							

REKAP NILAI SISWA KELAS XII MIA 3

NO	NAMA	NILAI ULANGAN HARIAN					RATA2 UH	NILAI TUGAS TERSTRUTUR			NILAI TUGAS MANDIRI			RATA2TUGAS	NILAI UTS	REMIDI	UAS	REMIDI UKK	NAR
		UH 1	REMIDI	PENGAYAAN	UH2	REMIDI		PENGAYAAN	1	2	3	1	2						
1	Afiana Nurkholishotus Shohibah	82		84				90	80	85	97	95							
2	Anissa Nur Fain Fitriana	88		84				85	95	90	94	95							
3	Audrey Amy Andreansyah	80						70	85	90	91	95							
4	Butsaina Nur Hafizha	94		96				90	85	95	100	95							
5	Dhea Fylla Ifadha	78		80				85	85	90	82								
6	Dwi Unzila Astuti	79		81				90	80	90	91	90							
7	Elfanty Dhea Syarifa	82		84				70	90	85		90							
8	Fadhila Annisa Puspadjati	90		92				70	90	90	94	95							
9	Fahrunnisa Al Azizah	86		89				80	90	90	97								
10	Haishah Fitri Afifah	74	78					70	80	95	94	90							
11	Khoiru Nisa Anggraeni	84		86				90	90	85	97	90							
12	Nur Afifah Al Husna	82		84				85	95	85	97	90							
13	Tazkia Dewi Apipah	78		80				90	95	95	82	90							
14	Umi Mar Atush Sholihah	82		84				80	80	90	94	90							
15	Vyna Himayatul F	84						90	80	95	88	90							
16	Abdullah Harits	80		83				70	80	85	97	85							
17	Avisena Rahman Istakahuda	80		82				90	80	95	88	85							
18	Dzaki Budy Santosa	72	78					85	90	85	91	90							
19	Faizal Arya Prahastya	72	78					85	85	85	97	85							
20	Fajar Awaludin	80		82				90	80	90	91	90							
21	Ghaws Shafadonia	70	78					85	90	90		85							
22	Isa Abdulloh	90		93				85	80	90	100	90							
23	Kurnia Dwi Satria	79						70	80	90	94								
24	Muhammad Asnaufal F	64	78					70	80	90	97	85							
25	Muhammad Haikal Achs	80		82				85	85	90	82	90							
26	Muhammad Hanif Chandra Mirfaq	79						70	95	85	82	90							
27	Muhammad Iqbal	82						70	95	85	85	85							
28	Muhammad Rizky Kuncoro	60	78					70	90	90	80	85							
29	Nabhani Ibrahim	92		95				70	70	80	94	90							
30	Pahlevi Wahyu Hardjita	78		81				85	90	85	91	85							
31	Sakti Wicaksono	90		92				90	95	80	88	90							
32	Sufi Syafi'i	80						85	85	85		90							
33	Taqiyuddin Rabbani	80		82				70	80	90	94	90							

Daftar Penilaian Sikap

No	Nama	Total Skor	Nilai Akhir
1	Afifah Zulfa Faradisa	28	Baik
2	Aliya Nadira Irsyad	26	Baik
3	Arifa Hamida	27	Baik
4	Atiqah Intan Mahardiyanti	26	Baik
5	Atiya Fiki Rahma M	24	Cukup
6	Dzikra Azzahra	28	Baik
7	Gusti Yohandita Gani	26	Baik
8	Hana Hanifah Isnaini	27	Baik
9	Indrawati	24	Cukup
10	Intan Rahmadani	28	Baik
11	Rias Wahyuni	28	Baik
12	Rossy Mutia Isnaini Suwondo	28	Baik
13	Sarah Khanifa Assania	27	Baik
14	Trixie Azarine Ambarrini	23	Cukup
15	Ulul 'azmi Intan Rahmawati	23	Cukup
16	Yunny Tri Hanifah	26	Baik
17	Ahsan Jihadan Al-Biruni	23	Cukup
18	Ariq Rizqisyah	29	Baik
19	Carlo Abimanyu	26	Baik
20	Dhafa Rizki Akbar Fadhila	26	Baik
21	Dian Dwi Ramadhan	28	Baik
22	Faiz Hakim Ramadhan	29	Baik
23	Farkhan Atoillah	26	Baik
24	Izharul Haqq Haris	32	Baik
25	Mirza Madani Muhammad	26	Baik
26	Mizan Zuhdi Syarony	26	Baik
27	Muchammad Hamdani Itsna M	24	Cukup
28	Muhammad Faiz S	25	Cukup
29	Muhammad Fajar B	25	Cukup
30	Muhammad Fanny Muzakki	29	Baik
31	Muhammad Hanif Nursamsul	31	Baik
32	Ramadhan Iqbal Saputro	22	Cukup
33	Wakhid Zulkifli A	29	Baik
34	Zhahdo Bintang Ramadhan	21	Cukup

Daftar Penilaian Sikap

No	Nama	Total Skor	Nilai Akhir
1	Afiana Nurkholishotus Shohibah	28	Baik
2	Anissa Nur Fain Fitriana	27	Baik
3	Audrey Amy Andreansyah	26	Baik
4	Butsaina Nur Hafizha	25	Cukup
5	Dhea Fylla Ifadha	30	Baik
6	Dwi Unzila Astuti	28	Baik
7	Elfanty Dhea Syarifa	26	Baik
8	Fadhila Annisa Puspadjati	30	Baik
9	Fahrunnisa Al Azizah	33	Baik
10	Hafshah Fitri Afifah	27	Baik
11	Khoiru Nisa Anggraeni	36	Sangat Baik
12	Nur Afifah Al Husna	26	Baik
13	Tazkia Dewi Apipah	32	Baik
14	Umi Mar Atush Sholihah	26	Baik
15	Vyna Himayatul F	28	Baik
16	Abdullah Harits	22	Cukup
17	Avisena Rahman Istakahuda	26	Baik
18	Dzaki Budya Santosa	29	Baik
19	Faizal Arya Prahastya	31	Baik
20	Fajar Awaludin	26	Baik
21	Ghaws Shafadonia	27	Baik
22	Isa Abdulloh	28	baik
23	Kurnia Dwi Satria	21	Cukup
24	Muhammad Asnaufal F	25	Cukup
25	Muhammad Haikal Achs	30	Baik
26	Muhammad Hanif Chandra Mirfaq	24	Cukup
27	Muhammad Iqbal	25	Cukup
28	Muhammad Rizky Kuncoro	25	Cukup
29	Nabhani Ibrahim	28	Baik
30	Pahlevi Wahyu Hardjita	28	Baik
31	Sakti Wicaksono	24	Cukup
32	Sufi Syafi'i	27	Baik
33	Taqiyuddin Rabbani	26	Baik



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Buku Tugas Mandiri

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6 /06.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 1 dari 3

BUKU TUGAS MANDIRI
MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SEMESTER Gasal TAHUN PELAJARAN 2016-2017

NO	HARI/TGL	KELAS	TUGAS KE	SK/KD/MATERI	ISI PERINTAH TUGAS	SIFAT/JENIS TUGAS	TGL SELESAI	NILAI
1.	Selasa, 9 Agustus 2016	XII MIA 3	1	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila	Mengerjakan UJI KOMPETENSI DI LKS PPKN Kelas XII. Pilihan Ganda 10 dan Uraian 5	Tugas Individu	23 Agustus 2016	Terlampir
2.	Kamis, 11 Agustus 2016	XII MIA 1	1	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan	Mengerjakan UJI KOMPETENSI DI LKS PPKN Kelas XII. Pilihan Ganda 10 dan Uraian 5	Tugas Individu	18 Agustus 2016	Terlampir



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Buku Tugas Mandiri

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6 /06.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 3

				antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila				
3	Selasa, 2 Agustus 2016	XII MIA 3	2	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila	Membuat Klipping atau Makalah tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia maupun Internasional masing-masing 2 kasus dengan rincian : a. Kronologis kejadian b. Nilai-nilai yang dilanggar c. Penyebab d. Upaya penanganan	Tugas Kelompok dengan teman sebangku. Maksimal 2 orang	23 Agustus 2016	terlampir
4.	Kamis, 4 Agustus 2016	XII MIA 1	2	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal,	Membuat Klipping atau Makalah tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia maupun Internasional masing-masing 2 kasus dengan rincian :	Tugas Kelompok dengan teman sebangku. Maksimal 2	18 Agustus 2016	Terlampir



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Buku Tugas Mandiri

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6 /06.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 3 dari 3

				instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila	a. Kronologis kejadian b. Nilai-nilai yang dilanggar c. Penyebab d. Upaya penanganan	orang		

Mengetahui :

Guru Pembimbing Lapangan

Hartiningsih, M.Pd
NIP. 1972012005012003

Mahasiswa PPL UNY

Kery Anita
NIM 13401244006



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Buku Tugas Terstruktur /
Tidak Terstruktur

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6/07.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 1 dari 6

BUKU TUGAS TERSTRUKTUR / TIDAK TERSTRUKTUR
MATA PELAJARAN PKn KELAS XII
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2016-2017

NO	HARI/TGL	KELAS	TUGAS KE	SK/KD/MATERI	ISI PERINTAH TUGAS	TGL SELESAI	NILAI
1.	Selasa, 26 Juli 2016	XII MIA 1	1	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila	Mengerjakan Tugas 1.2 di Buku Pegangan Siswa Halaman 13 – 15 tentang Identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan.	2 Agustus 2016	Terlampir



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Buku Tugas Terstruktur /
Tidak Terstruktur

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6/07.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 6

2.	Selasa, 26 Juli 2016	XII MIA 1	2	<p>3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila</p>	<p>Mengerjakan Tugas Kelompok 1 di Buku Pegangan Siswa halaman 10-11.</p> <p>1) Selain dijamin dalam konstitusi, hak asasi manusia juga dijamin di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.</p> <p>2) Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diberlakukan, akan tetapi masih saja terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hal itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.</p> <p>a. Siapa yang harus bertanggung jawab</p>	26 Juli 2016	Terlampir
----	----------------------	-----------	---	---	---	--------------	-----------



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

**Buku Tugas Terstruktur /
 Tidak Terstruktur**

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6/07.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 3 dari 6

					<p>untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?</p> <p>b.Apa saja solusi yang kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?</p>		
3.	Kamis, 28 Juli 2016	XII MIA 1	1	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila	Mengerjakan Tugas 1.2 di Buku Pegangan Siswa Halaman 13 – 15 tentang Identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan.	4 Agustus 2016	Terlampir
4.	Kamis, 28 Juli 2016	XII MIA 1	2	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia	Mengerjakan Tugas Kelompok 1 di Buku Pegangan Siswa halaman 10-11.	28 Juli 2016	Terlampir



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Buku Tugas Terstruktur /
Tidak Terstruktur

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6/07.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 4 dari 6

secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila

- 1) Selain dijamin dalam konstitusi, hak asasi manusia juga dijamin di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- 2) Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diberlakukan, akan tetapi masih saja terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hal itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
 - a. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?



**KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1**
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

**Buku Tugas Terstruktur /
Tidak Terstrutur**

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6/07.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 5 dari 6

					b.Apa saja solusi yang kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?		
5.	Selasa, 2 Agustus 2016	XII MIA 3	3	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila	Mengerjakan tugas di Buku Pegangan Siswa halaman 16 tentang Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu di Indonesia tentang TKI yang dianiaya dan Internasional tentang konflik Israel – Palestina	2 Agustus 2016	Terlampir
6.	Kamis, 4 Agustus 2016	XII MIA 1	3	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal,	Mengerjakan tugas di Buku Pegangan Siswa halaman 16 tentang Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi	4 Agustus 2016	Terlampir



KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327

Buku Tugas Terstruktur /
Tidak Terstruktur

No Dokumen : Ma.12.1/PP.00.6/07.FK/ 2014

Tanggal Terbit : 14 Juni 2014

No. Revisi : 00

Halaman : 6 dari 6

				instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila	Manusia yaitu di Indonesia tentang TKI yang dianiaya dan Internasional tentang konflik Israel – Palestina		

Mengetahui :

Guru Pembimbing Lapangan

Hartiningsih, M.Pd
NIP. 1972012005012003

Mahasiswa PPL UNY

Kery Anita
NIM 13401244006



**KEMENTERIAN AGAMA
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327**

Tanggal Pengembalian Hasil Ulangan

No Dokumen : Ma.12.1/OT.01.2/31.FK/2014
Tanggal Terbit : 19 Agustus 2016
No. Revisi : 00
Halaman : 1 dari 2

MATA PELAJARAN PPKn TAHUN AJARAN 2016-2017

NO.	HARI/TANGGAL	KELAS	ULANGAN KE	SK/KD/MATERI	TANGGAL KEMBALI KE SISWA	WAKIL PENERIMA [NAMA DAN TTD]
1.	Kamis, 18 Agustus 2016	XII MIA 1	1	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila	12 September 2016	
2	Selasa, 23 Agustus 2016	XII MIA 3	1	3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila	12 September 2016	

				Pancasila / Materi Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila		


Yogyakarta, 15 September 2016

**Mengetahui,
Guru Pembimbing Lapangan**

Mahasiswa PPL

**Hartiningsih, M.Pd
NIP. 1972012005012003**

**Kery Anita
NIM. 13401244006**

	KEMENTERIAN AGAMA RI MAN YOGYAKARTA 1 Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327	No.	Ma.12.1/PP.0
		Dokumen	: 0.6/27.FK/20 16
	PROGRAM / PELAKSANAAN PENGAYAAN	Tanggal Terbit	: Juli 2016
		No. Revisi	: 00
		Halaman	:

PROGRAM / PELAKSANAAN PENGAYAAN

Buatlah artikel tentang tata cara atau prosedur tentang Pengadilan HAM Internasional.

Artikel minimal 1 halaman boleh diprint atau ditulis tangan.

PENGAYAAN di kerjakan bagi yang lulus KKM 78



**KEMENTERIAN AGAMA RI
MAN YOGYAKARTA 1
Jl. C. Simanjuntak No.60 Yogyakarta Telp./Fax 513327**

BUKU PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN DAN PRESENSI SISWA

No. Dokumen	:	Ma.12.1/PP.00.6/27.FK/2016
Tanggal Terbit	:	Juli 2016
No. Revisi	:	00
Halaman	:	1-11

BUKU PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN DAN PRESENSI SISWA

MATA PELAJARAN : PPKn

NO	HARI / TGL	KELAS	JAM KE	KOMPETENSI DASAR (NO. KD)	MATERI	KEGIATAN PEMBELAJARAN	MEDIA / ALAT	PENILAIAN	PRESENSI SISWA/NO ABSEN/NAMA/KETERANGAN
1.	Selasa, 26 Juli 2016	XII MIA 3	1-2	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila.	1) Mengamati a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.	-LCD proyektor - Laptop		Nabhani Ibrahim (i) Sakti Wicaksono (s)
2.	Kamis, 28 Juli 2016	XII MIA 1	3-4	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat,	a.Hak asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila b.Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila.	b) Peserta didik diminta untuk mengamati dengan membaca wacana Vonis 11 Tahun Bos Kualifikasi Kecewakan Buruh. c) Guru memberikan informasi tambahan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai peristiwa sejenis di lingkungan	- Lembar Kerja Siswa - Alat tulis		Trixie A (i) Indrawati (s) Ahsan Jihadan (a) Mirza Madani (i)

			<p>berbangsa dan bernegara</p> <p>3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila</p> <p>4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.</p>	<p>c.Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila</p>	<p>peserta didik.</p> <p>d) Guru memberikan stimulasi dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dapat menghadapi peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.</p> <p>2) Menanya</p> <p>a) Guru memberi kesempatan peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian salah</p> <p>b) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>a) Peserta didik mencari informasi dan</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>f)</p> <p>g)</p> <p>h)</p> <p>i) mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang disusun dengan membaca uraian materi di buku PPKn kelas XII Bab 1</p> <p>j) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Tugas Kelompok 1.1 dan Tugas Kelompok 1.2. (Tugas Mandiri 1.1 dan Tugas Mandiri 1.2 dikerjakan sebagai Pekerjaan Rumah/PR)</p> <p>4) Menalar</p> <p>a) Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh, seperti hubungan hak asasi manusia dengan antarsila dalam Pancasila, menghubungkan hak asasi manusia dalam nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis sila-sila Pancasila.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>5) Mengomunikasikan</p> <p>a) Peserta didik menyusun laporan hasil telaah hak asasi manusia dalam Pancasila. Laporan disusun secara individu dan menjadi tugas peserta didik dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.</p> <p>b) Peserta didik secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil analisis hak asasi manusia dalam Pancasila secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.</p> <p>c) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.</p>			
3.	Selasa, 2 Agustus 2016	XII MIA 3	1-2	-Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	<p>1) Mengamati</p> <p>a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.</p> <p>b) Peserta didik membaca wacana yang berjudul TKI Asal Brebes</p>	- LCD proyektor - Laptop - Lembar Kerja Siswa - Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)		Audrey A (s) Abdullah H (i) Kurnia Dwi (i) M. Asnaufal (i) M. Iqbal (i)
4.	Kamis, 4 Agustus 2016	XII MIA 1	3-4	- Penyimpangan Nilai-nilai				Trixie (S) Ariq Rizqisyah (i) M. Hamdani (i) M. Hanif (i)

				<p>Pancasila dalam Kasus Pelanggaran HAM</p>	<p>Dianiaya Majikan di Singapura yang terdapat pada Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab B, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.</p> <p>c) Peserta didik menganalisis kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam wacana tersebut.</p> <p>2) Menanya</p> <p>a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan</p>			<p>Wakhid Z (i) Zhahdo B (i)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

					<p>kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi/ data</p> <p>a) Peserta didik mencari informasi lanjutan dengan membaca sumber lain yang relevan baik dari internet, web, maupun media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Peserta didik diharapkan belajar secara aktif untuk menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan nilai-nilai pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta penyelesaian kasus tersebut.</p> <p>4) Menalar</p> <p>a) Peserta didik secara</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>berkelompok menyimpulkan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai pancasila yang dilanggar dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>a) Peserta didik secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil telaah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai pancasila dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.</p> <p>b) Guru memberikan</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik. c) Peserta didik mengumpulkan hasil analisis diskusi kelompok secara tertulis untuk diberikan penilaian.		
5.	Selasa, 9 Agustus 2016	XII MIA 3	8-9	Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia	1) Mengamati a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 8-10 orang. b) Peserta didik membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab C tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi	- LCD proyektor - Laptop - Lembar Kerja Siswa - Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)		Nur Afifah AlHusna (i) Faizal Arya (s) Isa Abdullah (i) Taqiyuddin R (i)
6.	Kamis, 11 Agustus	XII MIA 1	3-4					Hana Hanifah (i0) Trixie (i) Farkhan A (i) M. Hamdani (i) M. Hanif (i) Zhahdo B (i)

					<p>internal yang mendorong eksplorasi.</p> <p>2) Menanya</p> <p>a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia</p> <p>3) Mengumpulkan Informasi</p> <p>a) Peserta didik mencari informasi lanjutan, baik melalui Buku Teks PPKn Kelas XII maupun sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Di sini peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dan sanksi atas pelanggaran HAM internasional.</p> <p>4) Menalar</p> <p>a) Peserta didik menarik kesimpulan tentang</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>proses peradilan HAM di Indonesia dan proses peradilan di dunia internasional.</p> <p>5) Mengomunikasikan</p> <p>a) Setiap kelompok diberikan tugas tentang mensimulasikan proses sidang peradilan HAM di Indonesia dan peradilan internasional.</p> <p>b) Hasil bermain peran peserta didik di pandu oleh guru untuk mendapatkan penilaian.</p>			
7.	Kamis, 18 Agustus 2016	XII MIA 1	3-4		Ulangan Harian BAB 1			
8.	Selasa, 23 Agustus 2016	XII MIA 3	8-9		Ulangan Harian BAB 1			

Mengetahui,

Guru Pembimbing Lapangan

Mahasiswa PPL UNY

Hartiningsih, M.Pd

NIP. 1972012005012003

Kery Anita

NIM 13401244006



**LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL UNY
LOKASI MAN YOGYAKARTA I
TAHUN : 2016**

F03

Untuk Mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : MAN YOGYAKARTA I
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA : Jl. C. Simanjuntak No. 60 Yogyakarta
TANGGAL PELAKSANAAN PPL : 15 Juli 2016 – 15 September 2016

No.	Nama Kegiatan	Hasil Kuantitatif/Kualitatif	Serapan Dana (Dalam Rupiah)				
			Swadaya/ Sekolah/ Lembaga	Mahasiswa	Pemda Kabupaten	Sponsor/ Lembaga lainnya	Jumlah
1.	Fotocopy pengandaan Soal Ulangan Harian kelas X	Memberikan soal-soal kepada siswa yang akan ulangan harian		Rp 32.000,00			Rp 32.000,00
2.	Fotocopy pengandaan soal ulangan harian kelas XII	Memberikan soal-soal kepada siswa yang akan ulangan harian		Rp 30.000,00			Rp 30.000,00
3.	Pembuatan Administrasi Pembelajaran	Memberikan kelengkapan guru selama satu semester		Rp. 84000,00			Rp. 84000,00

Yogyakarta, 15 September 2016

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa PPL

Singgih Sampurno, S.Pd.,MA
NIP 197706042005011004

Puji Wulandari K,M.Kn
NIP 198002132005012 001

Hartiningsih, M.Pd
NIP 1972012005012 003

Kery Anita
NIM 13401244006

DOKUMENTASI FOTO - FOTO







KARTU BIMBINGAN PPL/MAGANG III DI SEKOLAH/ LEMBAGA
PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY
TAHUN 2016/2017

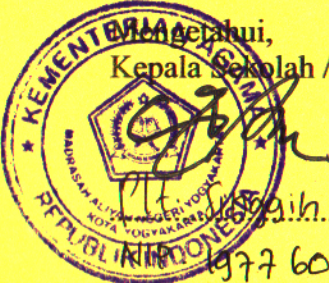
F04
UNTUK MAHASISWA

Nama Sekolah/ Lembaga : MAN Yogyakarta 1
 Alamat Sekolah/ Lembaga : Jalan C. Simanungatah No. 60 Yogyakarta Fax./ Telp. Sekolah/Lembaga :
 Nama DPL PPL/ Magang III : Pusi Wulandari K.M. Kn
 Prodi / Fakultas DPL PPL/ Magang III : Pend. Kewarganegaraan / FIS UNY
 Jumlah Mahasiswa PPL/ Magang III : 2 (dua orang)

No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PPL/ Magang III
1	8 - 8 - 2016	2	mentoring PPL		
2	18 - 8 - 2016	2			
3	29 - 8 - 2016	2			
4	8 - 9 - 2016	2	konsultasi prope laporan		

PERHATIAN :

- ☛ Kartu bimbingan PPL ini dibawa oleh mhs PPL/ Magang III (1 kartu untuk 1 prodi).
- ☛ Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini harap diisi materi bimbingan dan dimintakan tanda tangan dari DPL PPL/Magang III setiap kali bimbingan di lokasi.
- ☛ Kartu bimbingan PPL/Magang III ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PPL/Magang III untuk keperluan administrasi.



Mengetahui,
 Kepala Sekolah / Lembaga

Yogyakarta, 15 September 2016
 Mhs PPL/ Magang III Prodi ... Pkn.

Wibisono, S.Pd.MA
 1977 60 604 2005 01 1 00 4

Kery Anita Pratiwi H.U